



UNIVERSITAS
DIPONEGORO

FAKULTAS
HUKUM

RENCANA STRATEGIS

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

2025 - 2029

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang

Email : fh@live.undip.ac.id

Laman : fh.undip.ac.id

Telp : (024) 76918201 | (024) 76918202 | (024) 76918206



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

Nomor: 16/UN7.F1/HK/VII/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2025 - 2029

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang statuta Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Diponegoro Tahun 2025 -2029;
- c. bahwa berkenaan dengan butir a dan b tersebut, maka perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025 - 2029;
- d. bahwa penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2025-2029 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 01/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024-2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Memperhatikan : Lembar Pengesahan Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1092/UN7.F1.3/HK/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Pengesahan Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025 – 2025

KESATU : Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah Kegiatan Manajemen Organisasi yang digunakan untuk Menetapkan Prioritas, Memfokuskan Energi dan Sumberdaya, Arah Kebijakan serta Memperkuat Kinerja Operasional dalam rangka mencapai Visi dan Misi Organisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro secara Efektif dan Efisien

- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas Pendahuluan; Analisis Lingkungan; Nilai, Visi, Misi Tujuan dan Sasaran; Arah Kebijakan, Strategi Program dan Indikator Kinerja Utama; Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan dan Analisis Risiko; Kerangka Pendanaan; dan Penutup sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini.
- KETIGA : Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU pedoman perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan di Fakultas Hukum Undip Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Dekan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Periode 2020 – 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 1 Juli 2025

DEKAN,



PROF. DR. RETNO SARASWATI, S.H., M.HUM.
NIP 196711191993032002

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Undip; dan
3. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Hukum Undip.



PENGESAHAN
RENSTRA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025 - 2029
Nomor 1092/UN7.F1.3/HK/VI/2025

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, setelah dilakukan pembahasan dalam rapat Senat Fakultas Hukum atas Rencana Strategis Fakultas Hukum Tahun 2025 – 2029, maka Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyetujui dan mengesahkan Rencana Strategis Universitas Diponegoro Tahun 2025 – 2029.

Renstra Fakultas Hukum Tahun 2025 – 2029 telah disesuaikan dengan Renstra Universitas Diponegoro Tahun 2025 – 2029, merupakan peta jalan Fakultas Hukum Tahun 2025 – 2029 sebagai dasar rujukan penyusunan RKAT, penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Kami berharap Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 bukan sekedar dokumen formal perencanaan fakultas, namun harus diimplementasikan sampai pada tataran operasional yaitu program – program dan kegiatan yang terukur.

Selanjutnya Dekan akan segera menerbitkan Surat Keputusan Dekan tentang Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025 – 2029 sebagai dasar hukum bagi program pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada proses penyusunan Revisi Renstra ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Semarang, 30 Juni 2025

Ketua Senat,

Prof. Dr. Budi Santoso, S.H.,M.S.
NIP 196110051986031002

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika peraturan perundang-undangan, perkembangan kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi, serta perubahan lingkungan strategis yang menuntut Fakultas Hukum untuk adaptif, progresif, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

Renstra 2025–2029 ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari Renstra periode sebelumnya, sekaligus menjadi pedoman penting dalam mendukung capaian visi Universitas Diponegoro pada fase Pematangan World Class University (WCU) 2025–2029. Pada fase ini, Undip menetapkan target memasuki 500 besar dan menuju 200 besar QS World University Rankings, serta memperkuat jati diri melalui *tagline* “Undip Bermartabat, Undip Bermanfaat”. Fakultas Hukum sebagai bagian integral dari Undip menerjemahkan arahan tersebut dalam penguatan tridharma, tata kelola kelembagaan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada berbagai dokumen perencanaan Undip, antara lain: Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, Statuta Undip, Kebijakan Umum MWA Undip 2015–2039, Sistem Perencanaan Undip (MWA 2/2018), serta Renstra Universitas Diponegoro 2025–2029 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024. Dengan demikian, Renstra Fakultas Hukum ini disusun secara sinkron, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan universitas.

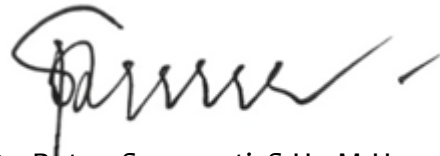
Sebagai dokumen strategis, Renstra Fakultas Hukum 2025–2029 berisi analisis lingkungan, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, serta indikator kinerja yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam menyusun Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), dan Laporan Kinerja (LAKIN). Renstra ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola fakultas yang profesional, akuntabel, dan efektif (*good faculty of law governance*) serta memastikan setiap kegiatan tridharma berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Kami berharap Renstra ini dapat menumbuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Hukum dalam lima tahun ke depan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Senat Fakultas, para dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, serta dukungan dalam penyempurnaan dokumen ini.

Semoga Renstra 2025–2029 ini menjadi pedoman yang efektif untuk memajukan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan menghasilkan kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat.

Semarang, 1 Juli 2025

Dekan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Retno', with a stylized flourish at the end.

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM.....	ii
PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
1 PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG PENDEKATAN PENYUSUNAN RENSTRA	1
CAPAIAN KINERJA FAKULTAS	1
2 ANALISIS LINGKUNGAN.....	16
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	16
A. Kondisi Lingkungan Eksternal	16
B. Kondisi Lingkungan Internal.....	29
SWOT ANALYSIS	54
CRITICAL SUCCESS FACTOR	55
3 NILAI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	58
NILAI-NILAI FAKULTAS.....	58
A. Nilai Dasar Universitas Diponegoro.....	58
B. Empat Pilar Falsafah Hukum Fakultas Hukum	58
C. Kedudukan Nilai dalam Perencanaan Strategis Fakultas.....	60
VISI FAKULTAS	60
MISI FAKULTAS.....	61
TUJUAN STRATEGIS FAKULTAS.....	61
SASARAN STRATEGIS FAKULTAS	62
4 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	69
ARAH KEBIJAKAN	69
A. Penguatan Universitas Riset.....	69
B. Penguatan Sebagai PTNBH.....	69
C. Penguatan Karakteristik	69
D. Pencapaian World Class University	71

	STRATEGI.....	78
	A. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	78
	B. Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtanggaan	81
	C. Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi....	82
	D. Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik.....	84
	PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	85
5	KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN, DAN ANALISIS RISIKO	88
	KERANGKA REGULASI	88
	KERANGKA KELEMBAGAAN	88
	ANALISIS RISIKO INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	90
6	KERANGKA PENDANAAN	97
	SUMBER PENERIMAAN	97
	KEBUTUHAN BELANJA.....	98
	STRATEGI PENERIMAAN	102
	KEBIJAKAN PENDANAAN.....	102
7	PENUTUP.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target, Capaian dan Evaluasi Kinerja Fakultas Tahun 2024.....	2
Tabel 2.	Target dan Capaian Kinerja PTNBH Tahun 2024	13
Tabel 3.	Capaian WCU Universitas.....	29
Tabel 4.	Program Studi pada Fakultas Hukum	30
Tabel 5.	Prestasi Mahasiswa Fakultas Hukum Tahun 2020-2024.....	33
Tabel 6.	Tren Anggaran 2020-2024 (dalam jutaan rupiah)	37
Tabel 7.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020-2024	38
Tabel 8.	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020-2024	38
Tabel 9.	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Aset Bersih Tahun 2020-2024	38
Tabel 10.	Jumlah Dosen Berdasarkan Status Kepegawaian	39
Tabel 11.	Jumlah Tenaga Kependidikan	40
Tabel 12.	Jurnal Ilmiah Terakreditasi DIKTI	46
Tabel 13.	Data Jurnal yang Dikelola FH.....	47
Tabel 14.	Kerjasama Fakultas Hukum	53
Tabel 15.	Pemeringkatan Fakultas Hukum.....	54
Tabel 16.	Critical Success Factor Renstra Fakultas Hukum Tahun 2025-2029	56
Tabel 17.	Critical Success Factor IKU PTNBH Fakultas Hukum Tahun 2025-2029.....	57
Tabel 18.	Distribusi 60 IKU Renstra 2020-2024 menjadi 32 IKU Renstra 2025-2029.....	65
Tabel 19.	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja	85
Tabel 20.	Rencana Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Tahun 2025-2029.....	88
Tabel 21.	Analisis Risiko IKU Fakultas Hukum	90
Tabel 22.	Sumber Penerimaan Fakultas Hukum Tahun 2025-2029	98
Tabel 23.	Rekapitulasi Rencana Sumber Pendapatan dan Kebutuhan Belanja Fakultas Hukum Tahun 2025-2029	99
Tabel 24.	Kerangka Pendanaan Program Fakultas Hukum Tahun 2025-2029	100
Tabel 25.	Kerangka Pendanaan Program World Class University Tahun 2025-2029	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kondisi Lingkungan Eksternal.....	28
Gambar 2.	Akreditasi Program Studi Fakultas Hukum	32
Gambar 3.	Animo Pendaftar Sarjana Hukum Tahun 2020-2024	32
Gambar 4.	Kampus Undip.....	35
Gambar 5.	Jabatan Fungsional Dosen	39
Gambar 6.	Publikasi Artikel Internasional Bereputasi	47
Gambar 7.	Critical Success Factor	56
Gambar 8.	Sasaran Strategis	64
Gambar 9.	Tahapan Pencapaian Visi Fakultas Hukum Undip	64
Gambar 10.	Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Dekan Fakultas Hukum...	90

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG PENDEKATAN PENYUSUNAN RENSTRA

Sesuai Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Diponegoro Tahun 2025-2029 Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Unit Kerja di lingkungan Universitas Diponegoro wajib menyusun Renstra dengan berpedoman pada Peraturan Rektor ini”, maka Fakultas Hukum menyusun Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025-2029 (Renstra FH Undip 2025-2029) ini untuk menjawab kewajiban yang diamanatkan.

Renstra FH Undip 2025-2029 merupakan dokumen mencakup arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program dan indikator kinerja utama. Dokumen ini dipergunakan sebagai acuan penyusunan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai indikator kinerja yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Dokumen Renstra FH Undip 2025-2029 meliputi:

- a) Analisis Lingkungan;
- b) Nilai, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- c) Arah Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Utama;
- d) Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Analisis Risiko;
- e) Kerangka Pendanaan.

Selain itu, Renstra FH Undip 2025-2029 ini juga sebagai acuan bagi pimpinan fakultas dalam menyusun Rencana Program Kegiatan Tahunan (RPKT), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta sebagai acuan dalam menyusun kegiatan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Renstra ini juga menjadi instrumen dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*Good Government*) untuk menjamin pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fakultas yang berkelanjutan selama 5 tahun ke depan.

CAPAIAN KINERJA FAKULTAS

Penyusunan Renstra FH Undip 2025-2029 didasarkan pada target, capaian kinerja dan evaluasi tahun 2020-2024, dengan capaian tahun 2024 sebagai *baseline* penyusunan Indikator Kinerja Fakultas tahun 2025-2029. Realisasi capaian IKU FH tahun 2024 merupakan capaian IKU Renstra termasuk juga di dalamnya adalah 8 IKU PTNBH. Realisasi capaian IKU FH selama tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Target, Capaian dan Evaluasi Kinerja Fakultas Tahun 2024

Kode	IKU	Target	Capaian	Evaluasi
TS1	Menghasilkan Lulusan Berkualitas Dunia dan Unggul yang Komunikatif, Profesional, Berjiwa Leader, Enterpreneur, Berpikir Kritis dan sebagai Agen Perubahan			
P1	Program Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik			
IKU1	Akreditasi Institusi	0	0	0
IKU2	Jumlah prodi terakreditasi Unggul	100	100	Tercapai
IKU3	Jumlah prodi terakreditasi internasional	75	50	<p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Habisnya masa berlaku sertifikat akreditasi internasional pada salah satu prodi. • Rencana pergantian lembaga sertifikasi internasional. • Perpindahan sementara gedung S2 akibat pembangunan gedung oleh universitas. <p>Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendampingan program studi yang akan melaksanakan akreditasi internasional. • Melakukan updating data dengan membuat laporan tahunan Prodi dan Fakultas sesuai dengan standar pada Borang Akreditasi Internasional pada program studi dan Fakultas.
IKU4	Jumlah Prodi yang menawarkan program internasional	75	75	Tercapai
P2	Program Peningkatan Kompetensi Mahasiswa dan Lulusan			
IKU5	Jumlah mahasiswa berwirausaha	15	11,01	<p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya minat mahasiswa untuk berwirausaha. • Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan wirausaha mahasiswa. <p>Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan identifikasi peluang dan potensi kegiatan kewirausahaan mahasiswa. • Melakukan pendampingan kegiatan kewirausahaan. • Membangun sarpras sebagai wadah agar mahasiswa dapat melakukan kegiatan berwirausaha

Kode	IKU	Target	Capaian	Evaluasi
IKU6	Jumlah Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai dari alokasi pengajuan proposal yang diberikan Dikti	45	0	<p>Kendala: Kurangnya minat mahasiswa mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa.</p> <p>Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pembuatan proposal PKM. • Melakukan fasilitasi dan pemberian insentif dan penghargaan kepada Mahasiswa.
IKU7	Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu	79	65,31	<p>Kendala: Kurikulum, mata kuliah dan proses pembelajaran yang ada tidak disiapkan untuk mengantisipasi peraturan akademik yang baru.</p> <p>Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran monitoring dan evaluasi dosen wali. • Mengoptimalkan peran dosen pembimbing dalam pendampingan tugas akhir mahasiswa. • Mengoptimalkan peran bidang akademik untuk melakukan Monev PBM. • Melibatkan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian / pengabdian dosen.
IKU8	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	75	43,88	<p>Kendala: Kurangnya minat mahasiswa dalam kegiatan pelatihan bersertifikasi kompetensi.</p> <p>Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sosialisasi dan promosi kegiatan. • Melakukan revisi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan. • Membangun sarana prasarana sebagai wadah agar mahasiswa dapat melakukan kegiatan berwirausaha sebagai aktualisasi kemampuan kompetensi mahasiswa.

Kode	IKU	Target	Capaian	Evaluasi
IKU9	Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan	65	38,6	<p>Kendala: Kurang optimalnya lulusan yang bersedia mengisi tracer study.</p> <p>Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan pelatihan kompetensi untuk memperoleh sertifikasi. • Melakukan magang di industri dan instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah. • Melakukan tracer study bagi para alumni. • Menyelenggarakan pelatihan softskill sebagai pendamping kompetensi. • Meningkatkan peran unit job creativity.
P3	Program Peningkatan Reputasi Undip			
IKU10	Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat nasional	35	90	Tercapai
IKU11	Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat internasional	20	28	Tercapai
IKU12	Jumlah mahasiswa internasional	65	53	<p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya animo mahasiswa asing untuk mengambil program degree di Fakultas Hukum Undip. • Kurang menariknya promosi program dan mata kuliah yang ditawarkan. <p>Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan summer-course. • Menyelenggarakan sit-in-study. • Menjajaki kemungkinan program double/join degree dengan mitra PT di LN. • Memberikan skema beasiswa kepada mahasiswa internasional (S2 by research). • Menyelenggarakan program summer-course atau program-program internasional lainnya.
IKU13	Jumlah dosen/ peneliti tamu dari DN bergelar doktor	22	29	Tercapai
IKU14	Jumlah dosen/ peneliti tamu dari LN	44	48	Tercapai

Kode	IKU	Target	Capaian	Evaluasi
TS2	Mengembangkan dan Menerapkan Penelitian Inovatif, Memberikan Solusi Permasalahan Masyarakat, Industri dan Negara Berbasis Karakteristik Undip, dan Publikasi Bertaraf Internasional			
P4	Program Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi			
IKU15	Jumlah sitasi dari publikasi internasional bereputasi selama 5 tahun terakhir	66	1310	Tercapai
IKU16	Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi	119	72	Kendala: Beban mengajar dosen yang sangat tinggi sehingga waktu menulis artikel publikasi ilmiah sangat terbatas. Tindak Lanjut: <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan fasilitasi pendanaan dan dukungan bantuan penerjemahan artikel bagi dosen supaya meningkatkan animo menulis jurnal. • Mengadakan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah jurnal kepada dosen.
IKU17	Jumlah publikasi pada prosiding internasional bereputasi	82	2	Kendala: Pilihan dosen untuk melakukan publikasi ilmiah lebih kepada jurnal daripada prosiding, karena kompensasi kum bagi kedua bentuk publikasi tersebut lebih besar kepada kum artikel jurnal internasional. Tindak Lanjut: Memfasilitasi dosen untuk menulis di beberapa prosiding yang dihasilkan dari konferensi internasional yang diselenggarakan oleh institusi lain.
IKU18	Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi	94	346	Tercapai
IKU19	Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi DIKTI	7	8	Tercapai
IKU20	Jumlah jurnal ilmiah yang terindeks database internasional bereputasi	1	1	Tercapai
IKU21	Jumlah ruang lingkup pada laboratorium yang terakreditasi	0	0	Tercapai
P5	Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Publikasi			

Kode	IKU	Target	Capaian	Evaluasi
IKU22	Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai oleh pendanaan nasional	27	3	<p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama di bidang penelitian yang masih belum optimal. • Waktu dosen untuk melaksanakan penelitian kerjasama sangat terbatas karena di Fakultas Hukum beban mengajarnya sangat tinggi. <p>Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama di bidang penelitian dengan mitra kerjasama. • Mengarahkan timeline penelitian kepada dosen untuk mengambil kesempatan pada jeda antar semester perkuliahan.
IKU23	Jumlah dana penelitian dari pendanaan nasional	3,4	0,19	<p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama di bidang penelitian yang masih belum optimal. • Waktu dosen untuk melaksanakan penelitian kerjasama sangat terbatas karena di Fakultas Hukum beban mengajarnya sangat tinggi. <p>Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama di bidang penelitian dengan mitra kerjasama. • Mengarahkan timeline penelitian kepada dosen untuk mengambil kesempatan pada jeda antar semester perkuliahan.
IKU24	Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan internasional/joint research dengan pendanaan internasional	16	6	<p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya minat dosen untuk mengikuti kegiatan ini karena terbatasnya waktu dosen untuk melaksanakan kegiatan. • Kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan joint research internasional. <p>Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun timeline penelitian dosen secara terjadwal sehingga memungkinkan dosen untuk melaksanakan penelitian dengan pendanaan internasional. • Melakukan revisi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan.

Kode	IKU	Target	Capaian	Evaluasi
IKU25	Jumlah (judul) riset yang dibiayai oleh pendanaan internasional dan atau joint research internasional	6	3	<p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya pilihan funding source internasional yang ada. • Kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan joint research internasional. <p>Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama dengan banyak mitra di luar negeri. • Melakukan revisi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan.
IKU26	Jumlah dana penelitian dari pendanaan internasional/joint research internasional	0,07	0	0
P6 Program Penguatan Kualitas Riset dan Pengembangan				
IKU27	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan dan yang diberikan (granted)	38	3	<p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya perubahan ketentuan bahwa pendaftaran HKI yang diakui adalah yang didaftarkan oleh Universitas, tidak boleh fakultas. • Dalam bidang ilmu hukum, hak kekayaan intelektual yang dimungkinkan hanya terbatas hak cipta. <p>Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong dosen untuk mau mendaftarkan hak cipta karya bukunya kepada pihak Universitas dengan ketentuan Undip sebagai pemegang hak ciptanya. • Memaksimalkan pendaftaran hak cipta karya buku-buku dosen.
IKU28	Jumlah Paten	0	0	0
IKU29	Jumlah prototipe R & D	0	0	0
IKU30	Jumlah prototipe laik industri	0	0	0
IKU31	Jumlah PUI (Pusat Unggulan Iptek)	0	0	0
IKU32	Jumlah produk yang telah diproduksi	4	5	Tercapai

Kode	IKU	Target	Capaian	Evaluasi
IKU33	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai dengan pendanaan nasional (di luar Undip)	4	3	<p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya waktu dosen untuk memaksimalkan jumlah kegiatan pengabdian dengan pendanaan nasional, karena tingginya beban mengajar dosen di kampus. • Terbatasnya mitra kerjasama yang menawarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. <p>Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun timeline kegiatan tri dharma perguruan tinggi dosen secara terjadwal guna efisiensi pelaksanaan waktu kegiatan. • Meningkatkan jumlah mitra kerjasama untuk memperluas kesempatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan nasional.
P7	Program Peningkatan Kerjasama dan Komersialisasi Hasil Riset			
IKU 34	Kontribusi penerimaan keuangan dari kerjasama institusi	1,85	0,1	<p>Kendala:</p> <p>Terbatasnya mitra kerjasama yang memiliki kesiapan anggaran untuk pendanaan kerjasama kegiatan.</p> <p>Tindak Lanjut:</p> <p>Memperbanyak jumlah kerjasama dan memperluas mitra kerjasama yang dimiliki sehingga kesempatan untuk pendanaan kerjasama menjadi lebih besar.</p>
IKU35	Jumlah kerjasama dengan PT lain	38	40	Tercapai
IKU36	Jumlah kerjasama hasil penelitian dan/atau kepakaran dosen dengan industri	4	4	Tercapai
IKU 37	Jumlah kerjasama pengabdian masyarakat dan/ atau kepakaran dosen dengan instansi pemerintah/ swasta/PT lain	11	37	Tercapai

Kode	IKU	Target	Capaian	Evaluasi
IKU38	Jumlah dana penelitian dari hasil kerjasama	0,23	0,01	Kendala: Terbatasnya mitra kerjasama yang memiliki kesiapan anggaran untuk pendanaan kerjasama penelitian. Tindak Lanjut: Meningkatkan jumlah mitra kerjasama untuk memperluas kesempatan mendapatkan pendanaan penelitian.
TS3	Mengimplementasikan Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat dan Kemajuan Bangsa, serta Menumbuhkembangkan Jiwa dan Penerapan Kewirausahaan (Entrepreneurship) Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni serta Didukung Sistem Informasi yang Terpadu			
P8	Program Peningkatan RGA dari Unit Bisnis dan Endowment Fund			
IKU39	Kontribusi penerimaan keuangan dari hasil unit usaha (RGU/RGA) terhadap institusi	0,06	0,05	Kendala: <ul style="list-style-type: none"> • Keterlambatan penerbitan jurnal sehingga penerimaan dana dari publication fee menjadi berkurang. • Pemanfaatan ruang sebagai kantin yang sempat terhenti akibat pembangunan gedung. Tindak Lanjut: <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan tim pengelola jurnal dan melakukan penambahan anggota sehingga dapat mengejar ketertinggalan penerbitan jurnal. • Workshop pengelolaan jurnal ilmiah untuk meningkatkan kapasitas dan semangat pengelolaan jurnal bagi tim pengelola jurnal di Fakultas Hukum Undip. • Pengadaan sarana baru untuk kantin.
IKU40	Jumlah Endowment Fund	0	0	0
IKU41	Jumlah jaringan usaha alumni yang terhubung dengan program kampus	3	3	Tercapai
P9	Program Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi			
IKU42	Jumlah sistem informasi yang menunjang tata kelola	90	93,33	Tercapai
IKU43	Jumlah mata kuliah pembelajaran daring	6	34	Tercapai
IKU44	Jumlah laman prodi yang berbahasa inggris dan update	100	100	Tercapai

Kode	IKU	Target	Capaian	Evaluasi
TS4	Mengembangkan Profesionalisme, Kapabilitas dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Universitas yang Baik dan Meningkatkan Kemandirian Penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta Menjadi Teladan bagi Perguruan Tinggi Lain			
P10	Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan			
IKU45	Jumlah Profesor	19,09	16,07	<p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya waktu dosen untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kompetensi. • Kurangnya dukungan anggaran. <p>Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan revisi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan. • Menyusun timeline dosen untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam setahun, baik pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi ataupun kegiatan pelatihan kompetensi.
IKU46	Jumlah Lektor Kepala bergelar doktor	28	19,64	<p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Load pekerjaan dosen yang tinggi. • Banyaknya dokumen persyaratan yang harus disampaikan. <p>Tindak Lanjut:</p> <p>Mengoptimalkan tugas bagian kepegawaian untuk mengingatkan dan menyiapkan berkas-berkas persyaratan.</p>
IKU47	Jumlah dosen berkualifikasi S3 dan Sp2	52	44,6	<p>Kendala:</p> <p>Jumlah dosen yang tidak sebanding dengan jumlah siswa.</p> <p>Tindak Lanjut:</p> <p>Melakukan penjadwalan bagi dosen yang akan mengikuti studi lanjut jenjang S3 agar target dapat terpenuhi pada tahun berikutnya tanpa mengganggu kegiatan proses belajar mengajar.</p>

Kode	IKU	Target	Capaian	Evaluasi
IKU48	Persentase capaian kinerja dosen 16 SKS (sesuai komposisi)	90	31,09	<p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesulitan dosen memenuhi capaian kinerja dosen yang ideal karena kecilnya sks setiap kriteria sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Rektor. <p>Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperluas keterlibatan dosen untuk berkegiatan di Fakultas. • Meningkatkan partisipasi dosen dalam kegiatan-kegiatan penunjang di Fakultas.
IKU49	Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa	1:25	1:40,57	<p>Kendala:</p> <p>Jumlah student body yang besar.</p> <p>Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menambah jumlah dosen luar. • Mengusulkan tambahan dosen ASN/PU Non ASN ke Universitas.
IKU50	Persentase tendik dengan jabatan fungsional	15	2,06	<p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status Undip sebagai PTNBH sedikit banyak berpengaruh pada penambahan jumlah jabatan fungsional tendik. • Beberapa tupoksi yang dikerjakan sebagai pegawai PTNBH tidak dapat diakui untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional. <p>Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan penambahan jumlah jabatan fungsional tendik. • Mengusulkan tupoksi tertentu yang dapat diakui untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional sehingga ada pengakuan atas kinerja yang proporsional.
IKU51	Persentase tendik bersertifikasi kompetensi	45	57,58	Tercapai
P11	Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Pengembangan Aset			
IKU52	Ketersediaan fasilitas PBM (sarana) terstandar	94	94,37	Tercapai
IKU53	Ketersediaan fasilitas pendukung (prasarana)	100	100	Tercapai
IKU54	Pengembangan aset	91	101,82	Tercapai
P12	Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola			
IKU55	Opini laporan keuangan	WTP	WTP	-

Kode	IKU	Target	Capaian	Evaluasi
IKU56	Pelayanan administrasi dan perkantoran	100	100	Tercapai
IKU57	Ketepatan Penyampaian Laporan	100	100	Tercapai
P13	Program Peningkatan Sumber Dana Non-Pendidikan			
IKU58	Peningkatan proporsi pendapatan selain APBN dengan dana dari pemerintah	2,6	14,66	-
IKU59	Persentase dana pendapatan non akademik dengan total pendapatan	20	0,19	<p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterlambatan penerbitan jurnal sehingga penerimaan dana dari publication fee menjadi berkurang. • Pemanfaatan ruang sebagai kantin yang sempat terhenti akibat pembangunan gedung. <p>Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengganti tim pengelola jurnal MMH. • Workshop dalam rangka mengejar keteringgalan pengelolaan jurnal. • Pengadaan sarana baru untuk kantin.
IKU60	Jumlah investasi	0	0	0

Adapun realisasi capaian IKU PTNBH FH selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Target dan Capaian Kinerja PTNBH Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK 2024	Capaian 2024	% Capaian	Evaluasi
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	96,13	94,34	98,14	<p>Kendala: Kurang optimalnya pembekalan <i>softskill</i> khusus untuk pengembangan kompetensi mahasiswa, khususnya calon lulusan. Pelatihan dan pembekalan yang bersifat <i>hardskill</i> telah cukup dilakukan dengan baik, namun untuk sasaran <i>softskill</i> belum optimal.</p> <p>Tindak Lanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pelatihan kompetensi untuk memperoleh sertifikasi. Mengoptimalkan pembekalan <i>softskill</i> khusus untuk pengembangan kompetensi mahasiswa.
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	40	9,26	23,15	<p>Kendala: Kurangnya minat mahasiswa mengikuti program MBKM.</p> <p>Tindak Lanjut: Melakukan pemetaan bidang-bidang pembelajaran di luar program studi</p>
S 2 Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	46,37	50,22	108,3	Tercapai

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK 2024	Capaian 2024	% Capaian	Evaluasi
	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	35,74	37,59	105,18	Tercapai
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	3,28	1,81	55,18	Kendala: Kurangnya minat dan waktu dosen dalam menghasilkan suatu keluaran yang mendapatkan rekognisi internasional. Tindak Lanjut: Melaksanakan kegiatan workshop dengan narasumber yang berkompeten dalam rangka penyegaran, menumbuhkan minat dan membantu mencapai keluaran yang diakui internasional
S 3 Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	4,94	4,9	99,19	Kendala: Kurangnya keberlanjutan MoU program studi dengan instansi lain. Tindak Lanjut: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemetaan instansi/perusahaan terkait yang layak dan memungkinkan untuk menjadi partner kerjasama. Monitoring keberlanjutan dan efektivitas kerjasama setiap program studi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK 2024	Capaian 2024	% Capaian	Evaluasi
	IKU [3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	73,63	98	133,10	Tercapai
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	42,32	100	236,29	Tercapai

ANALISIS LINGKUNGAN

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Mandat yang tertuang dalam misi Fakultas Hukum harus dijabarkan ke dalam sasaran dan program yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis situasi terhadap kondisi eksternal dan internal saat ini. Analisis eksternal terdiri dari makro dan mikro yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berpotensi mempengaruhi Fakultas Hukum dalam mewujudkan misi dan menyelenggarakan misinya. Sedangkan analisis internal ditujukan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Analisis eksternal dan internal juga dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi, program dan kegiatan.

A. Kondisi Lingkungan Eksternal

Fakultas Hukum dituntut terus bergerak maju dan berinovasi untuk dapat menghadapi perubahan dunia yang disruptif dan kompleksnya permasalahan di masyarakat. Semangat *tagline* Undip yaitu “Undip Bermartabat, Undip Bermanfaat” merupakan pendorong agar fakultas senantiasa terbuka dan adaptif terhadap berbagai isu global terkait kemanusiaan, mengedepankan kolaborasi untuk membangun jejaring kerjasama baik dari mitra dalam maupun luar negeri, berkontribusi pada penyelesaian problematika di masyarakat (diluncurkannya program intervensi pengentasan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan dan penanggulangan bencana), serta mampu melakukan akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa isu strategis eksternal seperti kondisi ekonomi, teknologi, politik hukum, sosial budaya dan perkembangan iptek merupakan lingkungan eksternal makro yang dapat menjadi peluang dan ancaman dalam perencanaan dan pengembangan fakultas 5 tahun ke depan.

Fakultas Hukum juga dihadapkan pada lingkungan eksternal mikro seperti pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, kebutuhan dunia usaha dunia industri, mitra dan aliansi, serta pemerintah. Lingkungan eksternal mikro ini dapat menjadi peluang dan ancaman bagi fakultas 5 tahun ke depan, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari para pemangku kebijakan di fakultas.

United Nation’s Sustainable Development Goals

PBB telah mengeluarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan muatan 17 tujuan dengan 169 capaian terukur yang juga telah diimplementasikan melalui Perpres No. 111/2022 dan Penetapan Bappenas tentang Peta Jalan SDGs Indonesia Tahun 2023-2030.

Menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan, peran dan kontribusi Fakultas Hukum dalam meningkatkan daya saing bangsa dan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui tiga aspek tridharma perguruan tinggi yaitu :

1. Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas

Fakultas Hukum dapat memastikan bahwa kurikulum pendidikan hukum yang diterapkan tidak hanya relevan dengan perkembangan hukum terkini, tetapi juga mencakup isu-isu keberlanjutan, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan. Melalui pembelajaran yang mengedepankan nilai-nilai inklusivitas, kesetaraan, dan akses yang adil, Fakultas Hukum dapat berkontribusi dalam mencetak generasi hukum yang peka terhadap tantangan global dan lokal dalam pembangunan berkelanjutan.

2. Penelitian yang Mendukung Kebijakan dan Inovasi

Fakultas Hukum dapat terlibat dalam penelitian yang menghasilkan solusi hukum inovatif untuk berbagai masalah yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bisa mencakup bidang-bidang seperti reformasi hukum, peraturan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan, serta penguatan institusi hukum untuk memastikan keadilan dan ketertiban di tingkat nasional maupun internasional.

3. Pengabdian kepada Masyarakat yang Berkelanjutan

Dalam pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Hukum dapat memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang hak-hak mereka, sistem hukum yang mendukung keadilan sosial, serta pentingnya partisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Fakultas Hukum dapat bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk menyusun dan mensosialisasikan kebijakan hukum yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.

4. Menciptakan Kemitraan yang Kolaboratif

Fakultas Hukum dapat membangun kemitraan yang solid dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun internasional, untuk mendukung pengembangan kebijakan hukum yang proaktif terhadap isu-isu keberlanjutan. Kemitraan ini dapat mencakup kerja sama dalam riset, pendidikan, dan pengembangan kapasitas untuk mengatasi tantangan-tantangan besar yang dihadapi negara-negara dalam mencapai SDGs.

Secara keseluruhan, Fakultas Hukum memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pencapaian SDGs melalui pendidikan hukum yang berkualitas, penelitian yang relevan, dan pengabdian masyarakat yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang berbasis riset dan kolaborasi, Fakultas Hukum dapat mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Selain itu dapat mewujudkan Fakultas Hukum Yang Progresif Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila Menuju

Pengembangan Keilmuan Yang Berbasis Riset Berkelas Dunia yang mampu bersinergi dengan muatan 17 tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (UN-SDGs).

Human Capital Index (HCI)

Berdasarkan release World Bank Tahun 2020, Indonesia berada di posisi 1 (0,54) di bawah beberapa negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, Fakultas Hukum terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan sistem admisi penerimaan mahasiswa baru, kualitas kurikulum pembelajaran berbasis Case Methode dan Project Methode, kurikulum Merdeka Belajar/Kampus Merdeka, Kurikulum yang Link and Match dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Selain itu Fakultas Hukum Undip juga menitikberatkan peningkatan kualitas pendidikan melalui pengembangan kualitas pembelajaran melalui usaha peningkatan buku ajar, monografi, book chapters, dan buku teks berbahasa inggris serta peningkatan sumberdaya manusia melalui penyediaan anggaran untuk kegiatan riset inovatif, dan penjaminan mutu.

Kualitas dosen dan tenaga kependidikan sangat mempengaruhi kualitas pendidikan dan pengembangan riset di Fakultas Hukum. HCI yang baik mencerminkan adanya dosen yang berkompeten, memiliki gelar akademik yang tinggi, serta terlibat dalam riset dan publikasi ilmiah yang relevan dengan perkembangan ilmu hukum. Di Fakultas Hukum Undip, upaya untuk terus mengembangkan kapasitas dosen dilakukan melalui:

1. Pengembangan Profesional Dosen: Dosen di Fakultas Hukum terus diperkenalkan pada kesempatan untuk mengembangkan kompetensi mereka, melalui pendidikan lanjutan, seminar, workshop, atau program penelitian internasional. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pengajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan: Tenaga kependidikan juga berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional fakultas. Oleh karena itu, pemberian pelatihan dalam manajemen akademik dan administratif menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja

Fakultas Hukum Undip yang memiliki lingkungan akademik yang kondusif mendukung pengembangan *human capital*, di antaranya melalui:

1. Fasilitas Pembelajaran yang Memadai: Dosen dan mahasiswa di Fakultas Hukum memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang memadai, seperti ruang kuliah yang nyaman, perpustakaan dengan koleksi buku hukum yang lengkap, serta akses terhadap database hukum internasional dan lokal. Infrastruktur digital yang mendukung pembelajaran daring atau *hybrid* juga semakin diperkuat.
2. Keterlibatan dalam Penelitian dan Publikasi: Fakultas Hukum mendorong dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian yang berdampak pada kemajuan ilmu pengetahuan. Ini mencakup penelitian yang diakui secara

internasional, serta kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum di Indonesia dan di dunia internasional.

Mahasiswa di Fakultas Hukum Undip adalah bagian dari sumber daya manusia yang sangat penting untuk meningkatkan *Human Capital Index*. Kualitas mahasiswa dapat dilihat dari tingkat kelulusan tepat waktu, prestasi akademik, serta keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Fakultas Hukum Undip menciptakan lingkungan yang mendukung untuk:

1. Pengembangan Karakter dan Kepemimpinan: Melalui berbagai program pengembangan karakter, mahasiswa didorong untuk memiliki sikap kepemimpinan, integritas, dan keterampilan komunikasi yang baik, sehingga mereka siap menghadapi tantangan hukum global dan lokal.
2. Magang dan Kerjasama dengan Industri: Mahasiswa Fakultas Hukum Undip diberi kesempatan untuk mengikuti program magang di lembaga hukum, organisasi non-pemerintah, atau sektor publik, yang memberi mereka pengalaman langsung dalam praktik hukum serta meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja.
3. Keterlibatan dalam Riset dan Inovasi: Fakultas Hukum Undip mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan riset, baik secara mandiri maupun dalam kelompok, yang bertujuan untuk menghasilkan inovasi hukum yang dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan

Kinerja lulusan Fakultas Hukum Undip menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan fakultas dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Lulusan yang berhasil mencapai karir di bidang hukum, baik sebagai praktisi, akademisi, atau di sektor pemerintah, mencerminkan keberhasilan Fakultas Hukum dalam menyiapkan mereka untuk berkontribusi pada perkembangan hukum di Indonesia dan dunia.

1. Pengakuan Internasional: Dengan meningkatnya jumlah lulusan yang terlibat dalam kegiatan internasional, baik melalui kerja sama universitas atau partisipasi dalam konferensi dan forum internasional, Fakultas Hukum Undip dapat menunjukkan kemajuan dalam kualitas pendidikan dan pengembangan *human capital*.
2. Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing: Fakultas Hukum Undip memastikan bahwa lulusannya memiliki keterampilan yang relevan dan dapat bersaing di pasar global, baik dalam hal kemampuan beracara, riset, atau pengetahuan tentang regulasi internasional.

Kemitraan yang dijalin dengan berbagai universitas, lembaga hukum, serta industri lainnya berkontribusi dalam pengembangan *Human Capital* di Fakultas Hukum Undip. Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya pengalaman mahasiswa dan dosen, tetapi juga memberikan akses kepada fasilitas riset yang lebih luas dan peluang untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum yang lebih berkelanjutan.

Global Competitiveness Index

Berdasarkan pengukuran GCI Tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat 34, dan naik menjadi posisi 27 pada tahun 2024. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki posisi tersebut adalah dengan meningkatkan daya saing dengan menghasilkan lulusan yang berkualitas, melakukan penelitian yang kreatif, inovatif, dan hilirisasi hasil penelitian inovatif, kapasitas *entrepreneurship mindset* mahasiswa, menjadi agen perubahan dan penggerak pengembangan ekonomi melalui program pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan tren dan faktor yang memengaruhi daya saing, proyeksi untuk periode 2025–2029 menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan yang adaptif, investasi dalam teknologi dan inovasi, serta reformasi struktural yang efektif akan mengalami peningkatan daya saing. Sebaliknya, negara-negara yang gagal mengatasi tantangan internal dan eksternal berisiko mengalami penurunan dalam peringkat daya saing global mereka. Penting untuk dicatat bahwa daya saing bukan hanya tentang kekuatan ekonomi, tetapi juga mencakup kemampuan negara dalam beradaptasi dengan perubahan global, mengelola sumber daya secara efisien, dan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan inklusif.

Fakultas Hukum wajib berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa dengan jalan menghasilkan lulusan yang berkualitas, melakukan penelitian yang kreatif, inovatif, dan hilirisasi hasil penelitian inovatif, sehingga menghasilkan luaran: produk yang unggul dalam skala komersial, publikasi internasional dan paten. Fakultas Hukum juga meningkatkan kapasitas *entrepreneurship mindset* mahasiswa selama masa pendidikan melalui pelatihan dan rintisan usaha. Fakultas Hukum juga wajib menjadi agen perubahan dan penggerak pengembangan ekonomi melalui program-program pengabdian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Perubahan Paradigma Perguruan Tinggi

Paradigma Perguruan Tinggi saat ini mengarah pada Integrasi Sistem Pendidikan menuju internasionalisasi dan globalisasi. Persiapan untuk menghadapi adalah dengan menargetkan lulusan yang mempunyai *hard competence*, *soft competence*, dan *supplement competence* dengan sistem pembelajaran berbasis problem solving dengan mengedepankan nilai belajar sepanjang hayat (*long life learning*).

Dalam menyikapi perubahan paradigma perguruan tinggi, Fakultas Hukum mengembangkan sistem pembelajaran di mana lulusannya tidak hanya mempunyai kemampuan akademik (*hard competence*) saja, tetapi juga dibekali dengan keterampilan khusus (*soft competence*) dan kemampuan tambahan (*supplement competence*). Penguasaan *soft skill* mahasiswa dapat diperoleh melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, ekstra kurikuler, dan organisasi kemahasiswaan. Fakultas Hukum juga mengembangkan sistem pembelajaran berbasis penyelesaian masalah (*problem solving*), melalui perkuliahan dan diskusi yang dilaksanakan di luar

kelas yaitu di lapangan/industri di mana mahasiswa dihadapkan langsung dengan permasalahan yang perlu penyelesaian.

Selain pendidikan akademik, pendidikan karakter bagi mahasiswa penting dilakukan untuk membentuk jatidiri, dengan jalan mengembangkan pola pikir, sikap, perilaku yang kritis, inovatif, logis, kolaboratif, dinamis, dan berjiwa kewirausahaan, dengan mengedepankan nilai-nilai belajar sepanjang hayat (*long life learning*). Pendidikan Pascasarjana di lingkungan Fakultas Hukum harus mendapat perhatian besar karena sebagai andalan untuk menghasilkan produk-produk penelitian yang inovatif dan inventif serta publikasi internasional.

Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dalam menghadapi Liberalisasi Masyarakat Economy ASEAN perlu membekali keterampilan lulusan dengan kompetensi kerja siap pakai, berpengetahuan luas, berwawasan terbuka, bersemangat juang, berpikiran kritis, berkepedulian sosial, dan memiliki kemampuan *enterpreneurship* yang dapat diakui dan diterima dalam pasaran kerja nasional, regional dan internasional.

Dampak positif Masyarakat Ekonomi ASEAN berupa meningkatnya kompetisi dalam produktivitas, etos kerja, daya saing, deregulasi, dan pelayanan publik. Namun demikian, terkait dengan kualitas sumber daya manusia, Indonesia memiliki tantangan terhadap ketidaksiapan dalam peningkatan mutu pendidikan tenaga kerja, ketersediaan dan infrastruktur yang kurang.

Peran Fakultas Hukum adalah mencetak mahasiswa dalam sistem masyarakat ekonomi ASEAN dengan membekali keterampilan dan kompetensi kerja siap pakai, berpengetahuan luas, berwawasan terbuka, bersemangat juang, berpikiran kritis, berkepedulian sosial, dan memiliki kemampuan *entrepreneurship* yang tertuang dalam arah kebijakan umum fakultas dan usaha yang dilakukan terkait peningkatan kualitas pendidikan.

Revolusi Industri 4.0

Dengan perubahan besar yang terjadi saat ini berupa IoT, *big data*, *argumented reality*, *cyber security*, AI, *Addictive manufacturing*, *simulation*, *sistem integration* dan *cloud computing*, fakultas telah mengembangkan sistem *Single Sign-On* (SSO) sebagai e-learning dan *cyber learning* dalam sistem pendidikan, penelitian, pengabdian dan tata kelola keuangan, sehingga pengguna dapat mengakses ke pangkalan data (*database*) secara *real time*.

Fakultas Hukum merespon lima elemen penting yang harus menjadi perhatian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa di era Revolusi Industri 4.0 dengan jalan menyelenggarakan pendidikan melalui kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan dan program studi, kompetensi lulusan, tantangan lokal/regional/global, yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan

Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) juga mengadopsi standar pendidikan tinggi internasional.

Pengembangan kurikulum bersifat sangat dinamis, oleh karena itu perlu dievaluasi dan dikembangkan secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu serta keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional. Fakultas Hukum memanfaatkan teknologi informasi (TI) dengan mengembangkan *e-learning* dan *cyber learning* melalui penerapan sistem pendidikan, penelitian, pengabdian dan tata kelola keuangan berbasis sistem informasi yang integratif dengan Sistem *Single Sign-On* (SSO) yang dibangun oleh universitas. Dengan sistem ini, diharapkan semua data dan informasi di Fakultas Hukum dapat terekapitulasi dengan baik, rinci, lengkap dan jelas dalam sistem informasi yang akan terhubung dengan pusat data di tingkat universitas, sehingga pengguna yang memiliki akses ke pangkalan data (*database*) secara *realtime* akan mendapatkan data yang diperlukan lebih cepat, lengkap, dan sangat akurat.

Revolusi Industri 4.0 memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk sektor hukum, yang memerlukan adaptasi cepat agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yang pesat. Dalam hal ini, Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum Undip 2025-2029 harus mencakup langkah-langkah konkret yang mendukung transformasi digital dalam pendidikan hukum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kurikulum pendidikan di Fakultas Hukum Undip perlu diubah agar lebih relevan dengan tantangan zaman, dengan mengintegrasikan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan *cyber law*. Pendidikan hukum yang berbasis teknologi ini akan membekali mahasiswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk memahami dan mengatasi permasalahan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi.

Penelitian hukum juga harus mengikuti perkembangan tersebut, dengan fokus pada isu-isu hukum terkait teknologi. Misalnya, penelitian mengenai regulasi perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual di era digital, atau penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi hukum. Hal ini akan memberikan kontribusi penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang dapat mengatasi tantangan yang muncul di tengah pesatnya transformasi digital. Fakultas Hukum Undip juga dapat memperkuat perannya sebagai pusat penelitian hukum dengan menekankan inovasi yang mendukung keberlanjutan dan keadilan sosial di dunia yang semakin terdigitalisasi.

Selain itu, kolaborasi dengan industri teknologi menjadi aspek yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing Fakultas Hukum Undip. Kemitraan dengan perusahaan-perusahaan teknologi, lembaga hukum internasional, serta lembaga pendidikan lainnya akan membuka peluang bagi mahasiswa dan dosen untuk terlibat langsung dalam pengembangan teknologi hukum (*legal tech*), serta memperkuat jaringan profesional di dunia hukum digital. Program magang dan riset kolaboratif

dengan sektor teknologi juga dapat memperluas wawasan mahasiswa dan dosen mengenai tantangan dan peluang yang ada dalam dunia hukum di era digital.

Penguatan infrastruktur digital di Fakultas Hukum Undip akan mendukung pencapaian tujuan tersebut. Fasilitas pembelajaran daring, akses ke perpustakaan digital, dan penggunaan teknologi dalam administrasi fakultas akan meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih efisien dan terjangkau bagi semua mahasiswa. Selain itu, peningkatan kompetensi digital bagi dosen dan tenaga kependidikan sangat penting agar mereka dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pengajaran dan penelitian. Program pelatihan dan pengembangan profesi untuk dosen serta tenaga pendukung akademik lainnya akan memastikan bahwa seluruh elemen di Fakultas Hukum siap menghadapi era digital ini.

Transformasi layanan hukum juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Renstra Fakultas Hukum. Dengan kemajuan teknologi, Fakultas Hukum Undip dapat berkontribusi dalam memperkenalkan model layanan hukum berbasis teknologi, seperti penyelesaian sengketa secara daring, platform konsultasi hukum digital, dan peradilan elektronik. Hal ini akan memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum yang lebih efisien, terjangkau, dan transparan. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam praktik hukum, Fakultas Hukum dapat turut berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan global.

Secara keseluruhan, Renstra Fakultas Hukum Undip 2025-2029 harus mengakomodasi perubahan besar yang dibawa oleh Revolusi Industri 4.0. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Hukum dapat berperan aktif dalam mencetak tenaga hukum yang tidak hanya menguasai aspek-aspek klasik hukum, tetapi juga siap menghadapi tantangan baru yang muncul di era digital. Hal ini akan memperkuat posisi Fakultas Hukum Undip sebagai lembaga pendidikan yang inovatif, adaptif, dan siap bersaing di tingkat global.

Visi Indonesia Emas 2045

Demi pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dengan Pembangunan Manusia dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, diperlukan program untuk mensukseskan pendidikan yang semakin tinggi dan merata serta kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas, *entrepreneurship* dan penguatan karakter.

Fakultas Hukum menyikapi pentingnya pendidikan karakter dan *enterpreunership* bagi mahasiswa melalui program dan kegiatan yang dapat membentuk jatidiri mahasiswa dengan jalan mengembangkan pola pikir, sikap, perilaku yang kritis, inovatif, logis, kolaboratif, dinamis dan berjiwa kewirausahaan selama masa pendidikan melalui pembinaan, pelatihan dan penyediaan ruang sebagai sarana mahasiswa mengeksplorasi jiwa kewirausahaan dengan rintisan usaha.

Visi Indonesia Emas 2045 mengusung cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045, bertepatan dengan seratus tahun kemerdekaan. Visi ini mencakup pencapaian kesejahteraan yang merata, daya saing yang tinggi di tingkat global, serta keberlanjutan pembangunan di semua aspek kehidupan. Dalam kerangka Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum Undip 2025-2029, visi ini menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mendukung tercapainya tujuan besar tersebut. Fakultas Hukum Undip harus memainkan peran penting dalam mengembangkan sistem hukum yang dapat mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada kualitas pendidikan hukum yang relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Salah satu langkah utama yang perlu diambil adalah memperkuat pendidikan hukum yang berkualitas dan relevan. Fakultas Hukum Undip perlu mengintegrasikan isu-isu hukum yang berkembang, seperti cyber law, hukum teknologi, hukum lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam dalam kurikulum pendidikan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada mahasiswa mengenai tantangan hukum yang muncul di era digital dan global, Fakultas Hukum Undip dapat mencetak generasi hukum yang siap mengatasi masalah hukum masa depan. Kurikulum yang lebih terfokus pada aspek praktis hukum di dunia yang semakin terdigitalisasi dan terhubung secara global akan membantu mahasiswa menjadi profesional yang tidak hanya kompeten, tetapi juga inovatif dalam menyelesaikan masalah hukum.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Fakultas Hukum harus mencetak lulusan yang memiliki keterampilan praktis serta pemahaman mendalam mengenai regulasi yang mendukung pembangunan nasional. Dengan meningkatkan kualitas dosen melalui program pengembangan profesional, penelitian kolaboratif, serta partisipasi dalam forum internasional, Fakultas Hukum Undip akan memastikan bahwa lulusannya siap menghadapi tantangan hukum global. Di sisi lain, mahasiswa harus diberikan keterampilan berpikir kritis, kemampuan untuk berinovasi, serta keahlian hukum yang dapat diaplikasikan dalam konteks hukum nasional dan internasional.

Selain itu, Fakultas Hukum Undip perlu berperan aktif dalam penyusunan kebijakan hukum yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh fakultas harus berfokus pada isu-isu yang relevan dengan pembangunan nasional, seperti keadilan sosial, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan good governance. Dengan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada analisis hukum yang mendalam, Fakultas Hukum Undip dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembentukan kebijakan yang mendukung tercapainya tujuan Indonesia Emas 2045. Riset yang berfokus pada perbaikan sistem hukum dan regulasi akan memastikan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Fakultas Hukum Undip juga harus memperkuat kolaborasi dengan berbagai sektor, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerjasama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan adil. Kolaborasi ini dapat meliputi program magang untuk mahasiswa, riset kolaboratif, atau pengembangan legal tech yang mendukung modernisasi sistem hukum. Kemitraan dengan lembaga-lembaga internasional juga akan memperkaya perspektif mahasiswa dan dosen mengenai praktik hukum global serta tren hukum internasional yang perlu diadopsi dalam konteks Indonesia.

Selain itu, Fakultas Hukum Undip dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan hukum. Dengan memanfaatkan platform pembelajaran daring, e-library, dan sistem peradilan elektronik, Fakultas Hukum dapat memperluas akses pendidikan dan layanan hukum kepada masyarakat yang lebih luas. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sistem hukum, yang akan memberikan dampak positif dalam proses pemerintahan dan pelayanan publik. Fakultas Hukum dapat menjadi pionir dalam mengintegrasikan teknologi dalam dunia pendidikan hukum dan praktik hukum di Indonesia, sesuai dengan perkembangan global yang semakin digital.

Secara keseluruhan, Renstra Fakultas Hukum Undip 2025-2029 berfokus pada pengembangan pendidikan hukum yang lebih inovatif, peningkatan kualitas SDM yang lebih adaptif terhadap teknologi dan globalisasi, serta penguatan peran dalam penyusunan kebijakan hukum yang mendukung tujuan pembangunan nasional. Dengan mendukung Visi Indonesia Emas 2045, Fakultas Hukum Undip akan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan, yang menjadi landasan penting bagi kemajuan Indonesia di masa depan.

Climate Change & Net Zero Emission

Komitmen pembangunan berkelanjutan salah satunya adalah dengan pemantapan ketahanan energi dan air serta terhadap lingkungan hidup. Mengembangkan kampus yang antisipatif dengan perkembangan iptek dan peradaban dengan fungsi dan model berbasis Academic Multidisciplinary, Science and Techno Park, Green and Sustainable, dan Living-Learning Community.

Fakultas Hukum sangat menyadari pentingnya ketahanan energi dan air yang diwujudkan dengan pengembangan kampus yang ramah energi melalui penggunaan peralatan-peralatan hemat listrik dan dengan penggunaan keran air otomatis serta pengembangan smart room. Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup berkelanjutan, Fakultas Hukum mengembangkan taman-taman berupa taman reguler, vertical garden, roof garden serta arboretum yang selain untuk kenyamanan dan keindahan juga dapat dibudidayakan untuk tujuan penelitian dan pendidikan.

Climate Change & Net Zero Emission adalah isu global yang semakin mendesak, mengingat dampak perubahan iklim yang semakin nyata pada lingkungan, ekonomi, dan masyarakat di seluruh dunia. Dalam konteks Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum Undip 2025-2029, isu ini harus dijadikan sebagai salah satu fokus utama, baik dalam pengembangan kurikulum, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Hukum memiliki peran strategis dalam merancang kebijakan hukum yang mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan pencapaian Net Zero Emission (NZE), yakni pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga mencapai keseimbangan antara emisi yang dihasilkan dan yang dapat diserap kembali oleh bumi.

Penting bagi Renstra Fakultas Hukum Undip 2025-2029 untuk mengintegrasikan pembelajaran mengenai hukum lingkungan yang berfokus pada perubahan iklim. Fakultas Hukum Undip harus mengembangkan kurikulum yang mencakup topik-topik seperti perjanjian internasional tentang perubahan iklim, hak atas lingkungan hidup yang sehat, serta regulasi terkait energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui pengajaran yang berbasis pada tantangan global ini, mahasiswa dapat memahami pentingnya regulasi yang mendukung mitigasi perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Fakultas Hukum Undip dapat melatih mahasiswa untuk menjadi praktisi hukum yang dapat merancang kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan dan yang mendukung upaya global dalam mencapai Net Zero Emission pada 2050.

Dalam hal penelitian, Fakultas Hukum Undip harus mendorong riset yang berfokus pada kebijakan dan regulasi yang mendukung pencapaian Net Zero Emission di Indonesia. Penelitian ini dapat mencakup analisis terhadap implementasi kebijakan carbon pricing, emission trading schemes (ETS), dan pengurangan emisi sektor energi dan transportasi. Selain itu, Fakultas Hukum juga dapat berkontribusi dalam mengembangkan hukum terkait perubahan iklim yang mengatur hubungan antara negara, korporasi, dan masyarakat dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Penelitian yang menghasilkan rekomendasi kebijakan ini sangat penting dalam mendukung pemerintah Indonesia untuk memenuhi komitmennya terhadap Perjanjian Paris dan rencana nasional untuk mengurangi emisi GRK.

Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek penting dalam Renstra Fakultas Hukum Undip dalam menghadapi perubahan iklim dan transisi menuju Net Zero Emission. Fakultas Hukum dapat menyelenggarakan program sosialisasi dan pelatihan yang mengedukasi masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah mengenai pentingnya peraturan terkait perubahan iklim, serta praktik keberlanjutan yang dapat diterapkan di tingkat lokal dan nasional. Hal ini termasuk memberikan informasi tentang peraturan perlindungan lingkungan, hak-hak masyarakat yang terdampak perubahan iklim, serta mekanisme hukum yang mendukung transisi energi terbarukan dan pengurangan jejak karbon di tingkat perusahaan dan industri.

Selain itu, Fakultas Hukum Undip juga harus berperan aktif dalam mendukung pengembangan kebijakan hukum yang pro-lingkungan, termasuk hukum yang

mengatur transisi energi terbarukan dan pengelolaan emisi sektor industri. Kebijakan hukum yang mengatur langkah-langkah pengurangan emisi harus diperkuat dengan implementasi yang transparan dan efektif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Fakultas Hukum Undip dapat berkolaborasi dengan lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam merancang kebijakan yang tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Fakultas Hukum Undip juga dapat berperan dalam advokasi hukum terkait perubahan iklim, dengan mengedukasi para pemangku kepentingan tentang pentingnya kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan Net Zero Emission. Dalam hal ini, Fakultas Hukum Undip bisa menjadi pusat kajian dan advokasi hukum yang mendukung pemerintah dalam merancang kebijakan iklim yang progresif dan berdampak luas, termasuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan.

Secara keseluruhan, dalam Renstra Fakultas Hukum Undip 2025-2029, perubahan iklim dan pencapaian Net Zero Emission menjadi fokus utama dalam setiap aspek kegiatan fakultas, baik dalam kurikulum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun pengembangan kebijakan. Fakultas Hukum Undip harus berperan sebagai agen perubahan yang dapat menghasilkan tenaga hukum yang siap mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan dunia.



Gambar 1. Kondisi Lingkungan Eksternal

Selain apa yang sudah disampaikan di atas, Fakultas Hukum juga dihadapkan pada lingkungan eksternal mikro seperti pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, kebutuhan dunia usaha dunia industri, mitra dan aliansi, serta pemerintah. Lingkungan eksternal mikro ini dapat menjadi peluang dan ancaman bagi Undip 5 tahun ke depan, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari para pemangku kebijakan.

Beberapa indikator yang mencerminkan reputasi universitas dan fakultas perlu mendapatkan perhatian serius dikarenakan tingkat capaiannya yang belum memenuhi target. Di antaranya adalah *Academic Reputation*, *Employment Outcome*, *Faculty Student Ratio*, *International Faculty Rasio*, *International Student Rasio* dan *Sustainability*.

Tabel 3. Capaian WCU Universitas

No.	2025	2024	Institution Name	O	AR	CPF	EO	ER	FCR	IFR	IRN	ISR	S
	RANK	RANK		Overall	Academic Reputation	Citations per Faculty	Employment Outcomes	Employer Reputation	Faculty Student Ratio	International Faculty Ratio	International Research Network	International Students Ratio	Sustainability
1	206	237	Universitas Indonesia	45,7	53,8	2,1	77,3	79,2	55,7	88,3	37,2	7,1	32,7
2	239	263	Gadjah Mada University	41,8	54,4	1,7	69	73,5	57,6	40,3	38,1	4,1	26,8
3	256	281	Bandung Institute of Technology (ITB)	39,9	43,2	2,6	49,2	72,7	55,8	94,4	26,3	3,8	37,6
4	308	345	Airlangga University	35,3	37,1	1,5	18,9	79,1	57	58	40,3	6,7	16,3
5	426	489	IPB University (a.k.a. Bogor Agricultural University)	27,9	23,5	1,8	33,9	46,9	71,4	53,2	19,1	3,6	35,1
6	585	621-630	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS Surabaya)	21,2	17,3	1,6	13	48,9	47,8	47,5	12	5,3	16,1
7	596	661-670	Universitas Padjadjaran	20,8	19	1,4	33,4	41,6	41,4	34,8	19,6	2,2	21,3
8	721-730	791-800	Diponegoro University	-	19,2	1,5	14,6	41,7	19,3	27,9	27,4	3	9,7
9	801-850	801-850	Universitas Brawijaya	-	19,2	1,4	13,1	42,4	11,5	13,7	19,6	1,4	9
10	951-1000	1001-1200	Bina Nusantara University (BINUS)	-	12,5	2,1	12,9	21,8	19,9	34,7	10,7	4,3	4,1

Rendahnya capaian beberapa indikator capaian Undip di QS WUR, THE, dan Liga PTN-BH dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- Tingkat ketergantungan pada dana yang berasal dari UKT mahasiswa dan pemerintah masih tinggi;
- Rendahnya hilirisasi dan inovasi hasil-hasil penelitian yang dimanfaatkan industri;
- Rekognisi di tingkat Internasional masih rendah;
- Pangkalan data masih lemah;
- Jumlah dosen S3 masih 50% dari total dosen;
- Jumlah dosen dan mahasiswa internasional masih rendah;
- Student mobility masih lemah;
- Reputasi akademik dan lulusan secara internasional masih rendah;
- Prestasi mahasiswa tingkat internasional masih rendah;
- Akreditasi internasional program studi masih rendah;
- Rasio mahasiswa dan dosen cukup besar;
- Kurang optimalnya pengalaman dosen sebagai praktisi;
- Jumlah mahasiswa magang masih rendah; dan
- Jumlah kerja sama dengan Perguruan Tinggi yang masuk 100 besar QS by subject masih rendah.

B. Kondisi Lingkungan Internal

Kondisi lingkungan internal Fakultas Hukum merupakan pijakan untuk melakukan analisis kekuatan dan kelemahan dipadukan dengan kondisi eksisting selama periode tahun 2020-2024.

1. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Pengembangan Program Studi

Proses pendidikan pada Fakultas Hukum dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi melalui Dekan. Proses pendidikan pada Program Studi didasarkan

pada kajian seksama dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan nasional. Pengembangan program studi dalam 5 tahun ke depan (Tahun 2025-2029) dilakukan secara selektif mengacu pada orientasi penelitian yang sejalan dengan universitas yaitu pengembangan wilayah tropis, maritim, pantai yang berkelanjutan, kebijakan pendidikan tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, revolusi industri 4.0, rasio dosen dan mahasiswa, jumlah mahasiswa dan akreditasi semua program studi.

Evaluasi secara berkala harus dilakukan untuk keberlangsungan program studi dengan memperhatikan perkembangan jumlah mahasiswa, perkembangan iptek maupun tren kebutuhan pasar.

Tabel 4. Program Studi pada Fakultas Hukum

NO	PROGRAM STUDI	STRATA
1	SARJANA HUKUM	S1
2	MAGISTER HUKUM	S2
3	MAGISTER KENOTARIATAN	S2
4	DOKTOR HUKUM	S3

Keunggulan dan Karakteristik Program Studi

Fakultas Hukum Undip sebagai salah satu Fakultas Hukum terbaik di Indonesia memiliki 4 (empat) program studi terbaik dengan keunggulan dan karakteristik yang dimilikinya:

- 1) **Program Studi Sarjana Hukum** sebagai salah satu program studi S1 Hukum tertua di Indonesia memiliki kurikulum yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas sebagaimana dibuktikan oleh para alumni sukses yang dihasilkannya. Konsentrasi peminatan yang dimiliki antara lain: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Acara, Dasar-dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat, dan Hukum Administrasi Negara.
- 2) **Program Studi Magister Hukum** memiliki karakteristik khusus untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembaharuan hukum. Konsentrasi yang ditawarkan antara lain: Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Hukum Ketatanegaraan, Hukum Internasional, dan Konsentrasi Ilmu Hukum.
- 3) **Program Studi Magister Kenotariatan** sebagai salah satu Program Studi Kenotariatan tertua di Indonesia, memiliki keunggulan dalam mencetak lulusan yang memiliki keterampilan yang mumpuni dalam bidang kenotariatan, dengan mata kuliah yang bersifat praktis membekali

keterampilan mahasiswa sejak di bangku perkuliahan. Disini mahasiswa juga banyak belajar dari praktisi, selain dari akademisi.

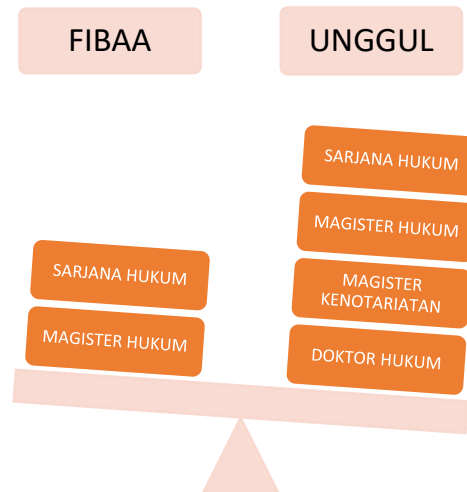
- 4) **Program Studi Doktor Hukum** sebagai Program Studi Doktor terkemuka di Indonesia, memiliki keunggulan sebagai lembaga pendidikan doktor hukum yang mengedepankan proses “pencarian, pembebasan, dan pencerahan” sebagaimana gagasan hukum progresif yang disampaikan Prof. Satjipto Rahardjo, S.H. Disini mahasiswa mendalami hukum secara filosofis sebagai landasan untuk memahami hukum secara menyeluruh sampai ke tataran teoritis, ilmiah, hingga praktis.

Posisi Strategis Program Studi

- 1) **Relevansi dengan Kebutuhan Pasar Kerja**
Program studi harus dapat menghasilkan lulusan dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja saat ini dan masa depan. Relevansi ini dapat dilihat dari tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja, serta umpan balik dari pengguna lulusan.
- 2) **Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**
Program studi harus aktif melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai ciri khas dan kekhususan universitas. Hal ini dapat dilihat dari jumlah publikasi ilmiah, paten, dan inovasi yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa.
- 3) **Potensi Pengembangan Karir Lulusan**
Program studi harus dapat memberikan peluang karir yang luas bagi lulusannya. Lulusan program studi yang strategis akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan mengembangkan karir mereka. Hal ini dapat dilihat dari jaringan alumni, kerjasama dengan industri, dan program pengembangan karir yang disediakan oleh prodi.
- 4) **Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah dan Nasional**
Program studi harus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional. Program studi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah dan nasional akan mendapatkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat.
Hal ini dapat dilihat dari program pengabdian masyarakat, kerjasama dengan pemerintah daerah dan penelitian yang relevan dengan permasalahan pembangunan.
- 5) **Akreditasi dan Reputasi**
Akreditasi dan reputasi merupakan indikator penting dari kualitas program studi. Program studi yang terakreditasi unggul dan memiliki reputasi baik akan lebih diminati oleh calon mahasiswa dan pengguna lulusan.

Akreditasi Program Studi

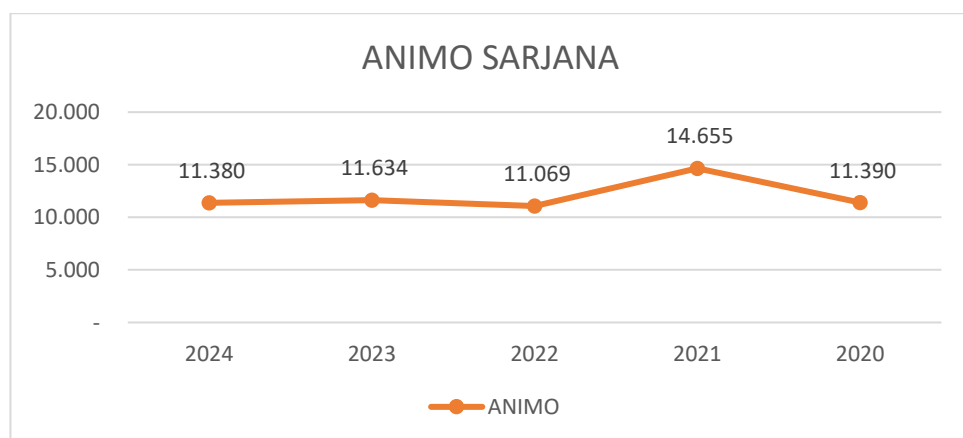
Pada akhir tahun 2024, keseluruhan Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas Hukum telah terakreditasi Unggul. Dari keempat Program Studi terakreditasi Unggul tersebut, terdapat 2 Program Studi yaitu Program Studi Sarjana Hukum dan Program Studi Magister Hukum yang memiliki akreditasi internasional Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA).



Gambar 2. Akreditasi Program Studi Fakultas Hukum

Animo, Prestasi Mahasiswa dan Kualitas Lulusan

Animo mahasiswa pendaftar pada Fakultas Hukum selama periode tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dan penurunan. Namun dengan hal ini menunjukkan tingginya minat dan kepercayaan masyarakat kepada Fakultas Hukum. Jumlah mahasiswa terdaftar Tahun Akademik 2024/2025 secara keseluruhan sebanyak 4.691 orang.



Gambar 3. Animo Pendaftar Sarjana Hukum Tahun 2020-2024

Pembinaan terhadap Kegiatan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum telah berdampak pada pencapaian prestasi mahasiswa yang ditandai dengan diperolehnya beberapa medali baik kompetisi tingkat nasional maupun internasional selama kurun waktu Tahun 2020-2024. Pada kompetisi tingkat internasional mahasiswa Fakultas Hukum berhasil meraih total 76 gold medals, 21 silver medals, dan 13 bronze medals. Sedangkan pada kompetisi tingkat nasional mahasiswa Fakultas Hukum juga menorehkan prestasi dengan meraih total 237 medali emas, 137 medali perak, dan 99 medali perunggu. Di samping itu masih ada beberapa prestasi mahasiswa pada tingkat wilayah.

Tabel 5. Prestasi Mahasiswa Fakultas Hukum Tahun 2020-2024

No	Tahun	Nasional			Internasional		
		I	II	III	I	II	III
1	2020	8	4	4	2	1	
2	2021	26	20	20	8	3	
3	2022	58	38	28	17	3	2
4	2023	50	32	20	21	6	7
5	2024	95	43	27	28	8	4
Jumlah		237	137	99	76	21	13

Jejaring Alumni

Jejaring (network) alumni terbentuk apabila hubungan dengan para alumni yang berada di berbagai bidang (pendidikan, industri, kementerian, sektor, wirausaha) dapat dibina secara intensif dengan pemetaan profesi dan keterkaitan yang tepat. Jejaring alumni ini akan memudahkan pencarian dan peningkatan kerja sama antara Undip dan alumni maupun antaralumni. Dalam rangka pengembangan Jejaring alumni ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh Undip, seperti pendirian Ikatan Alumni Undip (IKA Undip). Saat ini setidaknya sudah terdapat 24 ikatan alumni yang di terdapat Fakultas/Program Studi di Undip.

Jejaring alumni Fakultas Hukum hingga tahun 2024 telah berkembang dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam memperkuat dan memperluas kontribusi mereka terhadap perkembangan fakultas. Sejak didirikan, Fakultas Hukum telah menghasilkan ribuan alumni yang kini tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, lembaga pendidikan, maupun organisasi non-pemerintah. Alumni-alumni ini memiliki peran penting dalam membangun reputasi fakultas dan memberi kontribusi nyata terhadap pengembangan dunia hukum di Indonesia.

Namun, meskipun keberadaan alumni sangat potensial, jejaring alumni Fakultas Hukum Undip dalam kondisi saat ini masih terbilang terbatas dalam hal koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan. Beberapa program yang sudah ada, seperti acara temu alumni dan pembentukan komunitas alumni di beberapa kota besar, telah memberikan ruang bagi para alumni untuk saling bertemu dan

berkolaborasi. Akan tetapi, masih ada kebutuhan untuk memperkuat komunikasi antara fakultas dan alumni, serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pada tahun 2024, alumni Fakultas Hukum telah menunjukkan peningkatan dalam hal kontribusi terhadap fakultas, seperti dalam kegiatan seminar, lokakarya, dan pengembangan program magang untuk mahasiswa. Banyak alumni yang kini aktif berperan sebagai mentor bagi mahasiswa, memberikan wawasan mengenai karir di bidang hukum, dan memfasilitasi kesempatan magang di berbagai lembaga hukum terkemuka. Namun, masih ada peluang untuk meningkatkan keterlibatan alumni di level yang lebih strategis, misalnya dalam memberikan masukan terkait kurikulum atau berkolaborasi dalam penelitian dan publikasi ilmiah.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Fakultas Hukum dalam mengembangkan jejaring alumni adalah kurangnya sistem yang terstruktur untuk memantau dan mengelola data alumni secara menyeluruh. Meskipun terdapat beberapa upaya untuk mengumpulkan data alumni, seperti pembentukan database alumni, namun pengelolaan informasi yang lebih terintegrasi dan sistematis masih perlu diperbaiki. Hal ini akan memungkinkan fakultas untuk lebih mudah menghubungi alumni, mengetahui perkembangan karir mereka, serta memfasilitasi kolaborasi yang lebih luas di masa depan.

Melihat potensi besar dari jejaring alumni, Fakultas Hukum di masa mendatang perlu meningkatkan strategi pengelolaan alumni dengan membangun platform digital yang memungkinkan komunikasi dua arah yang lebih efektif. Selain itu, penting bagi fakultas untuk mengaktifkan kembali peran alumni dalam kegiatan akademik dan sosial, misalnya dengan menyelenggarakan acara temu alumni yang melibatkan topik-topik terkini terkait perkembangan hukum, atau dengan mengajak alumni untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih relevan dengan perkembangan dunia hukum global. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan jejaring alumni Fakultas Hukum Undip akan semakin kuat, berkontribusi lebih banyak, dan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan fakultas menuju masa depan yang lebih progresif.

2. Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtanggaan Sarana dan Prasarana

Luas aset lahan yang dimiliki Undip saat ini mencapai 371,42 Ha, yang tersebar di Kota Semarang (Pleburan, Tembalang, Kalisari, Kagok) seluas 183,33 Ha, Kabupaten Semarang (Penggaron) seluas 99,60 Ha, Jepara (Teluk Awur, LPWP, Mlonggo) seluas 53,31 Ha, Magelang (Gulon dan Bumiharjo) seluas 0,46 Ha, Pekalongan (Kajen dan Kesesi) seluas 10,18 Ha, Batang (Tumbrep dan Blado) seluas 9,50 Ha, dan Rembang (Sulang) seluas 15,02 Ha. Undip memiliki 13

Fakultas/Sekolah, dan 163 program studi yang didukung dengan 659 ruang kelas, laboratorium pendidikan dan penelitian, serta fasilitas pendukung.

Universitas juga memberikan pelayanan fasilitas pendukung yang dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika berupa fasilitas umum, sosial, olahraga, kesehatan, dan transportasi. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain: Gedung Seba Guna (GSG) Muladi Dome, Horison Inn Antawiryra, Masjid Kampus Undip, Perpustakaan, Rusunawa Undip, Fasilitas olahraga (stadion sepak bola dan running track, lapangan futsal indoor, lapangan basket indoor dan outdoor, lapangan tenis, dan stadion bulutangkis), Student Center, Art Center, Koperasi Undip, Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND) dan Klinik Pratama, SPBU, Service English Unit (SEU), Diponegoro Hub (food court), dan ruang terbuka hijau berupa taman dan jogging track. Fasilitas transportasi ramah lingkungan disediakan melalui bus kampus dan sepeda.



Gambar 4. Kampus Undip

Fakultas Hukum Undip saat ini menempati 3 lokasi kampus yaitu di Kampus Tembalang dan Kampus Teluk Awur (Sarjana Hukum) serta Kampus Pleburan (Magister Hukum, Magister Kenotariatan dan Doktor Hukum).

Ketiga kampus Fakultas Hukum Undip saat ini digunakan sebagai pusat dari kegiatan layanan akademik, kegiatan perkantoran, dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung. Untuk menunjang proses belajar mengajar, ruang kuliah tersedia melalui kelas reguler, smart class untuk mendukung kegiatan pembelajaran serta perpustakaan yang dapat diakses oleh mahasiswa. Dalam setiap ruang kelas juga disediakan berbagai media pembelajaran, berupa LCD projector, smart tv interaktif, dan alat bantu lainnya.

Guna menunjang kegiatan pembelajaran mahasiswa, Fakultas Hukum juga menyediakan laboratorium berupa laboratorium komputer dan laboratorium pengadilan semu. Selain itu, sebagai sarana kegiatan keolahragaan atau sekedar

menyalurkan hobi, Fakultas Hukum menyediakan sarana olah raga berupa lapangan basket, tenis meja dan gym. Beberapa sarana lain juga disediakan Fakultas Hukum yang berupa studio podcast, ruang musik, teater terbuka, arboretum, taman burung dan kantin yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan pegawai.

Perencanaan dan Penganggaran

RKAT adalah rencana jangka pendek yang disusun setiap tahun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA untuk menjabarkan Renstra yang berisi rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan Undip yang merupakan dasar pengelolaan keuangan. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) mencakup seluruh pendapatan dan belanja yaitu proyeksi penerimaan dan belanja serta pemanfaatan SILPA pada tahun yang bersangkutan. RKAT disampaikan kepada MWA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran dan disahkan oleh MWA selambat-lambatnya tanggal 31 Desember. Dokumen RKAT yang telah disahkan oleh MWA digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan.

Mekanisme penyusunan Perencanaan Anggaran berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 13 tahun 2023 diawali dengan penentuan target IKU SUKPA dibahas dalam Forenbang (Forum Perencanaan dan Pengembangan); penyusunan ROT; penetapan Pagu SUKPA; penyusunan rancangan RKAT SUKPA; pelaksanaan reviu rancangan RKAT SUKPA; penyampaian dokumen RKAT SUKPA; penyusunan dokumen RKAT Undip; dan penyampaian dokumen RKAT Undip ke MWA untuk dilakukan pengesahan.

Fakultas Hukum sebagai salah satu unit di bawah Universitas Diponegoro yang berstatus PTN-BH diharuskan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sesuai dengan Renstra Undip tahun 2020-2024 dan kontrak kinerja antara Rektor Undip dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Perencanaan anggaran menerapkan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*).

Penyusunan RKAT tahun 2020-2024 telah menggunakan aplikasi berbasis web yang setiap tahun selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan peraturan terkait pengelolaan keuangan. Aplikasi ROT digunakan untuk menyusun rencana program dan kegiatan serta mengintegrasikannya dengan aplikasi RKAT. Pada aplikasi ROT ini, pengisian target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan dilakukan.

Perencanaan target pendapatan disusun sesuai dengan klasifikasi pendapatan dengan cara menghitung volume dikalikan tarif layanan. Untuk pendapatan jasa layanan pendidikan, target pendapatan disusun sesuai dengan data mahasiswa dan kelompok UKT yang telah ditetapkan. Proses merealisasikan target pendapatan perlu dilakukan upaya dan pemantauan secara berkelanjutan.

Aplikasi Sistem Informasi Target Pendapatan (Sitaman) digunakan untuk menghitung target pendapatan agar hasilnya lebih akurat. Target Pendapatan akademik pada aplikasi Sitaman terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Biaya Kuliah (Simbiku) sebagai sumber data nama mahasiswa dan tarif UKTnya.

Pendanaan PTN Badan Hukum dapat bersumber dari APBN dan selain APBN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Pendanaan APBN diberikan dalam bentuk Bantuan Pendanaan PTN-BH (BP PTNBH) dan APBN Gaji. Pengajuan anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS, Undip menyusun Rencana Kerja Anggaran-Kementerian Lembaga (RKA-KL) kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang akan diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk dikaji dan selanjutnya ditetapkan sebagai Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Tabel 6. Tren Anggaran 2020-2024 (dalam jutaan rupiah)

SUMBER DANA	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rupiah Murni	5,403,052,717	5,806,046,815	6,204,043,616	6,698,183,624	6,451,113,620
BOPTN/ BPPTNBH	69,720,180,000	78,442,875,000	89,685,164,985	93,110,300,000	90,689,222,680
Selain APBN	75,123,232,717	84,248,921,815	95,889,208,601	99,808,483,624	97,140,336,300
TOTAL	69,720,180,000	78,442,875,000	89,685,164,985	93,110,300,000	90,689,222,680

Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan PTN Badan Hukum Universitas Diponegoro telah menggunakan aplikasi SiAk (Sistem Akuntansi) yang terintegrasi dengan aplikasi Realisasi Anggaran (RSA) di Bagian Keuangan. Beberapa aplikasi digunakan untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yaitu aplikasi Simbiku untuk penyajian informasi pembayaran biaya pendidikan sebagai sumber pendapatan jasa layanan pendidikan, juga aplikasi Simak BMU dalam mendukung data Aset pada Laporan Keuangan.

Sebagai PTN Badan Hukum berdasarkan PP No 52 Tahun 2015 tentang Statuta PTN Badan Hukum Universitas Diponegoro terutama pasal 30 ayat (3), (4) dan (5), Laporan Tahunan Universitas Diponegoro disampaikan kepada Menteri oleh Pimpinan Undip bersama-sama dengan MWA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (3) disampaikan setiap semester dan setiap tahun kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Berikut disajikan perkembangan anggaran pendapatan dan belanja Undip masa jabatan tahun 2020 sampai dengan

2024 dengan sumber dana APBN (Rupiah Murni dan BP PTNBH) dan selain APBN/PNBP, sebagaimana tabel 7 dan 8.

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020-2024

TH	ANGGARAN		TOTAL ANGGARAN	REALISASI		TOTAL REALISASI	%
	APBN	SELAIN APBN		APBN	SELAIN APBN		
2020	-	69,720,180,000	69,720,180,000	-	78,029,054,571	78,029,054,571	111,92
2021	-	78,442,875,000	78,442,875,000	-	88,931,765,268	88,931,765,268	113,37
2022	-	89,685,164,985	89,685,164,985	-	90,456,775,701	90,456,775,701	100,86
2023	-	93,110,300,000	93,110,300,000	-	90,471,438,496	90,471,438,496	97,17
2024	-	90,689,222,680	90,689,222,680	-	80,717,861,549	80,717,861,549	89,00

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020-2024

TH	ANGGARAN		TOTAL ANGGARAN	REALISASI		TOTAL REALISASI	%
	APBN	SELAIN APBN		APBN	SELAIN APBN		
2020	-	19,338,068,642	19,338,068,642	-	16,387,995,435	16,387,995,435	84,74
2021	-	28,438,325,662	28,438,325,662	-	22,438,325,662	22,438,325,662	78,90
2022	-	34,611,520,847	34,611,520,847	-	30,456,633,952	30,456,633,952	88,00
2023	-	33,601,625,199	33,601,625,199	-	32,171,118,382	32,171,118,382	95,74
2024	-	35,331,135,739	35,331,135,739	-	33,595,366,136	33,595,366,136	95,09

Pertumbuhan Kekayaan (Aset), Liabilitas dan Kekayaan Bersih Undip selama kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 (per 12 Desember 2024) dalam tabel berikut:

Tabel 9. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Aset Bersih Tahun 2020-2024

TAHUN	ASET	LIABILITAS	ASET BERSIH
2020	72.967.606.057	-	72.967.606.057
2021	78.227.035.334	-	78.227.035.334
2022	98.049.967.419	-	98.049.967.419
2023	98.476.723.241	-	98.476.723.241
2024	105.234.153.455	-	105.234.153.455

3. Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi Sumberdaya Manusia – Dosen

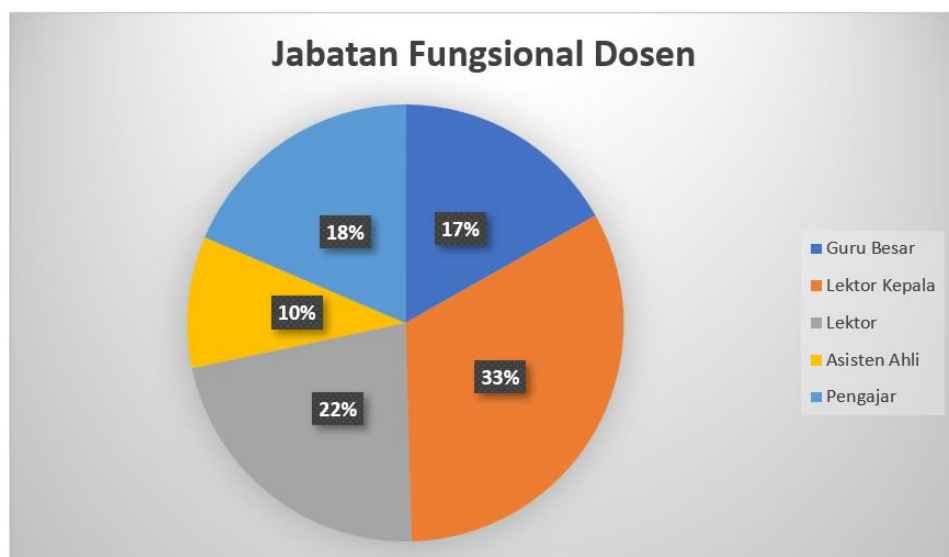
Jumlah Dosen yang tercatat pada Fakultas Hukum adalah sebanyak 113 orang dengan rincian sebagaimana tabel 10. Berdasarkan jabatan fungsional dosen, proporsi dosen dengan jabatan Lektor masih cukup besar (22%). Upaya

peningkatan perlu dilakukan dengan mendorong dosen-dosen muda, untuk melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan S3.

Dosen internasional merupakan salah satu indikator dalam pemeringkatan di QS World. Berdasarkan Laporan Kinerja Fakultas Hukum Tahun 2024 terdapat Dosen Internasional sebanyak 48 dosen. Jumlah ini masih harus ditingkatkan selama 5 tahun ke depan dengan meningkatkan jumlah kerjasama internasional, selain itu perlu dibuat aturan terkait penerimaan dosen internasional di Fakultas Hukum untuk mempermudah akses dosen internasional yang akan mengajar di Fakultas Hukum. Salah satu strategi yang harus dilakukan dalam pencapaian target Fakultas Hukum menuju 200 besar Fakultas Hukum kelas dunia yaitu *staff mobility*, yakni adanya kolaborasi dosen asing dengan dosen dalam negeri atau dosen dalam negeri ke luar negeri, yang output-nya menghasilkan *research innovative*.

Tabel 10. Jumlah Dosen Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	JENIS PEGAWAI	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Tenaga Dosen	Calon Pegawai Undip Non ASN	1
2	Tenaga Dosen	CPNS	18
3	Tenaga Dosen	Kontrak NIDK	1
4	Tenaga Dosen	Kontrak Penuh Waktu	-
5	Tenaga Dosen	Pegawai Undip Non ASN	12
6	Tenaga Dosen	PNS	79
7	Tenaga Dosen	Tenaga Kontrak Penghargaan	2



Gambar 5. Jabatan Fungsional Dosen

Sumberdaya Manusia – Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan mempunyai peran dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Jumlah tenaga kependidikan pada Fakultas Hukum tahun 2024 sebanyak 99 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 11. Jumlah Tenaga Kependidikan

NO	JENIS PEGAWAI	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Tenaga Kependidikan	Calon Pegawai Undip Non ASN	-
2	Tenaga Kependidikan	Kontrak Paruh Waktu	-
3	Tenaga Kependidikan	Kontrak Penuh Waktu	-
4	Tenaga Kependidikan	Pegawai Undip Non ASN	56
5	Tenaga Kependidikan	PNS	41
6	Tenaga Kependidikan	Tenaga Kontrak Penghargaan	2
7	Tenaga Kependidikan	Tenaga Profesional	-

Tenaga kependidikan Undip harus diarahkan menjadi tenaga ahli/fungsional yang memiliki kompetensi pada bidang-bidang tertentu. Salah satu upaya yang dapat ditempuh melalui adanya sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat sejauhmana kompetensi seseorang sesuai bidang tugasnya yang diperoleh melalui uji kompetensi.

Pengembangan SDM didukung sistem informasi berupa aplikasi terkait layanan kepegawaian berupa E-Duk dan Sikasmi. E-Duk sebagai data induk pegawai yang memudahkan dalam mendapatkan data yg realtime dan memantau status pegawai, perubahan data pegawai yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan terkait kepegawaian. Sikasmi sebagai aplikasi yang dapat membantu memudahkan memantau kehadiran pegawai, penjadwalan pegawai yang bekerja shift seperti tenaga keamanan. Selain itu Sikasmi juga dapat digunakan untuk proses Kenaikan Gaji Berkala (KGB) pegawai dan juga pengajuan cuti yang sebelumnya diproses secara manual, dengan Sikasmi dapat lebih efektif dan efisien serta mengurangi pemakaian kertas.

Sistem Informasi dan Komunikasi

Infrastruktur teknologi informasi (TI) menjadi elemen penting dalam mendukung operasional, inovasi, dan daya saing perguruan tinggi di era digital. Keberadaan infrastruktur TI yang memadai dapat mempercepat pencapaian tujuan akademik, penelitian, serta pelayanan publik. Kondisi eksisting infrastruktur TI dilakukan dengan merumuskan kebutuhan pengembangannya. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi terkait perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, sistem keamanan, serta penggunaan sumber daya TI di lingkungan kampus.

Beberapa permasalahan umum sering ditemukan dalam pengelolaan infrastruktur TI di perguruan tinggi, sehingga memerlukan analisis kebutuhan infrastruktur TI. Analisis ini untuk mengidentifikasi celah (gap) antara kondisi eksisting dan kebutuhan masa depan untuk mendukung rencana pengembangan, baik dari segi pembelajaran, penelitian, maupun administrasi.

a. Kebutuhan Perangkat Keras

Hasil inventarisasi perangkat keras, perangkat yang sudah usang atau tidak mampu lagi menangani beban kerja yang semakin besar. Kebutuhan perangkat keras baru: server yang lebih cepat, perangkat penyimpanan data yang lebih besar, serta perangkat jaringan yang lebih handal untuk mendukung akses internet yang stabil dan cepat. Dalam era pembelajaran jarak jauh dan sistem hybrid, kebutuhan perangkat keras seperti kamera video, perangkat konferensi daring, serta perangkat mobile juga meningkat.

b. Kebutuhan Perangkat Lunak

Kebutuhan perangkat lunak berkembang seiring dengan peningkatan kompleksitas dan skala operasional serta administratif. Aplikasi manajemen akademik, keuangan, riset, dan e-learning yang ada memerlukan pembaruan atau integrasi lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, aplikasi berbasis cloud dan AI dipertimbangkan dalam pengembangan perangkat lunak.

c. Jaringan dan Konektivitas

Jumlah pengguna dan perangkat yang terhubung ke jaringan, terutama dengan pertumbuhan perangkat mobile seperti laptop dan smartphone terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas bandwidth yang lebih besar untuk mendukung akses internet yang lebih cepat dan stabil. Peningkatan infrastruktur Wi-Fi di seluruh area kampus juga menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas mahasiswa dan dosen yang semakin bergantung pada akses internet dalam kegiatan akademik dan riset.

d. Kebutuhan Keamanan TI

Peningkatan ancaman siber seperti *malware*, *phishing* dan *hacking* memerlukan peningkatan sistem keamanan TI. Kebutuhan dalam bidang ini mencakup pembaruan sistem keamanan, implementasi kebijakan keamanan data yang lebih ketat, pelatihan bagi civitas akademika tentang keamanan siber, serta peningkatan kapasitas SDM dalam menangani insiden keamanan. Selain itu, dengan semakin banyaknya data pribadi dan akademik yang disimpan secara digital, perlindungan terhadap data juga menjadi prioritas utama.

e. Kebutuhan Pengembangan SDM

Berkembangnya teknologi memerlukan SDM yang memiliki kompetensi tinggi dalam pengelolaan dan pengembangan sistem TI. Kebutuhan akan

pelatihan dan sertifikasi bagi tim TI universitas menjadi sangat penting agar mereka dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi informasi dan mampu menghadapi tantangan yang ada. Kebutuhan ini juga mencakup penambahan jumlah tenaga ahli TI yang berpengalaman dalam bidang tertentu, seperti keamanan siber, pengembangan perangkat lunak, serta manajemen jaringan.

Adapun Sistem Informasi yang menunjang tata kelola yang telah digunakan selama ini adalah Form IPP3, Form Survey Perumahan, Form Vaksin Form Survey Perkuliahan, Form Zoom Event, Form Dana PMI Update, Form Pengembalian UKT (Penyesuaian), Form Vaksin Booster, Form Ticketing Foto KTM, Bantuan Kuota, Form Ticketing (food truck), Siap-konversi MBKM, Siap-PTM Hybrid, Siap-Evaluasi EPBM Siap-Modul Penjadwalan MK Modul, Siap-Pendaftaran Wisuda, Siap-Review Layanan Mahasiswa, Siap-SKPI, SIAP-Kelulusan, SIAP-Interfacing Kulon di SIAP, SIAP-Profil Prodi, SIAP-Update Modul Tugas Akhir, SIAP-Update Modul Nilai, SIAP - UPDATE Modul Ijazah, SIAP-Update Role, Manajemen Pop Up SSO, Middleware SKPSister, Beasiswa KIPK MABA, E-journal EZ Proxy, HTLP Update dan perbaikan salinan Perrek, SIAK Modul, Simbiku-Review Layanan Pendidikan, Sempel Modul-update, Sip3mu Integrasi SSO, Sirenbang-Laporan BPP, SKP-Akun PSDKU, Tracer Study-Model, Validasi IKU, Nominal UKT, Keberatan SPI , Keberatan Non UM, Penetapan UKT, Inventarisasi Aset I Perbaikan modul, Inventarisasi Aset II Modul Baru KIB, Modul SIP3-Update Perhitungan pajak, FaceApp absensi Online update alur masuk, Transitoris, Middleware SIAP Kulon, Modul Tapping eKTP, OMP (Otomasi Management Perpustakaan).

Pencapaian kinerja IKU sistem informasi yang menunjang tata kelola dilakukan berdasar pada SK Rektor nomor 161 tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Informasi/Perangkat Lunak di Lingkungan Undip. Oleh karena itu semua pengembangan sistem di lingkungan Undip harus mengacu pada SK Rektor tersebut.

Perpustakaan

Perpustakaan merupakan unsur penunjang nonakademik di perguruan tinggi, mempunyai tugas memberikan layanan pemenuhan kebutuhan informasi, baik buku cetak maupun e-resources. Perpustakaan juga memiliki beberapa fungsi antara lain, (1) fungsi edukasi yaitu mendukung pencapaian tujuan pembelajaran; (2) fungsi informasi, sebagai pusat informasi perpustakaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi pemakainya; (3) fungsi riset (penelitian) yaitu mendukung pelaksanaan riset yang dilakukan oleh civitas akademika melalui penyediaan informasi dan sumber-sumber informasi untuk keperluan penelitian penggunaannya.

Dalam upaya memenuhi tugasnya, Perpustakaan Fakultas Hukum saat ini memiliki koleksi buku cetak sebanyak 3795 judul, 20542 eksemplar, e-book nasional sebanyak 218 judul, 1945 eksemplar, e-book internasional sebanyak 140 judul dalam database ProQuest dan berlangganan satu database khusus di bidang hukum yaitu Westlaw dan beberapa database jurnal yang dilanggan bersama Undip antara lain Science Direct, ProQuest, Ebsco, Scopus, JSTOR. Pelayanan e-book nasional dilakukan secara online melalui platform Kubuku, dengan pelayanan berbasis android. Untuk pelayanan e-resources lain (e-book internasional dan e-journal), bisa diakses melalui SSO Undip. Selain e-resources yang dapat diakses melalui SSO, perpustakaan Fakultas Hukum juga melanggan Hukum online yang dapat diakses di perpustakaan.

Perpustakaan Fakultas Hukum juga menyediakan layanan AI antara lain Grammarly, Scispace, Deep L, Heinonline dan Scopus AI, yang hanya dilayankan di perpustakaan. Pelayanan perpustakaan sudah terintegrasi dengan UPT Perpustakaan Undip dan perpustakaan fakultas yang ada di Undip, melalui lib.undip.ac.id. Sedangkan untuk perngorganisasian karya ilmiah, perpustakaan menyediakan repository yang dapat diakses metadatanya secara umum di eprints2.undip.ac.id

4. Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik Penelitian

Pengembangan Undip menjadi universitas riset telah dirintis dengan mengembangkan pondasi budaya riset yang kokoh yang mendukung tumbuhnya sikap yang mencirikan budaya universitas riset. Salah satu tahap kebijakan yang digunakan untuk mendorong pengembangan budaya riset adalah melalui peningkatan jumlah publikasi jurnal yang bereputasi internasional, peningkatan jurnal terindeks Scopus dan terakreditasi nasional (SINTA), termasuk meningkatkan sitasi, menambah kapasitas Pusat Unggulan Iptek yang terakreditasi internasional, mengembangkan Science Techno Park, meningkatkan jumlah paten dan hak cipta, dan memperbanyak teknologi terapan.

Untuk mendukung budaya riset, Fakultas Hukum mengalokasikan dana sebesar Rp10.000.000,00 per dosen. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mendorong dosen dalam melaksanakan penelitian yang inovatif dan relevan dengan perkembangan dunia hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dana ini diberikan kepada setiap dosen sebagai dukungan untuk memfasilitasi kegiatan penelitian, baik yang bersifat individual maupun kolaboratif, yang diharapkan dapat menghasilkan publikasi ilmiah yang berkualitas. Dengan adanya dana tersebut, dosen memiliki kesempatan untuk menggali lebih dalam isu-isu hukum yang signifikan, seperti hukum lingkungan,

hukum digital, hak asasi manusia, dan topik-topik lain yang berkontribusi pada pengembangan keilmuan hukum yang lebih aplikatif dan berkelanjutan.

Melalui alokasi dana ini, Fakultas Hukum berharap dapat meningkatkan produktivitas riset, memperkuat kapasitas akademik, dan memfasilitasi dosen untuk berpartisipasi dalam konferensi, seminar, atau publikasi jurnal internasional. Selain itu, program ini juga menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan hasil riset yang dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain dana riset tersebut, dalam rangka mendukung pengembangan riset dan peningkatan kualitas akademik, Fakultas Hukum juga memberikan bantuan dana penelitian untuk program joint research. Sebanyak lima proposal riset terpilih mendapatkan dukungan dana masing-masing sebesar Rp 50.000.000. Program ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara dosen dan lembaga eksternal, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam mengembangkan penelitian yang relevan dengan tantangan hukum terkini.

Bantuan dana ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas riset Fakultas Hukum, khususnya dalam bidang hukum yang berhubungan dengan isu-isu global seperti perubahan iklim, keadilan sosial, hukum digital, dan hak asasi manusia. Dengan adanya dana ini, para peneliti di fakultas dapat melakukan riset yang lebih mendalam dan menghasilkan publikasi ilmiah yang berkontribusi pada perkembangan hukum di Indonesia maupun secara internasional.

Program joint research ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas akademik di dalam fakultas, tetapi juga untuk memperkuat jejaring kolaborasi riset dengan lembaga luar. Hal ini menjadi bagian dari strategi Fakultas Hukum untuk memfasilitasi pengembangan penelitian yang inovatif dan aplikatif, serta meningkatkan reputasi akademik fakultas di tingkat global.

Jurnal Nasional dan Internasional

Jurnal yang terakreditasi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi universitas untuk menjadi *World Class University*. Pemerintah juga telah memberlakukan regulasi bagi para mahasiswa S1, S2, dan S3 untuk melakukan publikasi sebagai syarat kelulusan. Publikasi yang berkualitas dan terindeks sangat mempengaruhi reputasi dan visibilitas perguruan tinggi.

Fakultas Hukum mengelola sejumlah jurnal ilmiah yang berperan penting dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Jurnal-jurnal ini mencakup berbagai topik hukum dan memiliki reputasi yang diakui di tingkat nasional maupun internasional. Berikut adalah daftar jurnal yang dikelola oleh Fakultas Hukum:

1. Law Reform – SINTA 1 & Scopus Q2

Fokus dan Ruang Lingkup: Law Reform adalah jurnal yang berfokus pada kajian tentang reformasi hukum, pembaharuan hukum, dan politik hukum. Jurnal ini mengkaji dampak perubahan hukum terhadap masyarakat dan negara, serta menawarkan solusi melalui kajian ilmiah yang berbasis pada bukti dan analisis mendalam. Law Reform juga membahas isu-isu terkait dengan kebijakan hukum, implementasi hukum, dan evaluasi terhadap sistem hukum yang ada.

Akses: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform>

2. Masalah-Masalah Hukum (MMH) – SINTA 2

Fokus dan Ruang Lingkup: MMH adalah jurnal ilmiah yang membahas berbagai masalah hukum yang berkembang di Indonesia dan internasional. Topik yang dibahas mencakup hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, hukum administrasi negara, hukum Islam, hukum ekonomi, hukum bisnis, hukum lingkungan, hukum adat, dan filsafat hukum. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan menyediakan analisis kritis terhadap kebijakan dan peraturan hukum yang ada.

Akses: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>

3. Diponegoro Law Review – SINTA 2

Fokus dan Ruang Lingkup: DLR adalah jurnal ilmiah yang mengkaji isu-isu kontemporer dalam akses terhadap keadilan, hak asasi manusia, dan digitalisasi, serta berbagai dimensi dalam bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum Islam, hukum ekonomi, hukum medis, hukum adat, dan hukum lingkungan. Jurnal ini menyediakan platform bagi akademisi, peneliti, dan praktisi hukum untuk mempublikasikan hasil riset mereka yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat dan negara.

Akses: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr>

4. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia (JPHI) – SINTA 2

Fokus dan Ruang Lingkup: JPHI adalah jurnal ilmiah yang memfokuskan kajian pada pembangunan hukum di Indonesia. Artikel-artikel yang dipublikasikan membahas berbagai isu terkait dengan reformasi hukum, kebijakan hukum, dan implementasi hukum dalam pembangunan nasional. Jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Indonesia dalam rangka membangun keilmuan di bidang hukum baik teori maupun praktik.

Akses: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi>

5. Notarius – SINTA 4

Fokus dan Ruang Lingkup: Notarius adalah jurnal ilmiah yang mengkhususkan diri pada kajian hukum notariat. Jurnal ini membahas regulasi

terkait profesi notaris, akta notaris, serta hukum yang mendasari profesi ini di Indonesia. Topik yang dibahas mencakup tanggung jawab notaris, etika profesi notaris, peran notaris dalam transaksi hukum, dan perkembangan hukum notariat.

Akses: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius>

6. Law, Development & Justice Review (LDJR) – SINTA 4

Fokus dan Ruang Lingkup: LDJR adalah jurnal ilmiah yang berfokus pada kajian hukum yang berkaitan dengan pembangunan hukum dan keadilan sosial. Jurnal ini memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas hukum di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Topik yang dibahas mencakup reformasi hukum, akses terhadap keadilan, hak asasi manusia, dan pembangunan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan.

Akses: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj>

7. Crepido – SINTA 4

Fokus dan Ruang Lingkup: Crepido adalah jurnal ilmiah yang berfokus pada pemikiran filsafat hukum dan dasar ilmu hukum. Jurnal ini mengkaji berbagai teori hukum, pemikiran kritis mengenai hukum, serta konsep-konsep dasar dalam perkembangan sistem hukum. Fokusnya adalah pada kajian epistemologi hukum, ontologi hukum, serta etika hukum, yang menjadi dasar bagi pemahaman dan aplikasi norma-norma hukum.

Akses: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/index>

8. Jurnal Hukum Progresif (JHP) – SINTA 4

Fokus dan Ruang Lingkup: JHP adalah jurnal ilmiah yang mengusung paradigma hukum progresif yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. Jurnal ini berfokus pada kajian-kajian hukum yang tidak hanya melihat hukum dari perspektif normatif-positivistik, tetapi juga dari sisi keadilan substantif, kesejahteraan sosial, dan konteks kemanusiaan. Topik yang dibahas mencakup berbagai bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum bisnis, hukum internasional, hukum Islam, dan filsafat hukum.

Akses: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/index

Tabel 12. Jurnal Ilmiah Terakreditasi DIKTI

TAHUN	JUMLAH					
	Sinta 1	Sinta 2	Sinta 3	Sinta 4	Sinta 5	Sinta 6
2020		4		2	1	
2021		4		3	1	
2022		4		3	1	
2023		4		4		
2024	1	3		4		

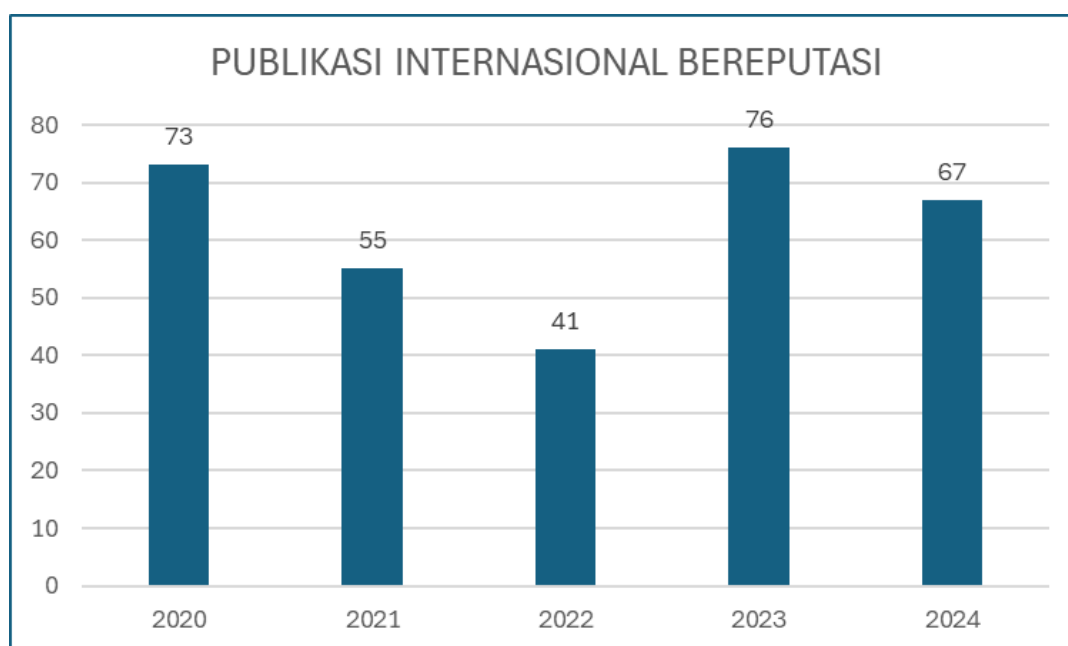
Tabel 13. Data Jurnal yang Dikelola FH

NO	NAMA JURNAL	ISSN	LINK JURNAL	LINK SINTA	KETERANGAN
1	Law Reform	p-ISSN:1858-4810, e-ISSN:2580-8508	https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform	https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101146387&tip=sid&clean=0	Sinta 1
2	Masalah-Masalah Hukum	p-ISSN:2086-2695, e-ISSN:2527-4716	https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/index	https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/detail?id=956	Sinta 2
3	Diponegoro Law Review	e-ISSN : 2527-4031	https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr	https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/detail?id=3837	Sinta 2
4	Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia	eISSN : 26563193 pISSN : 26566737	https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/index	https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/detail?id=6902	Sinta 2
5	Notarius	E-ISSN : 2686-2425, ISSN:2086-1702	https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius	https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/detail?id=8118	Sinta 4
6	Law, Development and Justice Review	eISSN : 26551942 pISSN : 26551942	https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj	https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/detail?id=8565	sinta 4
7	Jurnal Crepido	E-ISSN : 27152863	https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido	https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/8913	Sinta 4
8	Jurnal Hukum Progresif	ISSN (Print): 1858-02	https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/index	https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/12574	Sinta 4

Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi

Sebagai salah satu indikator dalam pencapaian sebagai *World Class University*, publikasi internasional menjadi salah satu poin penting untuk terus dipacu untuk ditingkatkan. Jumlah publikasi baik dalam jurnal, prosiding, book chapter, maupun publikasi lain yang terindeks Scopus terjadi fluktuasi disetiap tahun. Fluktuasi yang terjadi antara tahun 2020-2024 utamanya disebabkan karena indeksasi dari prosiding sering terlambat muncul, sehingga seminar yang dijalankan ditahun berjalan sering baru muncul di tahun berikutnya.

Adapun Jumlah Publikasi Internasional Bereputasi, Jumlah Publikasi pada Prosiding Terindeks Scopus dan Jumlah Publikasi Jurnal Terindeks Scopus seperti terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 6. Publikasi Artikel Internasional Bereputasi

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdiri dari Paten, Hak Cipta, Produk Inovasi dan Teknologi Terapan merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh Undip, dan harus didukung, difasilitasi, dan dipermudah karena telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Teknologi guna mendorong aktivitas yang kreatif, inovatif dalam menghasilkan hal-hal baru dan bermanfaat. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat berupa paten, hak cipta, buku, desain, maupun formula. Fakultas Hukum secara aktif mengembangkan dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen pada inovasi dan riset, Fakultas Hukum telah menghasilkan berbagai karya ilmiah dan teknologi yang dilindungi melalui sistem HKI sejumlah : 50.

Selama periode 2020–2024, Fakultas Hukum juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendukung pemahaman dan penerapan HKI, seperti seminar, workshop, dan pelatihan mengenai pentingnya perlindungan HKI bagi dosen, mahasiswa, dan peneliti. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi hasil karya intelektual melalui pendaftaran HKI.

Melalui upaya-upaya tersebut, Fakultas Hukum berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan HKI sebagai bagian integral dari proses akademik dan riset, serta sebagai kontribusi terhadap kemajuan ilmu hukum dan teknologi di Indonesia.

Inovasi dan Hilirisasi

Inovasi dan hilirisasi Undip dilaksanakan oleh Direktorat Inovasi dan Kerjasama Industri manajemen dan strategi inovasi yang diilustrasikan pada Gambar 4.3. Universitas Diponegoro mempunyai sumberdaya Peneliti / Inventor dengan berbagai bidang keilmuan, dilengkapi sarana laboratorium dan Pusat Unggulan Ipteks yang telah melahirkan banyak invensi teknologi. Kajian riset dasar hingga riset terapan dan pengembangan dilakukan dibawah koordinasi LPPM. Direktorat Inovasi dan Kerjasama Industri melakukan pelayanan dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham). Kekayaan intelektual yang didaftarkan berupa Paten (Paten dan Paten Sederhana), Hak Cipta, Desain Industri dan Merek. Kerjasama antara UNDIP dengan DJKI tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 183/UN7.A/KS/2023 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Kinerja Inovasi dan Kerjasama Industri ditunjukkan dengan jumlah pendaftaran Paten mengalami kenaikan sebesar 44,4% pada tahun 2023, demikian

pula peningkatan terjadi pada jumlah Hak Cipta yang naik 118,9% pada tahun 2023. Hasil riset yang memiliki potensi hilirisasi-komersialisasi dan telah memiliki mitra industri juga didorong untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya dalam bentuk merek dan desain industri. Pada tahun 2022, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI memberikan penghargaan kepada Universitas Diponegoro yang kembali meraih peringkat 10 besar Perguruan Tinggi Pemohon Paten Tertinggi di Indonesia. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi memberikan Penghargaan “Silver Winner” untuk Universitas Diponegoro dalam Kategori PTN-BH dengan Kerjasama Industri Terbaik pada Anugerah Diktiristek tahun 2022.

Fakultas Hukum telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam bidang inovasi dan hilirisasi antara tahun 2020 hingga 2024. Melalui berbagai program dan kegiatan, Fakultas Hukum tidak hanya menghasilkan karya ilmiah, tetapi juga berupaya untuk memastikan bahwa hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat dan industri.

1. Inovasi dalam Kurikulum dan Pendidikan

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Fakultas Hukum telah memperbarui kurikulum Program Magister Hukum (S2) pada tahun 2024. Kurikulum baru ini mencakup mata kuliah seperti "Audit Hak Kekayaan Intelektual Perusahaan", yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai pentingnya pengelolaan dan perlindungan HKI dalam konteks bisnis dan perusahaan. Melalui mata kuliah ini, diharapkan lulusan Fakultas Hukum memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menghadapi tantangan hukum terkait HKI di dunia usaha.

2. Kegiatan Seminar dan Webinar

Fakultas Hukum juga aktif menyelenggarakan berbagai seminar dan webinar untuk meningkatkan pemahaman mengenai inovasi dan hilirisasi. Pada tahun 2024, Fakultas Hukum menyelenggarakan webinar nasional bertajuk “Fenomena Penggunaan Artificial Intelligence Sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Penjaminan pada Kontrak Bisnis di Indonesia”. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 300 peserta dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum, akademisi, dan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Webinar ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji aspek hukum terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan (AI) sebagai objek HKI dalam konteks kontrak bisnis di Indonesia. Para narasumber yang hadir memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh perkembangan teknologi AI dalam ranah hukum dan HKI.

3. Penghargaan untuk Mahasiswa Berprestasi

Sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi mahasiswa, Fakultas Hukum memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi periode I tahun

2024. Acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap para mahasiswa yang telah mengharumkan nama fakultas dan universitas melalui berbagai kompetisi, baik di tingkat internasional, nasional, maupun wilayah. Dengan total 143 prestasi yang diraih, mahasiswa Fakultas Hukum menunjukkan kemampuan dan dedikasi mereka dalam berbagai aspek.

4. Kolaborasi dengan Industri dan Pemerintah

Fakultas Hukum juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk industri dan pemerintah, untuk mendukung hilirisasi hasil riset. Melalui kolaborasi ini, diharapkan hasil riset yang dihasilkan oleh FH Undip dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat dan industri. Kerjasama ini juga mencakup penyelenggaraan kegiatan bersama, seperti seminar dan workshop, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan inovasi dalam bidang hukum.

Melalui berbagai upaya tersebut, Fakultas Hukum berkomitmen untuk terus meningkatkan inovasi dan hilirisasi dalam bidang hukum, serta memastikan bahwa hasil riset dan inovasi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan industri.

Pengabdian Kepada Masyarakat

LPPM Undip mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana berasal dari Pemerintah (Kemenristekdikti) dan internal Undip. Tahun 2019 jumlah dana pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Undip sebesar Rp 20,9 M.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen Fakultas Hukum didukung oleh pendanaan untuk masing-masing dosen sebesar Rp2.000.000,00 per dosen yang dikelola oleh masing-masing fakultas dan sekolah. Selain itu disediakan pula dana pengabdian kepada masyarakat kompetitif yang dikelola oleh LPPM yang berasal dari dana selain APBN melalui skema UFST2D dan IDBU.

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam tridharma perguruan tinggi yang juga diimplementasikan secara konsisten oleh Fakultas Hukum. Selama periode 2020-2024, FH Undip telah aktif melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan hukum di masyarakat. Program pengabdian ini tidak hanya terbatas pada penyuluhan hukum, tetapi juga melibatkan kegiatan-kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh berbagai kelompok masyarakat.

Salah satu bentuk pengabdian yang dilakukan adalah sosialisasi dan pelatihan hukum kepada masyarakat di berbagai daerah. Fakultas Hukum menyelenggarakan berbagai program yang melibatkan mahasiswa dan dosen untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka, seperti hak

atas tanah, perlindungan konsumen, serta hak-hak dasar lainnya. Kegiatan ini juga mencakup pemberian pemahaman tentang peraturan perundang-undangan terbaru yang dapat berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat.

Selain itu, Fakultas Hukum juga berperan aktif dalam membantu penyelesaian masalah hukum masyarakat melalui pendampingan hukum gratis. Dalam program ini, mahasiswa Fakultas Hukum, dibimbing oleh dosen, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang tidak memiliki akses ke jasa hukum profesional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu.

Program pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus penting dalam pengabdian Fakultas Hukum. Salah satunya adalah dengan mengadakan pelatihan tentang manajemen organisasi hukum untuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang hak asasi manusia, perlindungan perempuan, dan pemberdayaan anak. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi-organisasi tersebut dalam mengelola program-program yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fakultas Hukum juga aktif dalam memberikan sosialisasi tentang regulasi dan kebijakan publik kepada para pemangku kepentingan lokal, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat desa. Dalam hal ini, Fakultas Hukum bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, Fakultas Hukum tidak hanya berfokus pada pendidikan formal di kampus, tetapi juga menunjukkan komitmennya dalam memberikan solusi hukum yang aplikatif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagian dari upaya Fakultas Hukum untuk menjawab tantangan sosial dengan menerapkan pengetahuan hukum secara nyata dan relevan dalam kehidupan masyarakat.

Kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan Fakultas Hukum. Sepanjang periode 2020-2024, Fakultas Hukum telah menjalin berbagai kerjasama dengan berbagai institusi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta memperluas jaringan dan dampak positif dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh fakultas. Jumlah mitra kerjasama yang aktif di tahun 2024 adalah sebanyak 65 kerjasama.

Di tingkat nasional, Fakultas Hukum telah menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan universitas lainnya dalam rangka pengembangan kurikulum, penelitian bersama, serta

penyelenggaraan seminar dan lokakarya. Kerjasama ini sangat penting untuk meningkatkan relevansi pendidikan hukum di Indonesia dan memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan di Fakultas Hukum selalu sejalan dengan perkembangan hukum yang ada di masyarakat. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi untuk profesi hukum, seperti notaris dan advokat.

Selain itu, Fakultas Hukum juga aktif menjalin kerjasama dengan sektor swasta. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas peluang bagi mahasiswa dalam mendapatkan pengalaman praktis melalui program magang di perusahaan-perusahaan terkemuka. Dengan kerjasama ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis tentang hukum, tetapi juga memperkaya pengalaman mereka dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang nyata.

Di tingkat internasional, Fakultas Hukum telah menjalin kerjasama dengan berbagai universitas dan lembaga pendidikan global, yang memungkinkan terjadinya pertukaran akademik, kolaborasi penelitian internasional, dan seminar bersama. Kerjasama ini juga memberikan peluang bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar negeri, serta memperluas wawasan mereka dalam memahami sistem hukum internasional. Salah satu bentuk kerjasama internasional yang dilakukan adalah dengan universitas-universitas di Eropa, Asia, dan Australia, yang sering mengundang dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum untuk berpartisipasi dalam program-program akademik dan riset bersama.

Kerjasama dengan organisasi internasional juga telah dilakukan dalam rangka memperkuat pemahaman Fakultas Hukum mengenai hukum internasional, perdagangan internasional, dan peraturan global yang semakin relevan dengan perkembangan globalisasi. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi fakultas dan mahasiswa untuk berdiskusi dengan pakar-pakar internasional dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika hukum global.

Secara keseluruhan, kerjasama yang dijalin oleh Fakultas Hukum tidak hanya memperkaya pengalaman akademik, tetapi juga meningkatkan kontribusi fakultas dalam memajukan sistem hukum di Indonesia dan dunia internasional. Kerjasama ini menjadi salah satu kunci keberhasilan Fakultas Hukum dalam mencapai tujuannya untuk menjadi pusat pengembangan ilmu hukum yang inovatif, berdaya saing, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Tabel 14. Kerjasama Fakultas Hukum

	2020	2021	2022	2023	2024
Pemerintah	2	7	14	12	14
PTN	5	8	13	14	16
PTS	10	11	14	16	17
Perusahaan / DUDI	5	5	7	9	13
PT / Lembaga Internasional	-	1	2	5	5

5. Posisi Pemeringkatan

Universitas berskala dunia (WCU) adalah universitas yang unggul dalam mengelola pendidikan, pembelajaran, dan penelitian yang dicirikan dari manajemen pengelolaan sumber daya manusia, infrastruktur, prestasi, reputasi dan karya-karya individu dosen yang diakui dunia. World Class University identik dengan universitas riset, dimana lebih mengutamakan prestasi dan reputasi (pengakuan). Undip sebagai universitas riset sekaligus berupaya mencapai prestasi menuju 500 besar universitas kelas dunia (World Class University) pada tahun 2026, yaitu pada peringkat 551-600 QS WUR (Quacquarelli Symonds - World University Rankings). Oleh karena itu telah ditetapkan arah kebijakan dan pengembangan Undip menuju World Class University pada Rencana Strategis tahun 2025-2029.

Fakultas Hukum telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam pemeringkatan global bidang hukum selama periode 2020 hingga 2024. Melalui upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan kolaborasi internasional, Fakultas Hukum berhasil memperkuat posisinya di kancah akademik global.

Fakultas Hukum telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam pemeringkatan global bidang Law & Legal Studies selama periode 2022 hingga 2024. Berdasarkan data dari QS World University Rankings by Subject, FH Undip tercatat dengan peringkat sebagai berikut:

2022: Peringkat 301–340 secara global.

2023: Data tidak ditemukan.

2024: Peringkat 351–370 secara global.

Peningkatan peringkat pada tahun 2022 dan penurunan pada tahun 2024 mencerminkan dinamika dalam kualitas pendidikan, penelitian, dan reputasi internasional Fakultas Hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat ini antara lain jumlah publikasi ilmiah, sitasi, kolaborasi internasional, dan reputasi akademik.

Dengan pencapaian ini, Fakultas Hukum terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas akademik dan memperkuat posisinya di kancah internasional. Upaya berkelanjutan dalam penelitian, pengajaran, dan kolaborasi

internasional diharapkan dapat membawa fakultas ini ke peringkat yang lebih tinggi di masa depan.

Tabel 15. Pemingkatan Fakultas Hukum

QS WUR BY SUBJECT	2020	2021	2022	2023	2024
LAW & LEGAL STUDIES			301-340	351-370	351-370

Upaya luar biasa perlu dilakukan secara sistematis, konsisten dan kontinyu dalam rangka mempertahankan posisi dan menaikkan peringkat ke posisi yang lebih tinggi.

SWOT ANALYSIS

Berdasarkan analisis lingkungan strategis terhadap kondisi lingkungan eksternal dan internal, dapat dirumuskan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi Fakultas Hukum sebagai berikut:

STRENGTH	
✓	Memiliki 4 program studi yang semuanya terakreditasi Unggul BAN PT dan 2 program studi terakreditasi internasional FIBAA
✓	Berada pada peringkat 352 pada QS WUR by Subject tahun 2024
✓	Jumlah sitasi dari publikasi internasional bereputasi selama 5 tahun
✓	Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi
✓	Seluruh dosen berijazah S2 dan 44,6% berijazah Doktor
✓	Terdapat 16,07% dosen memiliki jabatan akademik guru serta seluruh dosen bersertifikasi
✓	Sumber pendanaan yang mencukupi
✓	Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

WEAKNESS	
-	Tingkat ketergantungan pada dana yang berasal dari dana dari mahasiswa masih tinggi
-	Rendahnya hilirisasi dan inovasi hasil-hasil penelitian yang dimanfaatkan industri
-	Kurangnya jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi
-	Pangkalan data masih lemah
-	Jumlah dosen S3 masih kurang dari 50% dari total dosen
-	Jumlah dosen dan mahasiswa internasional masih rendah
-	Student mobility masih lemah
-	Reputasi akademik dan lulusan secara internasional masih rendah
-	Rasio mahasiswa dan dosen cukup besar

OPPORTUNITIES

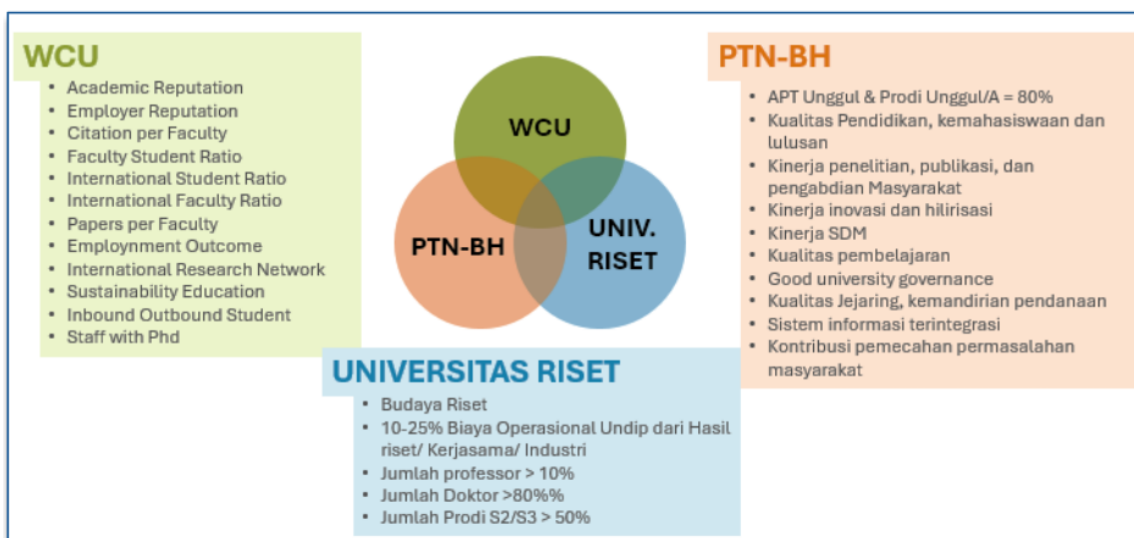
⚙	Kebijakan pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM di Indonesia
⚙	Terbukanya komersialisasi bagi produk riset Perguruan Tinggi secara mandiri maupun bermitra
⚙	Animo masyarakat untuk masuk ke Undip sangat besar
⚙	Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap mengenai pentingnya pendidikan tinggi
⚙	Meningkatnya kebutuhan produk industri digital yang kreatif dan inovatif
⚙	Potensi pengembangan RGA dan Kerjasama
⚙	Potensi kontribusi alumni bagi institusi
⚙	Terbuka penerapan dan pendayagunaan hasil riset di masyarakat dalam rangka kesejahteraan umum masyarakat
⚙	Kompleksitas permasalahan di masyarakat sebagai dampak perubahan iklim, pandemi, maupun kemajuan teknologi
⚙	Memerlukan solusi dari para ahli dari perguruan tinggi

THREAT

➤	Peraturan PTN-BH yang dinamis
➤	Subsidi atau alokasi dana dari negara semakin terbatas
➤	Menurunnya pendapatan dari mahasiswa akibat perkembangan persaingan investasi dunia pendidikan tinggi yang semakin besar
➤	Liberalisasi Pendidikan tinggi dan masuknya perguruan tinggi asing di Indonesia
➤	Kemajuan negara-negara tetangga berbahasa Inggris di ASEAN khususnya dapat menarik minat mahasiswa kita untuk belajar kesana
➤	Tumbuhnya Program Studi terbuka berbasis daring (online)
➤	Perubahan kebijakan pengelolaan SDM PTN-BH

CRITICAL SUCCESS FACTOR

Pencapaian tahapan Visi Undip Tahun 2020-2024 yakni penguatan Universitas Riset yang unggul dan dalam upaya pencapaian peringkat Undip menjadi 500 besar universitas kelas dunia (*World Class University/WCU*), serta posisi Undip sebagai PTNBH ada beberapa indikator yang menjadi *Critical Success Factor (CSF)*. Analisis *Critical Success Factor (CSF)* dilakukan untuk mengetahui beberapa hal kritis yang menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilan dalam pencapaian peringkat Undip menjadi 500 besar universitas kelas dunia, penguatan sebagai universitas riset dan penguatan PTNBH.



Gambar 7. Critical Success Factor

Tabel 16. Critical Success Factor Renstra Fakultas Hukum Tahun 2025-2029

Critical Success Factor	Target Pencapaian
<i>Academic Reputation</i>	Nilai <i>Academic Reputation</i> dengan skor 30 – 55 selama tahun 2025 – 2029
<i>Employer Reputation</i>	Nilai <i>Employer Reputation</i> dengan skor 49 – 75selama tahun 2025 – 2029
<i>Citations per Faculty</i>	Nilai <i>Citations Per Faculty</i> dengan skor 1.7 – 3 selama tahun 2025 – 2029
<i>Faculty Student Ratio</i>	Nilai <i>Faculty Student Ratio</i> dengan skor 25 – 45 selama tahun 2025 – 2029
<i>International Faculty</i>	Nilai <i>International Faculty</i> dengan skor 34 – 55 selama tahun 2025 – 2029
<i>International Student</i>	Nilai <i>International Faculty</i> dengan skor 3.3 – 4.5 selama tahun 2025 – 2029
<i>Employment Outcomes</i>	Nilai <i>Employment Outcomes</i> dengan skor 17 – 30 selama tahun 2025 – 2029
<i>Sustainability</i>	Nilai <i>Sustainability</i> dengan skor 11 – 22 selama tahun 2025 – 2029
<i>International Research Network</i>	Nilai <i>International Research Network</i> dengan skor 40 – 65 selama tahun 2025-2029
<i>Staff with Ph.D</i>	Rasio antara jumlah dosen bergelar doktor (S3) terhadap jumlah total jumlah dosen di Undip mencapai jumlah doktor > 60 %
<i>Papers per Faculty</i>	Rata-rata jumlah publikasi per dosen antara 2-3 publikasi per dosen (3.257 publikasi) dengan komposisi antara prosiding dan jurnal adalah 40% : 60% sampai dengan tahun 2024
<i>Citations per Paper</i>	Jumlah sitasi per paper sekitar 2:1 pada tahun 2024
<i>Inbound and Outbound Exchange Student</i>	Peran mahasiswa untuk program internasionalisasi dengan PTN di luar negeri dan peran mahasiswa asing untuk program internasionalisasi di Undip semakin meningkat setiap tahun
<i>International Campus</i>	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas kampus yang berstandar internasional, baik melalui kelas internasional maupun ketersediaan fasilitas (sarana) penyelenggaraan proses belajar mengajar (PBM), serta fasilitas pendukung (prasarana) lainnya. Ketersediaan fasilitas PBM (sarana) terstandar yang berfungsi dan up to date sebesar 90%. Pemenuhan fasilitas pendukung (prasarana) yang sesuai standar pada tahun 2024 tercukupi 100%
Akreditasi Program Studi	Akreditasi program studi dengan nilai Unggul > 80%

Tabel 17. Critical Success Factor IKU PTNBH Fakultas Hukum Tahun 2025-2029

Critical Success Factor IKU PTNBH	Target Pencapaian
Lulusan mendapat pekerjaan yang layak	Lulusan S1 dan Program Diploma yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup > 80%
Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus	Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional > 30%
Dosen berkegiatan di luar kampus	Dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir > 20%
Praktisi mengajar di dalam kampus	Dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja > 40%
Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau memperoleh rekognisi internasional	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen > 0,15
Program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia	Prodi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra > 50%
Kelas yang kolaboratif dan partisipatif	Mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan pemecahan kasus (case method) atau project-based learning sebagai sebagian bobot evaluasi > 35%
Program studi berstandar internasional	Prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah > 5%

NILAI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

NILAI-NILAI FAKULTAS

Nilai-nilai Fakultas Hukum Universitas Diponegoro merupakan landasan etis, moral, dan filosofis yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, tata kelola kelembagaan, serta seluruh aktivitas civitas akademika. Nilai-nilai ini disusun selaras dengan nilai dasar Universitas Diponegoro sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Universitas Diponegoro Tahun 2025–2029, serta memperkuat karakter Fakultas sebagai institusi yang progresif, berintegritas, dan berlandaskan Pancasila.

A. Nilai Dasar Universitas Diponegoro

Fakultas Hukum menginternalisasi nilai dasar Undip yang bersumber dari keteladanan Pangeran Diponegoro, yaitu: Jujur, Berani, Peduli, dan Adil. Nilai ini menjadi dasar pembentukan karakter sivitas akademika.

1. Jujur

Menjunjung integritas akademik, keterbukaan, dan komitmen untuk menyampaikan kebenaran berdasarkan norma hukum dan etika akademik.

2. Berani

Berani menyatakan pendapat, bersikap, dan bertindak sesuai kebenaran ilmiah serta nilai kemanusiaan, dengan tetap menghargai norma hukum dan akademik.

3. Peduli

Memiliki kepekaan terhadap permasalahan masyarakat serta berorientasi pada kemaslahatan publik melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

4. Adil

Menjunjung objektivitas, kesetaraan perlakuan, non-diskriminasi, serta penghormatan terhadap martabat manusia dalam seluruh proses akademik dan tata kelola.

B. Empat Pilar Falsafah Hukum Fakultas Hukum

Selain nilai dasar Undip, Fakultas Hukum juga menjunjung empat pilar falsafah hukum, yaitu keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kasih sayang, yang telah menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan hukum sejak Renstra 2020–2024 dan dipertahankan dalam Renstra 2025–2029

Nilai Fakultas Hukum yang menjadi landasan/falsafah dalam penyelenggaraan dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran secara umum mengikuti nilai yang dianut Universitas Diponegoro, yaitu : **Jujur, Berani, Peduli** dan **Adil**. Namun demikian, Fakultas Hukum juga menjunjung empat pilar falsafah hukum yaitu: **KEPASTIAN, KEADILAN, KEMANFAATAN** dan **KASIH SAYANG**, sebagaimana berikut:

1. **Keadilan**

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Keadilan dipahami sebagai:

- a. persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum,
- b. perlakuan yang proporsional, wajar, dan tidak diskriminatif,
- c. penghormatan terhadap martabat manusia,
- d. distribusi hak dan kewajiban yang seimbang, serta
- e. penyelesaian masalah hukum berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keberadaban.

Pemaknaan ini sesuai dengan sila Kedua dan Kelima Pancasila serta perkembangan doktrin keadilan dalam ilmu hukum kontemporer. Dengan demikian, keadilan tidak dimaknai sempit sebagai kesesuaian batin dan tindakan, melainkan sebagai prinsip substantif yang menjadi tujuan hukum dalam masyarakat modern.

2. **Kepastian**

Kepastian merupakan nilai yang menekankan kejelasan, ketegasan, dan konsistensi norma hukum serta kebijakan akademik. Kepastian diwujudkan melalui:

- a. peraturan internal yang tidak multitafsir,
- b. prosedur akademik yang transparan dan dapat diprediksi,
- c. standar pelayanan akademik yang konsisten, dan
- d. tatanan kelembagaan yang tertib dan akuntabel.

Walaupun nilai kepastian perlu menjaga stabilitas, Fakultas tetap memahaminya dalam kerangka hukum progresif, yaitu kepastian yang tidak menghambat inovasi dan pembaruan, tetapi memberi fondasi bagi transformasi keilmuan.

3. **Kemanfaatan**

Kemanfaatan menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan perkembangan peradaban hukum. Nilai ini diwujudkan melalui:

- a. riset yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,
- b. kebijakan hukum yang mendorong kemaslahatan umum,
- c. kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan sosial, dan
- d. peningkatan kesejahteraan publik melalui ilmu hukum.

Dengan demikian, kemanfaatan menjadi jembatan antara teori hukum dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

4. **Kasih Sayang**

Kasih sayang merupakan nilai humanistik yang menempatkan penghormatan atas martabat manusia dan ciptaan Tuhan sebagai inti dari seluruh proses akademik dan penegakan hukum. Nilai ini diwujudkan melalui:

- a. sikap menghargai perbedaan,

- b. interaksi akademik yang humanis dan beretika,
- c. penegakan disiplin yang edukatif,
- d. perlindungan terhadap kelompok rentan, serta
- e. orientasi hukum pada kemanusiaan dan keberadaban.

Kasih sayang menjadi penegas bahwa Fakultas Hukum Undip tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga kepekaan moral dan empati sosial.

C. Kedudukan Nilai dalam Perencanaan Strategis Fakultas

Nilai-nilai Fakultas sebagaimana dirumuskan di atas berfungsi sebagai:

- a. Landasan Etis bagi pengembangan visi dan misi Fakultas;
- b. Pedoman Perilaku bagi civitas akademika dalam menjalankan tugas akademik dan administratif;
- c. Pertimbangan Normatif dalam penyusunan kebijakan, kurikulum, dan tata kelola;
- d. Arah Pengembangan Karakter mahasiswa sebagai calon sarjana hukum yang progresif, bermoral, dan berlandaskan Pancasila.

Dengan demikian, nilai-nilai Fakultas Hukum bukan sekadar deklarasi normatif, tetapi menjadi instrumen strategis untuk mendorong transformasi akademik yang berkelanjutan.

VISI FAKULTAS

Menjadi Fakultas Hukum yang progresif berdasarkan nilai-nilai Pancasila menuju pengembangan keilmuan yang berbasis riset berkelas dunia pada tahun 2025.

Visi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: **“Menjadi Fakultas Hukum Yang Progresif Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila Menuju Pengembangan Keilmuan Yang Berbasis Riset Berkelas Dunia pada Tahun 2025”**.

Visi Fakultas Hukum merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi Universitas Diponegoro yaitu **“Menjadi Universitas Riset yang Unggul”**. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro dan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 7 tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Universitas Diponegoro sebagai Universitas Riset yang Unggul, akan dicapai melalui Tridharma, yakni Pendidikan berbasis Riset; Pengabdian Masyarakat berbasis Riset; dan Penelitian Multidisiplin yang berorientasi pada hilirisasi implementasi hasil Riset.

Pendidikan berbasis riset, harus didukung dengan pengembangan kurikulum melalui evaluasi rutin yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat dan pasar, fasilitas yang bagus dan mencukupi untuk pengembangannya, serta sumberdaya manusia yang kompeten. Pengabdian masyarakat berbasis riset, harus didukung dengan kegiatan penelitian yang mampu menjawab tantangan, kebutuhan dan masalah yang ada di masyarakat, fasilitas yang bagus serta memadai dan sumberdaya

manusia yang kompeten. Sedangkan untuk penelitian multidisiplin yang berorientasi pada hilirisasi implementasi hasil riset, selain pendanaan yang memadai juga harus didukung dengan sumberdaya manusia yang kompeten, fasilitas penelitian yang bagus untuk menjalankan penelitian yang berbasis kebutuhan masyarakat dan pasar.

Pencapaian visi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024 sampai pada Fase V yaitu Penguatan Pengembangan Ilmu Hukum Progresif Berbasis Riset, sehingga pada tahap ini yang harus diprioritaskan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perhatian yang secara serius terhadap penelitian dan publikasi internasional
2. Aktif dalam pengembangan bidang hukum Indonesia
3. Meningkatkan pelayanan program doktor
4. Meningkatkan jumlah professor
5. Melibatkan banyak mahasiswa yang terlibat dalam penelitian/riset
6. Mengalokasikan anggaran yang cukup dan mendorong semua dosen untuk meningkatkan kegiatan penelitian.

MISI FAKULTAS

Misi Fakultas Hukum dijabarkan untuk mempertegas peran strategis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi.

Misi Fakultas Hukum ini juga memiliki keselarasan yang kuat dengan misi Universitas Diponegoro sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan hukum secara kompeten di bidang ilmu hukum untuk menghasilkan sarjana hukum yang kompetitif dan progresif.
2. Menyelenggarakan penelitian bidang hukum yang kompetitif dan progresif, bermanfaat bagi kemanusiaan dan pembangunan nasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang berkelanjutan, dan bermanfaat bagi kemanusiaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama dengan tujuan untuk memperluas jaringan dengan institusi nasional dan internasional.

TUJUAN STRATEGIS FAKULTAS

1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang bertaraf internasional untuk menghasilkan sarjana hukum, para profesional di bidang hukum dan para intelektual di pembaharuan hukum yang berpikir progresif, bermoral dan berlandaskan Pancasila.
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmiah di bidang hukum, bertaraf nasional dan internasional, yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemanusiaan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang berkelanjutan, yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan pembangunan nasional.
4. Menyelenggarakan jalinan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain baik yang bersifat nasional maupun internasional.

5. Menyelenggarakan evaluasi internal di semua bidang secara teratur untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas dan akreditasi, sesuai standar nasional dan internasional.

Tujuan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro selaras dengan tujuan Universitas Diponegoro yaitu:

1. Menghasilkan lulusan berkualitas dunia dan unggul yang komunikatif, profesional, berjiwa leader, entrepreneur, berpikir kritis dan sebagai agen perubahan;
2. Mengembangkan dan menerapkan penelitian inovatif, memberikan solusi permasalahan masyarakat, industri dan negara berbasis karakteristik Undip, dan publikasi bertaraf internasional;
3. Mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa, serta menumbuhkan jiwa dan penerapan kewirausahaan (*entrepreneurship*) berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta didukung Sistem Informasi yang terpadu;
4. Mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, dan meningkatkan kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi serta menjadi teladan bagi Perguruan Tinggi lain

SASARAN STRATEGIS FAKULTAS

Sasaran strategis Universitas Diponegoro selaras dengan sasaran Nasional dan sasaran Kemenristekdikti. Sasaran Nasional utama yang terkait dengan pendidikan yaitu Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat. Sedangkan Sasaran strategis Kemenristekdikti adalah: (1) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi; (2) Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan pendidikan tinggi; (3) Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan pendidikan tinggi; (4) Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan (5) Menguatnya kapasitas inovasi.

Berdasarkan Sasaran strategis di tingkat nasional dan Sasaran Strategis di Kemenristekdikti, maka Sasaran Strategis Universitas Diponegoro adalah:

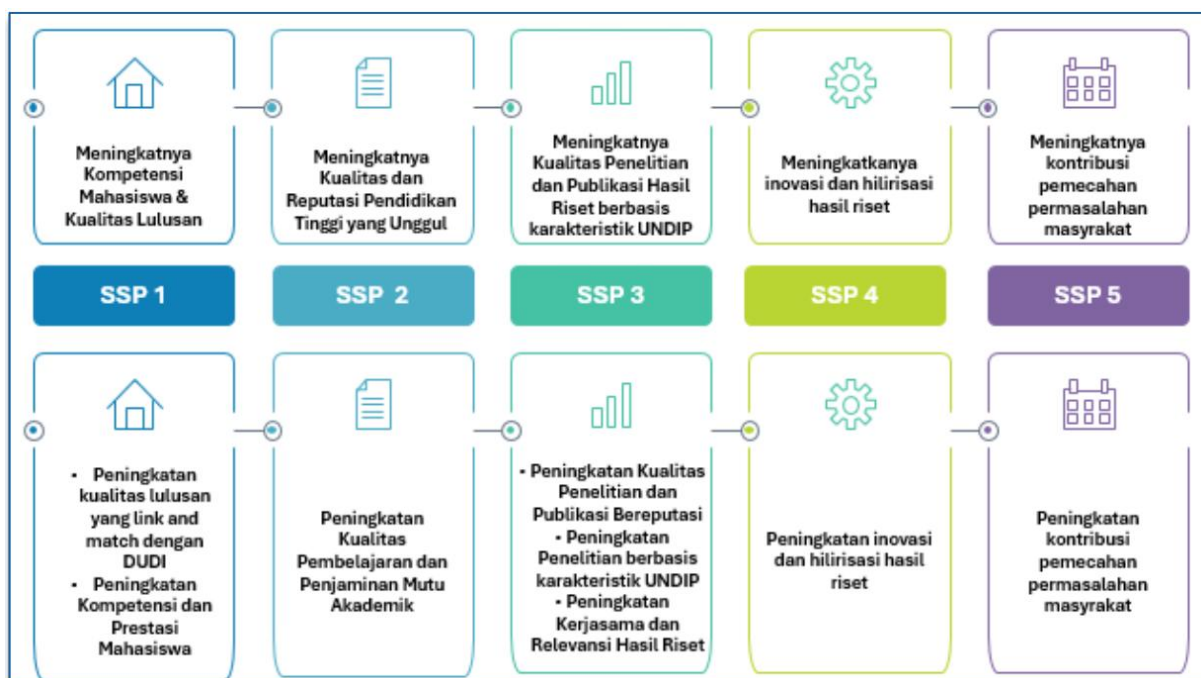
1. Meningkatnya akses pendidikan, penjaminan mutu akademik dan daya saing/kompetensi dosen dan mahasiswa;
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kerjasama akademik;
3. Meningkatnya sumber daya, produktivitas dan mutu penelitian dan publikasi ilmiah;
4. Meningkatnya kerjasama riset dan inovasi, inkubasi, hilirisasi dan komersialisasi hasil riset;
5. Meningkatnya sumber daya, produktivitas dan mutu pengabdian kepada masyarakat;
6. Meningkatnya jumlah unit dan nilai *revenue generating activities* (RGA);
7. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kerja dalam pengembangan institusi dan komunikasi;
8. Meningkatnya kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;

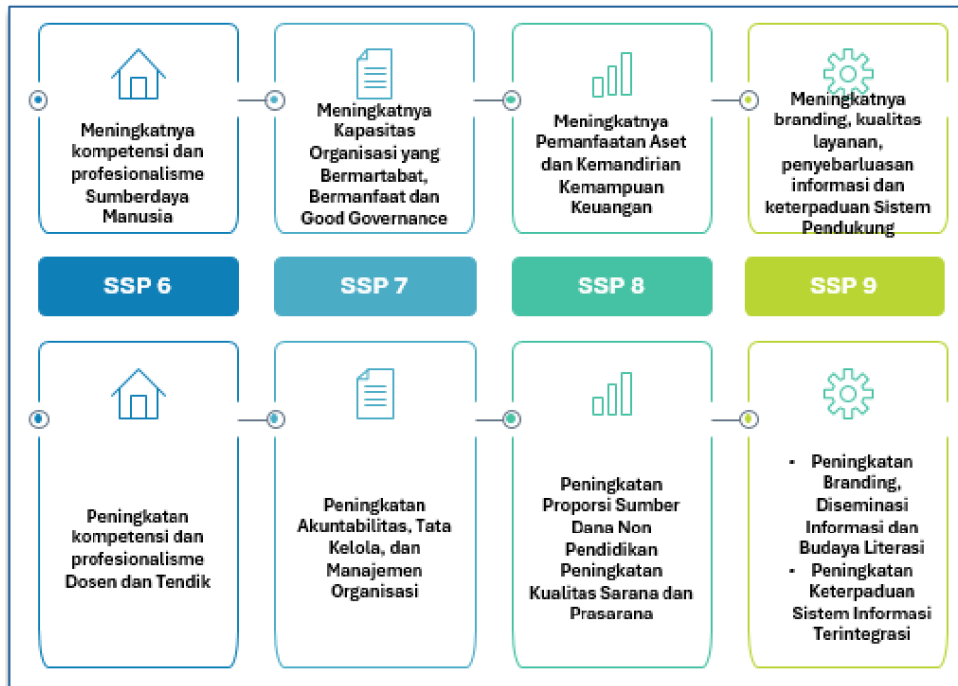
9. Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam tata kelola dan keuangan;
10. Tersedianya fasilitas dan lingkungan kerja yang memadai.

Sejalan dengan sasaran Universitas Diponegoro maka Sasaran Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai berikut:

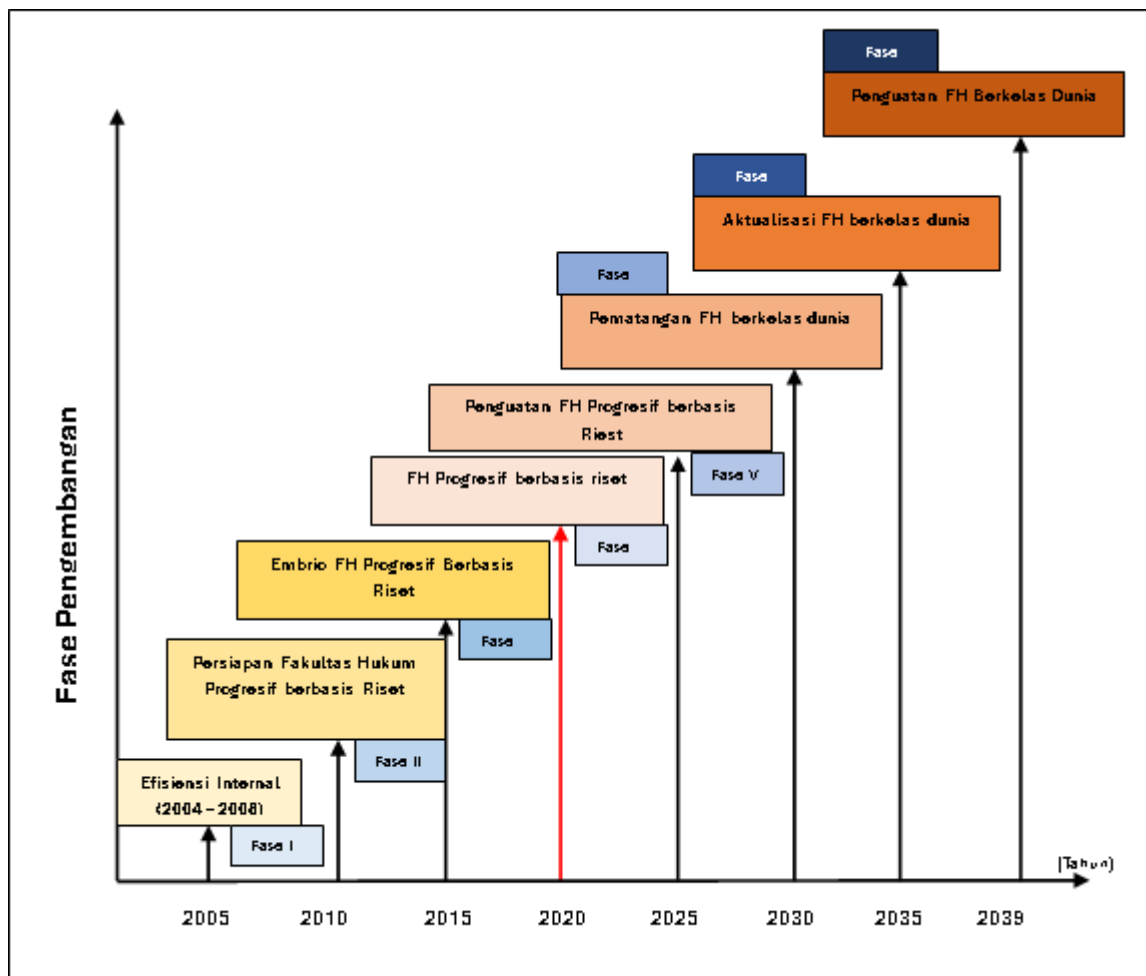
1. Peningkatan penguasaan yang baik atas hukum dan sistem hukum Indonesia dalam suasana akademik yang kondusif.
2. Peningkatan efektifitas dan produktifitas para civitas akademika agar dapat menguasai dan memahami pengetahuan ilmiah untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum.
3. Peningkatan kualitas pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu hukum agar lebih memiliki kepekaan terhadap permasalahan keadilan hukum dan masyarakat menuju manusia beradab.
4. Peningkatan manajemen internal, organisasi, kepemimpinan yang tangguh dan memiliki akuntabilitas dan transparan agar tercapai tujuan Fakultas Hukum Undip dalam rangka menuju Fakultas berkelas dunia.

Sasaran Fakultas Hukum sejalan dengan sasaran Universitas Diponegoro dan selaras pula dengan sasaran pendidikan nasional. Sasaran utama yang terkait dengan pendidikan yaitu Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, dirumuskan sebagai berikut:





Gambar 8. Sasaran Strategis



Gambar 9. Tahapan Pencapaian Visi Fakultas Hukum Undip

Berdasarkan sasaran strategis dan perkembangan peraturan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, capaian *World Class University* (WCU) serta mengacu pada perubahan *tagline* Universitas Diponegoro “Undip Bermanfaat, Undip Bermartabat”, maka 60 IKU yang dijadikan dasar Renstra 2020-2024 disesuaikan menjadi 32 IKU yang terdiri dari klaster WCU, PTNBH dan IKU Karakteristik Undip.

Tabel 18. Distribusi 60 IKU Renstra 2020-2024 menjadi 32 IKU Renstra 2025-2029

NO	IKU 2025-2029	KLASTER	NO IKU	IKU 2020-2024
1	Lulusan memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	PTN	5	Jumlah mahasiswa berwirausaha
			6	Jumlah Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai dari alokasi pengajuan proposal yang diberikan Dikti
			7	Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu
			8	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi
			9	Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan
2	Employment Outcomes (EO)	WCU		
3	Employment Reputation (ER)	WCU		
4	Mahasiswa belajar di luar program studi atau meraih prestasi	PTN	10	Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat nasional
			11	Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat internasional
			35	Jumlah kerjasama dengan PT lain
			13	Jumlah dosen/ peneliti tamu dari DN bergelar doktor
			14	Jumlah dosen/ peneliti tamu dari LN
5	International Student Ratio (ISR)	WCU	12	Jumlah mahasiswa internasional
6	Pembelajaran berbasis <i>case methode</i> atau <i>team-based project</i>	PTN	42	Jumlah sistem informasi yang menunjang tata kelola
			43	Jumlah mata kuliah pembelajaran daring
			44	Jumlah laman prodi yang berbahasa inggris dan update
7	Akreditasi atau sertifikasi internasional Program Studi	PTN	1	Akreditasi Institusi
			2	Jumlah prodi terakreditasi Unggul
			3	Jumlah prodi terakreditasi internasional
			4	Jumlah Prodi yang menawarkan program internasional
8	Academic Reputation (AR)	WCU		
9	<i>Paper per Faculty</i>	WCU	15	Jumlah sitasi dari publikasi internasional bereputasi selama 5 tahun terakhir
			16	Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi

			17	Jumlah publikasi pada prosiding internasional bereputasi
			18	Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi
			19	Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi DIKTI
			20	Jumlah jurnal ilmiah yang terindeks database internasional bereputasi
			21	Jumlah ruang lingkup pada laboratorium yang terakreditasi
			22	Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai oleh pendanaan nasional
			23	Jumlah dana penelitian dari pendanaan nasional
			24	Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan internasional/joint research dengan pendanaan internasional
			25	Jumlah (judul) riset yang dibiayai oleh pendanaan internasional dan atau joint research internasional
			26	Jumlah dana penelitian dari pendanaan internasional/joint research internasional
10	Pengembangan lingkungan wilayah tropis, pantai dan pesisir berkelanjutan	Karakteristik UNDIP	18	Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi
			19	Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi DIKTI
11	<i>Citation per Faculty</i> (CF)	WCU	15	Jumlah sitasi dari publikasi internasional bereputasi selama 5 tahun terakhir
12	<i>International Research Network</i> (IRN)	WCU		
13	Kerjasama program studi	PTN	34	Kontribusi penerimaan keuangan dari kerjasama institusi
			36	Jumlah kerjasama hasil penelitian dan/atau kepakaran dosen dengan industri
			37	Jumlah kerjasama pengabdian masyarakat dan/ atau kepakaran dosen dengan instansi pemerintah/ swasta/PT lain
			38	Jumlah dana penelitian dari hasil kerjasama
14	Luaran dosen diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah	PTN	27	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan dan yang diberikan (granted)
			28	Jumlah Paten
			29	Jumlah prototipe R & D

			30	Jumlah prototipe laik industri
15	Hilirisasi produk inovasi	Karakteristik UNDIP	31	Jumlah PUI (Pusat Unggulan Iptek)
			32	Jumlah produk yang telah diproduksi
16	Kontribusi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan penanggulangan bencana	Karakteristik UNDIP	33	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai dengan pendanaan nasional (di luar Undip)
17	Dosen berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, menjadi praktisi atau pembimbing di luar program studi	PTN	46	Jumlah Lektor Kepala bergelar doktor
18	<i>Faculty Student Ratio (FSR)</i>	WCU	45	Jumlah Profesor
			46	Jumlah Lektor Kepala bergelar doktor
			47	Jumlah dosen berkualifikasi S3 dan Sp2
19	<i>International Faculty Ratio (IFR)</i>	WCU	47	Jumlah dosen berkualifikasi S3 dan Sp2
20	Dosen bersertifikasi kompetensi/profesi dan pengajar praktisi	PTN	48	Persentase capaian kinerja dosen 16 SKS (sesuai komposisi)
			49	Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa
21	Tendik bersertifikasi kompetensi	Karakteristik UNDIP	50	Persentase tendik dengan jabatan fungsional
			51	Persentase tendik bersertifikasi kompetensi
22	Predikat SAKIP satker	PTN	57	Ketepatan Penyampaian Laporan
23	Nilai Kinerja Anggaran	PTN	57	Ketepatan Penyampaian Laporan
24	Kepatuhan, Pengendalian Internal dan Penyelesaian Temuan	Karakteristik UNDIP	55	Opini laporan keuangan
			57	Ketepatan Penyampaian Laporan
25	Manajemen dan Pelayanan Teknis	Karakteristik UNDIP	56	Pelayanan administrasi dan perkantoran
26	Pendapatan non akademik terhadap total pendapatan	Karakteristik UNDIP	39	Kontribusi penerimaan keuangan dari hasil unit usaha (RGU/RGA) terhadap institusi
			41	Jumlah jaringan usaha alumni yang terhubung dengan program kampus
			58	Peningkatan proporsi pendapatan selain APBN dengan dana dari pemerintah
			59	Persentase dana pendapatan non akademik dengan total pendapatan
27	<i>Endowment Fund</i> dan Hasil Investasi	Karakteristik UNDIP	40	Jumlah Endowment Fund
			60	Jumlah investasi
28	Nilai Aset	Karakteristik UNDIP	52	Ketersediaan fasilitas PBM (sarana) terstandar
			53	Ketersediaan fasilitas pendukung (prasarana)
			54	Pengembangan aset
29	<i>Sustainability</i>	WCU		

30	<i>Branding</i> dan diseminasi di media	Karakteristik UNDIP	41	Jumlah jaringan usaha alumni yang terhubung dengan program kampus
			42	Jumlah sistem informasi yang menunjang tata kelola
			44	Jumlah laman prodi yang berbahasa inggris dan update
31	Repositori dan literasi	Karakteristik UNDIP	52	Ketersediaan fasilitas PBM (sarana) terstandar
32	Sistem informasi penunjang tata Kelola	Karakteristik UNDIP	42	Jumlah sistem informasi yang menunjang tata kelola

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro diselaraskan dengan arah kebijakan Universitas Diponegoro, yaitu:

A. Penguatan Universitas Riset

Fakultas Hukum dalam menjalankan fungsi pendidikan yang meliputi aspek kultur, proses, sumberdaya, dan pembiayaannya bertumpu pada kegiatan riset, indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Budaya riset dalam pengembangan hukum progresif
2. Peningkatan bantuan dana riset
3. Peningkatan jumlah profesor
4. Peningkatan jumlah doktor

Penguatan pengembangan hukum progresif berbasis riset ini diukur dengan penguatan dosen sebagai peneliti, alokasi dana penelitian, pendampingan penelitian dan publikasi dosen lektor kepala menuju ke guru besar, digitalisasi perpustakaan, serta mengintensifkan publikasi internasional bereputasi bagi mahasiswa program doktor sebagai syarat kelulusan tertuang dalam peraturan rektor. Mendorong publikasi di jurnal-jurnal terkemuka, baik dalam skala nasional maupun internasional, serta meningkatkan sitasi dari publikasi-publikasi yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa.

B. Penguatan Sebagai PTNBH

Fakultas Hukum pada tahun 2025 – 2029 harus mampu mendukung universitas untuk menduduki peringkat teratas pada klaster 1 pemeringkatan perguruan tinggi, sehingga Universitas Diponegoro meraih peringkat sebagai PTNBH terbaik di Indonesia.

C. Penguatan Karakteristik

Ciri dan kekhasan kearifan lokal yang dimiliki Universitas Diponegoro diantaranya yaitu pengembangan lingkungan wilayah tropis, pantai, pesisir serta pemberdayaan dan pengelolaan sumberdaya laut dan kemaritiman. Oleh karena itu Fakultas Hukum akan meningkatkan penelitian hukum bidang pemberdayaan laut dan kemaritiman.

Fakultas Hukum mempunyai perencanaan dan pelaksanaan disain atau skema program yang terukur, inbond dan outbond mahasiswa, mendorong dan memfasilitasi capaian prestasi. Di bidang penguatan kualitas SDM, fakultas hukum membuat

kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme dosen dengan memberikan fasilitas setiap dosen harus mempunyai sertifikasi profesi ataupun kompetensi, serta senantiasa mendorong para dosen untuk meningkatkan dan mendokumentasi kinerja Tri Dharma pada sistem informasi yang disediakan oleh Dirjen Dikti.

Karakteristik Riset

Riset dan pengembangan pada Fakultas Hukum berdasarkan pada Riset Induk Riset Nasional 2017-2045 dan orientasi dan ciri penelitian Undip yang tertuang dalam PP No 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro pasal 24 ayat 5 Orientasi riset pada “pengembangan lingkungan wilayah tropis, pantai, dan pesisir secara berkelanjutan yang diperluas menjadi pemberdayaan dan pengolahan sumberdaya laut dan kemaritiman”. Penguatan karakteristik ini dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan penelitian di Fakultas Hukum dengan menitikberatkan pada beberapa bidang riset, antara lain: Ketahanan Pangan, Energi Baru Terbarukan, Kesehatan-Obat, Transportasi, Pertahanan dan Keamanan, Kemaritiman, Sosial Humaniora-Pendidikan-Seni dan Budaya.

Fokus penelitian yang akan dilakukan Fakultas Hukum mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Undip, dan disesuaikan dengan kapasitas Fakultas Hukum, maka kebijakan program riset unggulan bertitik berat pada pengembangan wilayah pesisir dan tropis, dengan bidang unggulan “Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya lokal Indonesia untuk peningkatan ketahanan dan keamanan pangan, derajat kesehatan, dan ketersediaan energi dan air secara berkelanjutan”.

Peta jalan penelitian yang akan dilakukan sangat memperhatikan karakteristik riset dari hulu sampai hilir melalui riset dasar sampai dengan percepatan difusi dan pemanfaatan iptek sesuai dengan tingkat kesiapan teknologinya.

Undip Bermartabat Undip Bermanfaat

Pada tahun 2024-2029 Undip meluncurkan Tagline Undip Bermartabat, Undip Bermanfaat. Tagline ini menjadi napas dari segenap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari mulai pengajaran, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Undip Bermartabat berarti segenap kegiatan Tri Dharma harus didasari oleh semangat untuk memajukan ilmu pengetahuan demi masa depan kemanusiaan. Semangat ini, asa untuk menjadikan Undip sebagai universitas kelas dunia sebagaimana dikehendaki oleh kepemimpinan sebelumnya tetap dilanjutkan dan bahkan lebih ditingkatkan lagi. Pada saat yang sama, Undip juga bertekad untuk menebarkan manfaat bagi masyarakat yang paling dekat yang ada di sekitar universitas. Ini yang kemudian disebut Undip “melangit” namun sekaligus “membumi”. Semangat menyiratkan agar jangan sampai asa Undip untuk menjadi universitas kelas dunia, yang salah satu indikator utamanya terletak pada jumlah publikasi, sitasi dan reputasi akademik para sivitas akademiknya di atas kertas membuat kampus ini terlupa untuk ikut hadir pada persoalan keseharian yang terjadi

di sekitarnya. Undip bertekad untuk tidak terjebak dalam ritual “research for research” namun tidak mampu memberikan jawaban, bahkan abai, atas masalah-masalah sosio-ekonomi nyata yang dihadapi bangsa ini.

1. Pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi secara aktif dan strategis, Undip tidak hanya memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan kondisi sosial tetapi juga memperkuat reputasi dan relevansinya sebagai institusi yang peduli dan berdampak positif pada masyarakat. Ini adalah manifestasi nyata dari komitmen Undip untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai agen perubahan sosial dan pembangun masa depan yang lebih baik;
2. Implementasi program penghapusan kemiskinan (ekstrem), ketahanan pangan dan penanggulangan bencana.
 - a. Identifikasi Fokus dan Tujuan: (i) Fokus spesifik dari program: seperti kemiskinan ekstrem di area tertentu yaitu pedesaan atau perkotaan, atau pada kelompok tertentu yaitu anak-anak atau wanita. (ii) Tujuan konkret yang ingin dicapai: peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesehatan, atau penciptaan lapangan kerja.
 - b. Mobilisasi Sumber Daya Penelitian: (i) Menggunakan penelitian yang sudah ada atau inisiasi penelitian baru untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penyebab dan dampak kemiskinan ekstrem. (ii) Pengembangan teknologi atau solusi berbasis penelitian yang dapat diaplikasikan untuk mengatasi masalah spesifik yang dihadapi oleh komunitas miskin
 - c. Kolaborasi dengan Stakeholder: (i) Kemitraan dengan pemerintah lokal, organisasi nonpemerintah, swasta, dan komunitas yang terkena dampak untuk memastikan program tersebut relevan. (ii) Pelibatan para ahli dari berbagai disiplin ilmu di UNDIP untuk memberikan pendekatan yang holistik dan multidisipliner.
 - d. Desain Program Intervensi: (i). Program pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur pendidikan atau kesehatan, atau program inovasi sosial yang mendukung wirausaha. (ii). Intervensi memiliki mekanisme untuk pengukuran dampak dan pengumpulan data yang akan digunakan untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

D. Pencapaian World Class University

Pengembangan dalam menuju World Class University perlu dilakukan secara sistematis, konsisten dan kontinyu dalam rangka mencapai tujuan menuju 300 besar dunia untuk periode 2025-2026 dan menuju 200 pada periode 2029. Berdasarkan Arah Kebijakan Strategis Undip, maka arah kebijakan Fakultas Hukum dalam kurun waktu 5 tahun kedepan (2025-2029) sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing lulusan, memperpendek masa tunggu, dan meningkatkan standar kualitas calon mahasiswa baru;

2. Peningkatan kualitas tridharma dengan melakukan inovasi atau terobosan di semua aspek: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Peningkatan daya saing lulusan dan institusi;
4. Penguatan institusi dengan tata kelola yang prima; dan
5. Pembangunan pusat keunggulan di bidang ilmu (Kelas Internasional/IUP, Peningkatan Standarisasi Laboratorium Peradilan Semu, dan kajian tertentu sebagai perwujudan misi beda (*mission differentiation*)).

Penjabaran Arah Kebijakan Strategis di atas berdasarkan Kebijakan Umum Universitas Diponegoro sesuai Rencana Strategis Universitas Diponegoro 2025- 2029 meliputi: rencana pencapaian score QS WUR untuk memasuki 200 besar dunia diupayakan dengan menaikkan semua indikator di QS WUR. Sesuai dengan target, pada tahun 2025 atau QS WUR by subject law menargetkan untuk berada pada posisi ranking 351-400, 301-350 pada tahun 2026, ranking 251-300 pada tahun 2027, ranking 201-250 pada tahun 2028 dan pada akhir Renstra diharapkan dapat mencapai 200 besar dunia dengan posisi ranking 151-200. Hal ini dapat digambarkan dengan grafik rata-rata ranking dengan skor dari Universitas yang masuk dalam QS.

Critical Success Memasuki 300 dan Menuju 200 Besar Dunia

Kebijakan untuk meningkatkan peran dan kontribusi FH Undip bagi masyarakat dan bangsa serta mewujudkan Undip menjadi *World Class University*. Dalam usaha mencapai WCU, Fakultas Hukum Undip melaksanakan 6 usaha untuk turut mewujudkan Undip menjadi *World Class University* antara lain:

1. Meningkatkan reputasi akademik (*Academic reputation*) pada berbagai bidang yang meliputi : (i) meningkatkan publikasi internasional dan citation per faculty; (ii) pertukaran Dosen tamu dan Peneliti dengan universitas-universitas terkemuka di dunia; (iii) membangun kerjasama dengan industri nasional/internasional, universitas terkemuka dunia, lembaga-lembaga internasional untuk mendapatkan dana penelitian internasional.
2. Meningkatkan *Employer Reputation* melalui usaha : (i) penguatan UCC dengan perusahaan nasional maupun multinasional; (ii) penguatan sistem informasi dan jejaring Alumni baik di dalam negeri maupun di luar negeri; (iii) Meningkatkan kerjasama dengan Asosiasi Profesi
3. Membangun *International Branding* melalui usaha : (i) Meningkatkan jumlah mahasiswa asing; (ii) meningkatkan kerjasama akademik dengan universitas terkemuka dunia untuk program dual degree atau joint degree; (iii) menyelenggarakan atau partisipasi pada kegiatan akademik yang bersifat internasional.
4. Meningkatkan kualitas pembelajaran (*teaching quality*) melalui usaha: (i) peningkatan : buku ajar, monograf, *book chapters*, dan buku teks berbahasa Inggris; (ii) pelatihan dan pendampingan penulisan artikel untuk publikasi internasional.

5. Meningkatkan aksesibilitas melalui usaha menyelenggarakan workshop untuk pengembangan website untuk berbagai tujuan bidang pendidikan maupun penelitian.

Dalam kurun waktu 5 tahun kedepan maka Fakultas Hukum akan meningkatkan beberapa kegiatan yang terkait dengan pencapaian *World Class University* antara lain:

1. Meningkatkan *visiting Professor*
2. Menjalinkan student exchange ke universitas-universitas di luar negeri
3. Menerima mahasiswa asing
4. Mengirim mahasiswa Program Studi S1 Hukum ke universitas asing/luar negeri
5. Meningkatkan publikasi internasional dengan melibatkan peneliti dari luar negeri.

Kegiatan kedepan yang akan dilakukan Fakultas Hukum dalam rangka mencapai *Critical Success* memasuki 300 dan menuju 200 besar dunia tersebut berdasarkan 12 indikator yang mencerminkan reputasi Undip berdasarkan penilaian dari hasil survei dari academic peers maupun alumni/pengguna lulusan Undip di dunia lapangan pekerjaan.

1) *Academic Reputation*

Peningkatan academic reputation akan memberikan kontribusi pada perankingan sebesar 30%, sehingga program-program pendukung indikator ini sangat diperlukan, dan diupayakan oleh seluruh unit yang ada di fakultas. Program-program yang dapat dilakukan adalah ditujukan untuk mendapatkan academic peer baik nasional maupun internasional tiap tahunnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Penyelenggaraan event internasional. Penyelenggaraan event internasional dilakukan oleh Fakultas untuk menjaring nama-nama *academic peer* dari nasional dan internasional. Event yang dapat dilakukan adalah kegiatan selain *summer course* dan *international conference*, misalkan: *lomba scientific paper competition; research idea competition; sport competition*, dll;
- Menjadi narasumber di media nasional/internasional Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan media exposure bagi dosen/peneliti Fakultas Hukum. Dosen/peneliti didorong untuk menjadi narasumber di media online, khususnya untuk media berbahasa Inggris. Hal ini dapat lebih mengenalkan Undip di lingkup internasional.

2) *Employer Reputation*

Employer reputation memberikan 15% pembobotan pada perankingan. Upaya dan program yang dapat dilakukan untuk mendukung peningkatan EO adalah dengan menjalin komunikasi dengan *employer* dari alumni Undip. Hubungan yang baik antara lulusan dengan *employer*-nya dapat dilakukan oleh para alumni, sehingga Undip akan selalu menjaga komunikasi dengan alumninya melalui:

- Kegiatan konsolidasi alumni. Konsolidasi alumni merupakan kegiatan bersama antara Fakultas dengan para alumni. Kegiatan ini akan menghasilkan

beberapa data alumni sesuai. Kegiatan ini dapat dilakukan secara online (webinar) atau dalam rangka temu alumni.

- Kegiatan Alumni Diaspora. Saat ini, data mengenai alumni yang bekerja di level Internasional masih belum banyak, sehingga perlu Upaya Fakultas untuk melakukan pendataan alumninya yang berada di luar negeri dan melakukan kegiatan bersama.

3) *Citations Per Faculty*

Sitasi merupakan ukuran kualitas dari suatu artikel yang telah dipublikasikan oleh dosen Fakultas Hukum. Bobot untuk indikator ini sebesar 20%. Perhitungan sitasi oleh QS dihitung berdasarkan pada 6 tahun sejak Y-6 hingga Y-1. *Citations per faculty* merupakan indikator yang dihitung berdasarkan data jumlah sitasi per dosen dari data di Scopus selama 5 tahun. Peningkatan sitasi dapat ditingkatkan dengan menulis pada jurnal yang memiliki *impact factor* tinggi atau pada quartile Q1/Q2, sedangkan jenis *article review* umumnya memiliki potensi disitasi lebih besar. Sehingga upaya yang diperlukan adalah:

- Peningkatan jumlah artikel di jurnal Q1/Q2.
- Peningkatan jumlah *article reviews*.
- *Postdoctoral*. Program postdoctoral di desain untuk meningkatkan jumlah sitasi sekaligus jumlah paper dari dosen Fakultas Hukum, sekaligus riset kerjasama dengan instansi baik dalam negeri (postdoc nasional) maupun luar negeri (postdoc internasional). Hasil postdoc adalah 3 artikel dengan sitasi minimal 5 dari paper dosen Fakultas Hukum yang terkait.

4) *Faculty Student Ratio*

Faculty student ratio merupakan indikator yang dihitung berdasarkan data rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa. Nilai *Faculty student ratio* yang dimiliki Fakultas Hukum masih tergolong rendah yaitu perbandingan antara jumlah dosen/mahasiswa 1:38. Sehingga peningkatan rasio ini dapat diupayakan dengan peningkatan jumlah dosen Fakultas Hukum dengan gelar S3, internasional serta dosen praktisi industri yang bergelar S3. Saat ini dosen dengan gelar S3 belum mencapai 50% dan ini akan berdampak pada penilaian QS AUR.

Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa sangat penting untuk menjadi perhatian dan arah kebijakan Fakultas Hukum ke depan. Besarnya jumlah mahasiswa jika tidak diiringi dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dapat menjadi penghambat meningkatnya kualitas lulusan dan kondisi ranking fakultas.

Untuk menuju 300 besar dunia diperlukan perbandingan (rasio) yang ideal antara jumlah dosen/mahasiswa sebesar 1:35. Namun berdasarkan analisis kondisi dan kemampuan fakultas saat ini, pada tahun 2029, target Fakultas Hukum memiliki 130 dosen yang dapat berstatus sebagai dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen praktisi, maupun dosen tamu nasional dan internasional.

5) *International Faculty*

International faculty (dosen international) menjadi salah satu indikator penilaian dengan bobot 5%. Semakin tinggi rasio dosen international terhadap total dosen akan memberikan skor yang tinggi. Saat ini, rasio dosen internasional di Fakultas Hukum baru mencapai 5% (dari 113 dosen total).

Untuk menuju 300 besar dunia, kebutuhan dosen internasional di Fakultas Hukum minimal sejumlah 30% dari jumlah total dosen Fakultas Hukum. Sehingga sampai dengan tahun 2029 kebutuhan dosen internasional di Fakultas Hukum Undip ditargetkan akan mencapai 60 dosen/peneliti tamu dari luar negeri yang didapatkan melalui kegiatan *visiting professor*, *adjunct professor*, dan *postdoc* internasional di mana saat ini Fakultas Hukum hanya memiliki 40 dosen/peneliti tamu dari luar negeri. Hal ini perlu peningkatan secara signifikan dengan:

- Program *adjunct professor*. Program *adjunct professor* dapat dianggap sebagai full time dosen Fakultas Hukum setelah di SK kan Rektor untuk jangka periode tertentu. Kegiatan *Postdoc* di samping kegiatan akademik juga kegiatan riset dan publikasi dengan dosen host di Fakultas. Jurnal ditargetkan di jurnal internasional bereputasi Q1/Q2.
- Program *visiting professor*. Program *visiting profesor* didesain untuk meningkatkan dosen pengajar, namun dapat juga untuk ditingkatkan menjadi *joint publications*.
- *Summer course*. Di dalam *summer course*, pengajar tidak hanya berasal dari dosen Fakultas Hukum, namun juga dosen mitra (internasional).
- *Postdoc Internasional*. Peserta *postdoc* internasional dapat diasumsikan sebagai salah satu potensi untuk meningkatkan jumlah dosen internasional.

6) *International Student*

Jumlah mahasiswa internasional merupakan salah satu indikator reputasi suatu universitas dengan bobot 5%. Semakin banyak mahasiswa internasional menunjukkan bahwa reputasi Universitas baik sehingga menarik bagi mahasiswa asing untuk datang dan studi di Undip. Jumlah mahasiswa internasional dapat bersumber dari mahasiswa full time dan part-time. Mahasiswa full time adalah mahasiswa yang tinggal lebih dari 3 bulan dalam rangka pembelajaran by degree, dan part time merupakan mahasiswa yang berkunjung untuk beraktivitas kurang dari 3 bulan (non degree). Untuk peningkatan jumlah mahasiswa dapat dilakukan dengan:

- Meningkatkan jumlah mahasiswa asing degree dengan *international promotion*. Dalam hal ini promosi akan terus dilakukan ke negara-negara yang berpotensi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya mahasiswa S2/S3. Sumber beasiswa yang dapat digunakan adalah beasiswa Undip.
- Peningkatan reputasi IUP. *International Undergraduate Program* (IUP) merupakan program kelas internasional yang diharapkan menjadi tempat bagi mahasiswa asing untuk menempuh pendidikan di Undip. IUP harus

ditingkatkan promosi dan kualitas pembelajarannya sehingga dapat menarik mahasiswa asing.

- Program *summer course*. Program *summer course* diharapkan dapat menjadi strategi dalam mengundang mahasiswa asing *part-time*. Fakultas Hukum diharapkan memiliki 1 *summer course* dan mengundang min 50 mahasiswa asing dari berbagai negara.
- Beasiswa Undip Penyediaan beasiswa Undip (Undip scholarship) akan menjadi salah satu penarik mahasiswa pascasarjana ke Undip.

7) *Staff With PhD*

Staff with PhD merupakan indikator yang dihitung berdasarkan jumlah dosen yang mempunyai gelar doktor (S3) yang melakukan kegiatan akademik di Undip. Sebagai universitas riset, salah satu indikator utama adalah jumlah doktor lebih besar dari 80%. Selain itu jumlah dosen doktor juga merupakan salah satu indikator penting dalam pemeringkatan dunia (QS), serta menjadi indikator input pada pemeringkatan perguruan tinggi. Jumlah dosen S3 yang dimiliki Fakultas Hukum masih tergolong rendah. Berdasarkan analisis data, untuk menuju 300 besar dunia, rasio antara jumlah dosen bergelar doktor (S3) terhadap jumlah total jumlah dosen Fakultas Hukum mencapai 50%, namun saat ini Fakultas Hukum hanya memiliki 40 dosen berpendidikan S3 (45%), sehingga sampai dengan tahun 2029 kebutuhan dosen S3 Fakultas Hukum ditargetkan mencapai 50%.

8) *Papers Per Faculty*

Indikator *paper per faculty* tidak muncul di QS WUR namun digunakan di QS AUR dan THE WUR sehingga tetap menjadi target yang harus dicapai oleh Undip. Saat ini paper Fakultas Hukum di Scopus memiliki rata-rata 60 paper/tahun. Hal ini perlu upaya peningkatan agar produktivitas dosen Fakultas Hukum dalam mempublikasikan paper dapat mencapai 160 artikel/tahun. Sedangkan paper di tahun 2024 Undip masih menghasilkan 62 artikel, di bawah rata-rata tiap tahun.

Upaya untuk meningkatkan skor *paper per publication* adalah:

- Penyelenggaraan *international conference* di fakultas. *International conference* bekerjasama dengan *conference proceeding* terindeks Scopus atau sebagai *special issue* di jurnal menjadi salah satu strategi peningkatan jumlah paper di Fakultas Hukum secara signifikan. Dengan target tiap 1 conference, Fakultas Hukum akan menghasilkan minimal 40 artikel dosen Undip. Strategi ini juga dapat meningkatkan jumlah sitasi dengan mendorong dosen Undip mensitasi artikel dosen Undip lainnya.
- Optimalisasi pendanaan internal Undip. Optimalisasi pendanaan internal baik yang dikelola oleh LPPM ataupun Fakultas dapat menjadi strategi peningkatan jumlah paper. LPPM sebagai unit yang bertanggung jawab untuk penelitian dan publikasi di Undip dapat memberikan panduan bagi fakultas dalam penggunaan dana penelitian fakultas dan memonitor ketercapaian target jumlah artikel tiap tahunnya.

- Peningkatan jumlah paper dari mahasiswa S2/S3. Saat ini jumlah mahasiswa pascasarjana Undip aktif sebanyak 150 mahasiswa. Jika diasumsikan bahwa mahasiswa yang mengambil tugas akhir sebanyak 100 mahasiswa, maka Fakultas Hukum dapat menghasilkan minimal 90 paper dari mahasiswa pascasarjana. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Fakultas.
- Peningkatan paper melalui kerjasama penelitian dan publikasi dapat bersumber dari kerjasama antar dosen maupun antar universitas dalam menghasilkan jumlah publikasi. Kerjasama yang berjalan seperti riset kolaborasi indonesia (RKI), *joint research* dengan mitra internasional, dll.

9) *Citations Per Paper*

Rasio ini mengukur jumlah rata-rata sitasi yang diperoleh per publikasi, dan merupakan perkiraan dampak dan kualitas karya ilmiah yang dihasilkan pada jurnal internasional bereputasi (Scopus). Kondisi saat ini jumlah sitasi per paper di Undip mencapai 2:1 pada tahun 2023. Untuk mencapai target 500 besar dunia di tahun 2027 dan menuju 200 besar di tahun 2029 maka diperlukan jumlah sitasi sebesar 100.000 dari 25.000 artikel atau rasio sebesar 4:1.

10) *Inbound and Outbound Exchange Student*

Inbound Exchange Student merupakan jumlah total mahasiswa yang datang ke Undip pada program internasional selama minimal 1 semester. Sedangkan Outbound Exchange Student merupakan jumlah total mahasiswa Undip yang ke perguruan tinggi di luar negeri ke pada program internasional selama minimal 1 semester. Pada tahun 2029 diharapkan semakin meningkat peran mahasiswa untuk program internasionalisasi dengan PTN di luar negeri, begitu pula sebaliknya semakin meningkat peran mahasiswa asing untuk program internasionalisasi di Undip.

11) *Employment Outcomes*

Employment Outcomes (EO) untuk menunjukkan tingkat pengaruh lulusan dari suatu universitas di masyarakat nasional dan internasional. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendataan alumni berprestasi dan memiliki dampak di masyarakat nasional dan internasional. Hal ini perlu dilakukan expose alumni di website Fakultas atau Universitas dalam bentuk Alumnipedia atau *Success Story*, sehingga QS dapat melakukan *tracking* selama penilaian/survey.

12) *International Research Network*

IRN menjadi indikator pemeringkatan dengan melihat keberlangsungan kerjasama antara Undip dengan Universitas mitra/afiliasi luar negeri. Syarat dapat di hitung dari IRN adalah paper kerjasama dengan mitra/afiliasi yang sama dalam jangka waktu 5 tahun dan menghasilkan minimal 3 artikel, dan disitasi minimal 1 kali dari artikel jurnal terindeks Scopus. Hal ini menjadi tantangan bagi Fakultas Hukum agar selalu menjalin kemitraan dengan Universitas luar dan secara kontinyu menghasilkan artikel.

Upaya yang dapat dilakukan adalah:

- Meningkatkan jumlah artikel dengan skema *International Joint Publication*. *Joint publication* dengan skema multi-year (3 tahun) dengan mitra internasional agar terus ditingkatkan dengan difasilitasi LPPM ataupun dengan pendanaan internal Fakultas.
- Meningkatkan jumlah grup riset Unggulan di Fakultas. Fakultas Hukum harus membuat minimal 1 riset grup sebagai unggulan dari tiap Fakultas/Sekolah dan sebagai terdepan dalam mencari mitra kerjasama penelitian.

Dengan memperhatikan upaya di atas maka perlu dilakukan target dan kegiatan sebagai Indikator Kinerja utama (IKU) WCU Fakultas Hukum.

13) *International Campus*

International Campus merupakan indikator baru dalam pemeringkatan dunia untuk negaranegara Asia. Selama tahun 2025-2029, Fakultas Hukum diharapkan dapat menyediakan fasilitas kampus yang berstandar internasional yang menggunakan konsep kampus hijau dan berkelanjutan, baik melalui kelas internasional maupun ketersediaan fasilitas (sarana) penyelenggaraan proses belajar mengajar (PBM), serta fasilitas pendukung (prasarana) lainnya.

Diharapkan tahun 2029 nanti ketersediaan fasilitas PBM (sarana) terstandar yang berfungsi dan *up to date* sebesar 100%. Sebagai universitas riset dan berkelas dunia, fasilitas pendukung juga sangat diperlukan, dengan perkiraan tahun 2029 akan terpenuhi sesuai standar SNPT, UI GreenMetric dan Fasilitas Difabel (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017) sebesar 100%.

Pengembangan Kampus

Berdasarkan Animo Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum saat ini, Fakultas Hukum telah memiliki Program Studi Sarjana Hukum kelas paralel yang berada di Teluk Awur, Kabupaten Jepara. Ke depan dimungkinkan untuk mengembangkan ke daerah lain sesuai dengan konsep pengembangan yang dimiliki Undip.

Program ini dilaksanakan di samping minat calon mahasiswa yang cukup tinggi tersebut adalah juga peran serta Fakultas Hukum dalam pembangunan pendidikan nasional dengan mendekati program ke daerah-daerah sehingga calon peserta didik lebih dekat untuk melanjutkan studinya, terutama adalah daerah yang jauh dari kampus utama Universitas Diponegoro.

STRATEGI

A. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

1. Peningkatan kompetensi lulusan

Strategi dalam bidang akademik dan kemahasiswaan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan penjaminan mutu, meningkatkan mutu prestasi dan daya saing mahasiswa serta pengembangan pembelajaran dan perluasan serta penguatan kerjasama akademik dijabarkan sebagai berikut:

- Meningkatkan tridharma PT dan penjaminan mutu
- Meningkatkan mutu, prestasi, dan daya saing mahasiswa, lulusan, dan institusi
- Meningkatkan soft skill lulusan dengan orientasi dan kemampuan *job creator*
- Mengembangkan program pembelajaran dan kerjasama akademik
- Mengembangkan program studi baru sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja

2. Penguatan Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu pada Fakultas Hukum meliputi penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement/kaizen*), yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang dikenal selama ini sebagai akreditasi. Penguatan penjaminan mutu dalam rangka mencapai luaran : Akreditasi institusi paling tinggi; Program Studi dengan Akreditasi Unggul dan/atau internasional; $\geq 80\%$ Program Studi dengan lulusan tepat waktu; Mayoritas lulusan dengan IPK *competitive-dignitive*. Program penguatan penjaminan mutu terdiri:

- Penyusunan Regulasi
- Penyusunan dokumen mutu dan SOP terkait
- Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembelajaran
- Monitoring dan evaluasi berkala
- Kajian/*small research* atas persoalan pembelajaran
- Penerapan *reward and punishment system*
- Penggunaan metode pembelajaran handal dan adaptif (*case method, team based project*)
- Peningkatan jumlah Prodi terakreditasi Internasional yang diakui Dikti

3. Peningkatan kualitas Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

Animo penerimaan mahasiswa pada Fakultas Hukum sangat tinggi. Tingginya animo dimungkinkan melakukan seleksi untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas. Program PMB pada Fakultas Hukum mengacu kepada seleksi yang diselenggarakan oleh pihak universitas, terdiri dari:

- Penyusunan manual PMB dan registrasi
- Penyusunan sistem PMB dan registrasi terintegrasi (*short, simple and accountable*)
- Mapping dan analisis mahasiswa baru
- Pelaksanaan promosi yang handal, efektif dan efisien

Fakultas Hukum melakukan *mapping* dan analisis mahasiswa baru untuk program studi tingkat sarjana, magister, maupun doktoral.

Jumlah mahasiswa eksisting mahasiswa tahun 2024 ada 4.584 mahasiswa sudah termasuk jumlah mahasiswa mangkir dan cuti sebanyak 62 mahasiswa dan 1274 mahasiswa yang wisuda serta termasuk mahasiswa di Kampus Pleburan dan Jepara. Diperlukan penegakan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Bab XV

Pasal 42 angka (3) dengan mengurangi jumlah mahasiswa mangkir, yang dilakukan penyaringan secara otomatis menggunakan sistem, sehingga mahasiswa yang sudah mangkir 2 semester berturut-turut atau 4 semester secara tidak beraturan akan otomatis dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa.

4. Pengembangan Kelembagaan Akademik

Penataan dan pengembangan Fakultas Hukum dilakukan untuk menjawab dinamika dan perkembangan IPTEKS, kebutuhan pasar kerja dan pengguna lulusan pendidikan tinggi di era global. Fakultas Hukum juga telah mengembangkan kelas paralel Program Studi Sarjana Hukum di Kampus Jepara untuk memperluas akses pendidikan hukum yang berkualitas. Di samping itu, pengembangan menjadi lembaga pendidikan multidisiplin juga akan diperkuat untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul

5. Penataan dan Pengorganisasian Kemahasiswaan

- Penataan dan Harmonisasi Program antar Bidang Ormawa, BEM dan SENAT Fakultas
- Inovasi Penyusunan Program secara digital
- Sinkronisasi dan Penataan Model Pengkaderan Mahasiswa di tingkat Fakultas
- Penetapan Panduan Penyusunan Program yang berdasarkan Keterkaitan IKU; Peningkatan anggota Ormawa; Kebermanfaatan pada Mahasiswa Fakultas dan Pengabdian Masyarakat
- Pembuatan *timeline* dan Monitoring Mekanisme Pencairan Anggaran Kegiatan Ormawa

6. Prestasi Mahasiswa

Peningkatan Prestasi dilakukan Program Kompetisi Belmawa dan Puspresnas dan Konversi Tugas Akhir Skripsi. Program perlu dilakukan karena Kompetisi Belmawa dan Puspresnas menjadi ajang kegiatan tahunan yang wajib diikuti; Kebutuhan Meningkatkan dan Mempertahankan Peringkat dan Prestasi Fakultas dalam Kompetisi Nasional; Belum ada Penyetaraan dan Pengakuan prestasi yang dapat di konversi dalam SKS; Minimnya mahasiswa berorganisasi dan berkegiatan karena belum ada standarisasi dan konversi terhadap kegiatan mahasiswa dengan Sertifikat Pendamping Ijasah, sehingga diperlukan upaya-upaya:

- Optimalisasi Mahasiswa jalur SBUB
- Merancang kegiatan-kegiatan pendukung Kompetitif Belmawa dan Puspresnas 1 Tahun sebelum Pelaksanaan Kompetisi
- Peningkatan Koordinasi Dosen PIC Ormawa
- Mendorong mahasiswa berprestasi dan mensyaratkan Sertifikat Pendamping Ijasah yang memuat gradasi SKS Penilaian
- Mendorong Prodi dapat mengkonversi prestasi kegiatan dengan SKS Mata Kuliah
- Koordinasi dan Monitoring Penerbitan SK Dosen/PIC Kegiatan Kemahasiswaan

7. Kesejahteraan Mahasiswa

Pengelolaan beasiswa perlu ditingkatkan yang berasal dari pemerintah pusat, daerah, maupun dari swasta agar sesuai dengan sasaran dan peruntukannya. Selain itu, dengan meningkatnya kasus kesehatan mental mahasiswa, pemahaman anti toleransi dan adanya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, maka perlu upaya-upaya yang dilakukan meliputi:

- peningkatan akses dan kualitas layanan Dosen Wali dan Dosen Pembimbing Mahasiswa
- melakukan kerjasama dengan Fakultas Psikologi untuk melakukan bimbingan konseling

8. Kerjasama Alumni

Peningkatan Kerjasama dengan Alumni (IKA FH UNDIP) guna Mendukung Mahkota Alumni COMPLETE. Disamping itu perlu adanya kebutuhan Pembekalan Mahasiswa sebelum lulus untuk Peningkatan dan Penguasaan Praktik Kerja; Kebutuhan Perkembangan Informasi Dunia Kerja dan Jalinan Kerjasama dengan Alumni; Kebutuhan Tempat Magang dan Kerja bagi Mahasiswa untuk memenuhi Magang Mandiri; serta meningkatkan kerjasama dengan alumni. Upaya-upaya yang dilakukan terdiri dari:

- *tracer* alumni secara berkala dan peningkatan validitasnya
- peningkatan kerjasama melalui kegiatan kemahasiswaan di bidang seni dan olah raga dengan alumni
- alumni memberi pembekalan bagi calon wisudawan
- pelaksanaan kerjasama untuk mahasiswa magang mandiri di perusahaan atau instansi milik alumni

B. Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtanggaan

1. Sarana dan Prasarana

- Pembangunan Gedung Perkuliahan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan ruang kelas, laboratorium dan studio.
- Pembangunan Gedung tetap mempertahankan ruang terbuka hijau.
- Perbaikan fasilitas umum (jalan, ruang terbuka hijau, taman, tempat parkir, gasebo, dll).
- Standarisasi sarpras ruang kelas eksisting.
- Optimalisasi aset kampus di paralel di Kampus Jepara untuk menunjang Tri Darma Perguruan Tinggi.
- Melakukan efisiensi dan efektifitas anggaran sarana dan prasarana melalui perencanaan pengembangan yang terintegrasi, terkonsolidasi dan berkelanjutan.
- Memusatkan seluruh kegiatan perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan sampai dengan pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana di tingkat Fakultas.

- Memanfaatkan secara penuh Teknologi Informasi (TI) dalam seluruh kegiatan pengembangan sarana dan prasarana maupun pengadaan barang/ jasa.
 - Merencanakan sarana dan prasarana yang antisipatif terhadap kebutuhan dan perkembangan.
2. Tata Kelola
 - Mempertahankan akuntabilitas dan pelaporan keuangan Fakultas Hukum dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian “WTP”.
 - Tata administrasi yang baik dengan mengembangkan dan menerapkan SOP berbasis IT (eOffice) sehingga *paperless* dan *digital signature* agar kerja lebih efisien.
 - Membangun sistem pengelolaan keuangan dan realisasi anggaran terintegrasi berbasis IT.
 - Anggaran berbasis output sehingga pemeriksaan juga berbasis output dan menuju audit berbasis outcome.
 - Perbaiki tata kelola dokumen keuangan dan barang milik fakultas beserta dokumen dukungannya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas.
 - Percepatan dan perluasan zona integritas wilayah bebas korupsi (ZI-WBK) dan reformasi birokrasi.
 3. Optimalisasi Aset
 - Pemetaan aset di semua lokasi Fakultas untuk digunakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pendapatan selain APBN.
 - Mengembangkan unit-unit usaha di tingkat Fakultas untuk meningkatkan proporsi pendapatan selain UKT dan IPI.
 4. Usaha, Bisnis Komersial dan Analisis Resiko
 - Merencanakan usulan perubahan pengukuran kinerja yang tidak berbasis anggaran.

C. Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi

1. Sumber Daya Manusia
 - Meningkatkan jumlah dosen dan tenaga kependidikan bersertifikasi kompetensi dengan target semua dosen dan tenaga kependidikan dalam waktu 5 tahun.
 - Mendorong studi lanjut S3 bagi dosen dan studi lanjut bagi tenaga kependidikan.
 - Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan
2. Sistem dan Teknologi Informasi

Rencana strategis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam bidang Sistem dan Teknologi Informasi bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, mendukung kebutuhan akademik, kemahasiswaan, keuangan,

administratif, serta kerjasama dan riset. Dengan menggunakan pendekatan Analisis Matriks Kebutuhan Informasi, fakultas akan mengidentifikasi dan menyusun prioritas informasi yang dibutuhkan oleh tiap unit kerja. Sistem yang dirancang akan meminimalkan redundansi data, meningkatkan akurasi, serta memastikan informasi yang disediakan tepat waktu, mendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien, dan memberikan kontribusi pada kualitas dan keberlanjutan informasi di tingkat fakultas.

Pembangunan IT-Governance, Undip akan mengacu pada kerangka kerja COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies). COBIT membantu dalam merumuskan kebijakan, proses, dan kontrol yang diperlukan untuk memastikan bahwa TI sejalan dengan tujuan strategis universitas. Kerangka ini juga memfokuskan pada pemantauan, evaluasi, serta pengendalian risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, yang sangat penting dalam era digital saat ini.

Selanjutnya, kebijakan mengenai keamanan informasi akan menjadi prioritas dalam

pengembangan tata kelola TI, mengingat risiko ancaman siber yang semakin berkembang. Implementasi sistem keamanan yang baik serta pelatihan kepada seluruh sivitas akademika mengenai pentingnya menjaga data dan sistem TI akan memperkuat tata kelola TI di Undip.

Adapun strategi pengembangan Sistem Informasi Fakultas Hukum dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Universitas sebagai berikut:

- Penyusunan cetak biru sistem dan teknologi informasi Fakultas Hukum terintegrasi dengan Undip untuk mendukung transformasi digital Fakultas Hukum (tahun pertama)
- Identifikasi digitalisasi administrasi perkantoran (tahun pertama)
- Sinkronisasi data kemahasiswaan dan administrasi perkantoran Fakultas Hukum untuk mendukung transformasi digital Undip (tahun pertama)
- Perluasan cakupan akses Wi-fi secara optimal (bertahap sampai tahun kedua)
- Peningkatan infrastruktur khususnya pada backbone antar gedung dan perluasan wi-fi secara merata (tahun kedua)
- Implementasi satu data untuk pengambilan keputusan (tahun ketiga)
- Implementasi teknologi laboratorium hukum digital (tahun ketiga)
- Peningkatan infrastruktur khususnya pada data center CCTV Fakultas Hukum (tahun keempat)
- Implementasi layanan call center melalui aplikasi Hallo FH bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa, dosen, karyawan, serta pihak eksternal dengan pihak kampus (tahun keempat)
- Penyusunan cetak biru lima tahun berikutnya (tahun kelima)

3. Komunikasi dan Humas
 - Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang jelas untuk mengukur keberhasilan kampanye dan inisiatif komunikasi, seperti peningkatan *engagement*, peningkatan sentimen positif, dan pencapaian tujuan komunikasi, serta internasionalisasi.
 - Memperbarui dan mengembangkan platform digital meliputi media sosial, website, dan aplikasi, dengan fokus pada *user experience*.
4. Perpustakaan
 - Meningkatkan literasi informasi dan literasi lain serta tools yang relevan bagi peningkatan *soft skills* sivitas akademika.
 - Menyediakan sumber pembelajaran dan informasi ilmiah yang mutakhir, komprehensif, berkualitas, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - Meningkatkan fasilitas perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terkini yang ramah, nyaman dan memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja pemustaka.
 - Meningkatkan profesionalisme dan integritas SDM perpustakaan untuk menunjang terselenggaranya layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan Publik bagi pemustaka dan pelanggan.
 - Mengimplementasikan sistem informasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung tata kelola kinerja perpustakaan yang baik, akuntabel, efisien dan efektif.
 - Meningkatkan kerjasama perpustakaan di tingkat institusi, nasional, regional, maupun internasional.
 - Meningkatkan mutu layanan perpustakaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemustaka dan pelanggan.

D. Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik

1. Bidang Riset
 - Peningkatan jumlah publikasi berbasis International Research Network
 - Skema riset untuk peningkatan jumlah sitasi artikel dosen
 - Program penunjang publikasi (*proofread*, insentif publikasi, klinik manuskrip)
 - Peningkatan jumlah riset dana internasional
 - Penataan dan pemberdayaan pusat riset
 - Peningkatan jurnal terindeks Scopus
2. Bidang PKM
 - Penguatan hibah-hibah PKM (PKUM, IDBU)
 - Penataan sistem KKN (tematik)
 - Program pengentasan kemiskinan

3. Reputasi, Kemitraan dan Konektifitas Global
 - Penyelarasan fungsi international office dengan Direktorat Reputasi, Kemitraan dan Konektifitas Global.
 - Penguatan program-program WCU penunjang pemeringkatan (adjunct professor, visiting professor, student go-international, postdoc international, staff exchanges, scientific consortium, alumni connect).
 - Peningkatan jejaring scientist Undip dengan media nasional dan internasional (JUARA)
 - Peningkatan exposure scientific profile dosen Undip.
4. Bidang Inovasi, Hilirisasi dan Kerjasama Industri
 - Meningkatkan layanan dan capaian Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta)
 - Perbaiki tata kelola administrasi (SOP) kerjasama industri dan monitoring evaluasi internal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan reputasi.
5. Sustainability
 - Melakukan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi yang bertemakan SDGs.

PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Fakultas Hukum menetapkan program, Indikator Kinerja Utama dan target Kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut

Tabel 19. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA		KLAS TER	SAT	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA				
							2025	2026	2027	2028	2029
1	Peningkatan kualitas lulusan yang link and match dengan DUDI	1	Lulusan memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	PTN	%	80	80	81	82	83	84
		2	Employment Outcomes (EO)	WCU	skor	14,6	17	20	23	26	30
		3	Employer Reputation (ER)	WCU	skor	41,7	49	55	65	70	75
2	Peningkatan Kompetensi dan Prestasi Mahasiswa	4	Mahasiswa belajar di luar program studi atau meraih prestasi	PTN	%	25,71	40	40,2	40,5	40,7	41
		5	International Student Ratio (ISR)	WCU	skor	3	3,3	3,6	3,8	4	4,5
3	Peningkatan Kualitas	6	Pembelajaran berbasis case	PTN	%	78	78	79	80	81	82

	Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Akademik		method atau teambased project								
		7	Akreditasi atau sertifikasi internasional Program Studi	PTN	%	39	45	47	49	50	53
		8	Academic reputation (AR)	WCU	skor	19,2	30	35	40	45	55
4	Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi Bereputasi	9	Paper per faculty	WCU	Publi kasi Interna sional/ dosen	1,1	2	2,5	3	3,5	4
5	Peningkatan Penelitian berbasis karakteristik UNDIP	10	Pengembangan lingkungan wilayah tropis, pantai, dan pesisir berkelanjutan	Karak teristik UNDIP	%	N/A	20	22	25	27	30
6	Peningkatan Kerjasama dan Relevansi Hasil Riset	11	Citation per Faculty (CF)	WCU	skor	1,5	1,7	1,8	2,3	2,5	3
		12	International Research Network (IRN)	WCU	skor	27,4	40	50	55	60	65
		13	Kerjasama program studi	PTN	kerja sama/ prodi	1,2	1,4	1,5	1,65	1,7	1,8
7	Peningkatan inovasi dan hilirisasi hasil riset	14	Luaran dosen diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah	PTN	luaran/ dosen	2,76	2,85	2,95	3,2	3,3	3,4
		15	Hilirisasi produk Inovasi	Karak teristik UNDIP	produk	N/A	1	1	1	1	1
8	Peningkatan kontribusi pemecahan permasalahan masyarakat	16	Kontribusi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan penanggulangan bencana	Karak teristik UNDIP	%	N/A	1,5	1,8	2,2	2,5	2,8
9	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme Dosen dan Tendik	17	Dosen berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, menjadi praktisi atau pembimbing di luar program studi	PTN	%	72,07	72,8	73,4	74,1	74,6	75
		18	Faculty Student	WCU	skor	19,3	25	30	35	40	45

			Ratio (FSR)								
		19	International Faculty Ratio (IFR)	WCU	skor	27,9	34	38	42	47	55
		20	Dosen bersertifikasi kompetensi/profesi dan pengajar praktisi	PTN	%	17,73	25	26,5	27,1	27,6	28
		21	Tendik Bersertifikasi Kompetensi	Karak teristik UNDIP	%	34,6	40	45	50	53	55
10	Peningkatan Akuntabilitas, Tata Kelola, dan Manajemen Organisasi	22	Predikat SAKIP Satker	PTN	Predikat	AA (90,90)	A	AA	AA	AA	AA
		23	Nilai Kinerja Anggaran	PTN	skor	92,05	93	93,5	93,8	94	94,2
		24	Kepatuhan, Pengendalian Internal dan Penyelesaian Temuan	Karak teristik UNDIP	%	N/A	75	80	85	90	95
		25	Manajemen dan Pelayanan Teknis	Karak teristik UNDIP	%	80	82	84	86	88	90
11	Peningkatan Proporsi Sumber Dana Non Pendidikan	26	Pendapatan non akademik terhadap total pendapatan	Karak teristik UNDIP	%	17	22	23,5	24	25	26
		27	Endowment Fund dan Hasil Investasi	Karak teristik UNDIP	Rp (milyar)		0,2	0,25	0,3	0,35	0,4
12	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana	28	Nilai Aset	Karak teristik UNDIP	Rp (milyar)		93				
		29	Sustainability	WCU	skor	9,7	11	12	14	18	22
13	Peningkatan Branding, Diseminasi Informasi dan Budaya Literasi	30	Branding dan Diseminasi di media	Karak teristik UNDIP	%	N/A	75	80	85	90	95
		31	Repositori dan Literasi	Karak teristik UNDIP	%	79	80	82	84	86	88
14	Peningkatan Keterpaduan Sistem Informasi Terintegrasi	32	Sistem Informasi penunjang tata kelola	Karak teristik UNDIP	%	89,75	90	91	92	93	94

KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN, DAN ANALISIS RISIKO

KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi yang akan digunakan untuk pengembangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai Fakultas Hukum Yang Progresif Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila Menuju Pengembangan Keilmuan Yang Berbasis Riset Berkelas Dunia pada Tahun 2025.

Tabel 20. Rencana Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Tahun 2025-2029

Peraturan Rektor tentang Akademik dan Kemahasiswaan	
1	Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Diponegoro
2	Peraturan Rektor tentang Penjaminan Mutu Akademik
Peraturan Rektor tentang Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtanggaan	
1	Peraturan Rektor tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro
2	Peraturan Rektor tentang Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
3	Peraturan Rektor tentang Penatausahaan Aset dan BMU
4	Peraturan Rektor tentang Restrukturisasi Tata Kelola dan Organisasi
Peraturan Rektor tentang Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi	
1	Peraturan Rektor tentang Sistem dan Teknologi Informasi
2	Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Usaha Bisnis dan Komersial
3	Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro
4	Peraturan Rektor tentang Pengisian Jabatan Tugas Tambahan di Universitas Diponegoro
5	Peraturan Rektor tentang Penjenjangan Karir dan Jabatan Pegawai
6	Peraturan Rektor tentang Kearsipan
Peraturan Rektor tentang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik	
1	Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kerjasama Universitas Diponegoro

KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro dan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro. Adapun kerangka kelembagaan Fakultas Hukum adalah sebagai berikut:

Organ Fakultas Hukum Undip terdiri dari :

1. Senat Fakultas

Senat Fakultas Hukum merupakan organ fakultas yang menyelenggarakan fungsi pertimbangan kepada Dekan, pengawasan akademik dan kemahasiswaan serta pengawasan nonakademik tertentu.

Senat Fakultas Hukum terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

2. Dekan dan Wakil Dekan

Dekan diangkat dan/atau diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, membina dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, administrasi fakultas, inovasi, kerjasama, komunikasi, bisnis, informasi dan hubungan dengan alumni dan lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Dekan yang terdiri atas:

- a. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Wakil Dekan Sumber Daya.

Wakil Dekan bertanggung jawab langsung kepada Dekan dan diangkat serta diberhentikan oleh Rektor.

3. Program Studi

Program Studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

Fakultas Hukum Undip memiliki 4 program studi yakni :

- 1) Program Doktor Hukum
Program Doktor Hukum dipimpin oleh Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi.
- 2) Program Magister Hukum
Program Magister Hukum dipimpin oleh Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi.
- 3) Program Magister Kenotariatan
Program Magister Kenotariatan dipimpin oleh Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi.
- 4) Program Sarjana Hukum
Program Sarjana Hukum dipimpin oleh Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi.

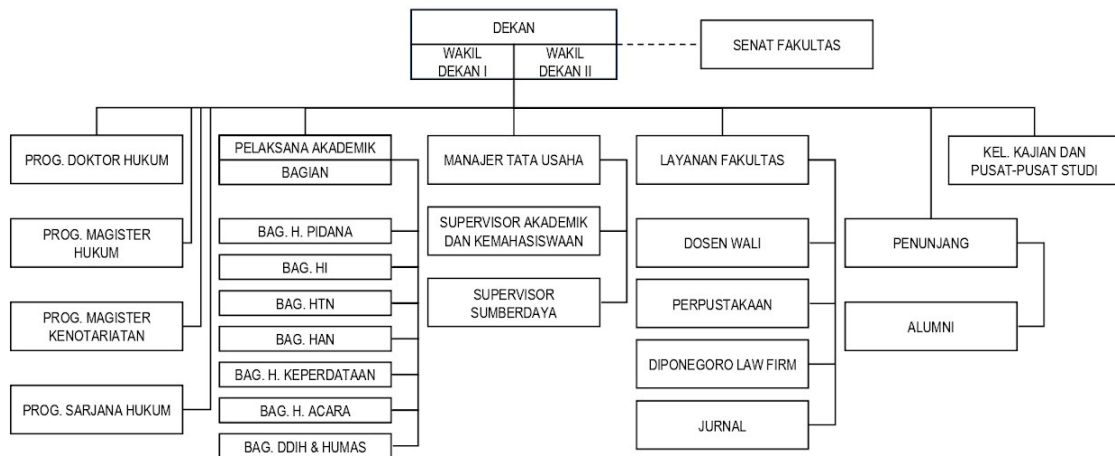
4. Bagian

Bagian merupakan kelompok dosen dalam bidang ilmu konstentrasi tertentu yang dapat mengelola laboratorium dan dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Fakultas Hukum memiliki 7 Bagian yang berfungsi untuk mengkoordinasi dalam bidang hukum yang serumpun yakni :

- 1) Bagian Hukum Pidana;

- 2) Bagian Hukum Acara;
 - 3) Bagian Hukum Perdata;
 - 4) Bagian Hukum Tata Negara;
 - 5) Bagian Hukum Administrasi Negara;
 - 6) Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Humas; dan
 - 7) Bagian Hukum Internasional.
5. Bagian Tata Usaha
- Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan fakultas yang dipimpin oleh seorang Manajer yang bertanggung jawab kepada Dekan.



Gambar 10. Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Dekan Fakultas Hukum

ANALISIS RISIKO INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 21. Analisis Risiko IKU Fakultas Hukum

No	Indikator Kinerja Utama	Risiko Potensial	Mitigasi Risiko
1	Lulusan memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	<ul style="list-style-type: none"> Kurikulum belum semuanya relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri Rendahnya lulusan berwira usaha Tuntutan pasar kerja yang memerlukan kompetensi semakin meningkat Tidak ada jaminan untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik Sumber dana pendukung kegiatan wirausaha terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi perangkat manajemen di tingkat Departemen/Program Studi untuk pendataan <i>Tracer Study</i> Mengumumkan tingkat capaian <i>tracer study</i> sampai level Prodi melalui surat dinas, SSO Undip dan media <i>online</i> Melaksanakan workshop optimalisasi <i>tracer study</i>. Memberikan souvenir kepada alumni yang mengisi
2	<i>Employment Outcomes (EO)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah alumni dengan <i>impact</i> yang tinggi belum mencapai target 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dan pendataan alumni dan mengembangkan <i>success story website</i> Fakultas

3	<i>Employer Reputation (ER)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya respond dari <i>Employer peer</i> sehingga indikator target <i>employer indikator</i> tidak mencapai maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi dengan alumni dan pengguna baik nasional maupun internasional selalu dijaga • Meningkatkan event bersama alumni • Koordinasi antara pihak pusat dan Prodi untuk pemutakhiran data ER
4	Mahasiswa belajar di luar program studi atau meraih prestasi	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya minat terhadap program MBKM • Belum ada dsain kebijakan MBKM yang terukur • MBKM dan capaian prestasi mahasiswa belum maksimal • Skema inbound internal masih banyak kendala Ketentuan baru tentang perolehan sertifikat internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi kebijakan program MBKM di Undip dengan mendorong komitmen fakultas/departemen/Prodi; • Optimalisasi kerjasama dengan instansi dan PT lain untuk pelaksanaan program • Membuat disain pencapaian IKU 2, dengan modifikasi perkuliahan system blok perkuliahan dan kegiatan MBKM untuk memudah konversi • Menerapkan Permen 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mengenai konversi nilai tanpa huruf, hanya keterangan lulus • Penyesuaian Peraturan Akademik
5	<i>International Student Ratio (ISR)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya kurikulum berstandar internasional • Terbatasnya kemampuan Bahasa asing staf pengajar • Banyaknya pesaing dari program perguruan tinggi lain yang lebih diminati • Jumlah mahasiswa asing tidak mencapai target 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan promosi ke Luar Negeri untuk Prodi, dan riset unggulan • Pengembangan program <i>research assistant</i> untuk S2/S3 bagi mahasiswa asing • Peningkatan jumlah <i>summer course</i>
6	Pembelajaran berbasis <i>case method</i> atau <i>team-based project</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak pelaksanaan pembelajaran dengan metode konvensional • Implementasi rencana pembelajaran yang sesuai • Tuntutan lulusan berkompentensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan perkuliahan dengan model <i>case method/project based learning</i> • Melakukan monitoring ke Prodi untuk pengisian mata kuliah menggunakan <i>case method/project based learning</i>

7	Akreditasi atau sertifikasi internasional Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya motivasi pengelola Prodi untuk mendapatkan akreditasi internasional • Terbatasnya Lembaga-lembaga akreditasi internasional • Tingginya biaya akreditasi internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Prodi untuk menuju Akreditasi Internasional melalui audit mutu internal • Mencari lembaga akreditasi Internasional pengganti sesuai dengan Kepmendikbudristek Nomor 236/O/2024 • Pemantauan secara menyeluruh untuk Prodi-Prodi yang mengikuti akreditasi internasional dalam hal pemenuhan <i>requirement</i> dan <i>recommendation</i> • Pemantauan secara detail untuk penyusunan SER dan <i>appendix</i> bagi Prodi-Prodi yang mengikuti akreditasi internasional
8	<i>Academic reputation (AR)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang terpenuhinya target indikator <i>Academic reputation</i> yang disebabkan respon <i>academic peer</i> rendah • Kurang optimalnya melakukan <i>keep-touch</i> ke <i>academic-peer</i> • Rendahnya respon dari responden <i>academic-peer</i> • Rendahnya minat dan insentif dosen melakukan internasionalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Selalu menjaga komunikasi dengan <i>academic peer</i> melalui newsletter dari fakultas serta informasi lainnya yang terkini • Pemanfaatan jalur publikasi media non-ilmiah (media populer) baik nasional maupun internasional untuk peningkatan reputasi Undip • Mengembangkan <i>event-event</i> tingkat internasional
9	<i>Paper per Faculty</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya jumlah publikasi di jurnal bereputasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Inisisasi dan kolaborasi riset dengan top 100 QS <i>By subject</i> • Peningkatan sarpras laboratorium pendukung riset • Bantuan pendanaan biaya publikasi
10	Pengembangan lingkungan wilayah tropis, pantai, dan pesisir berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya riset berorientasi pengembangan lingkungan wilayah tropis, pantai, dan pesisir secara berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ada kebijakan yang mandatori sesuai dengan keunggulan Fakultas
11	<i>Citation per Faculty (CF)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tercapainya target sitasi karena jumlah publikasi di jurnal bereputasi tinggi (Q1/Q2) kurang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbanyak publikasi di jurnal berbasis <i>review article</i> dan publikasi di jurnal dengan <i>impact factor</i> tinggi (Q1/Q2) • Memanfaatkan Kerjasama konsorsium riset untuk peningkatan sitasi • Meningkatkan peran riset unggulan fakultas/sekolah • Inisisasi dan kolaborasi riset dengan top 100 QS <i>by subject</i>

12	<i>International Research Network (IRN)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Diversitas afiliasi dan negara mitra kurang mencapai target 	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan bagi peneliti/dosen dalam penelusuran calon mitra kerjasama penelitian melalui <i>Pivot RP platform</i> Pengembangan <i>website /system</i> informasi kepakaran <i>scholar</i> Fakultas
13	Kerjasama program studi	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi dari kerjasama belum dilaksanakan dengan optimal, beberapa belum sampai tahap <i>Implementation of Arrangement (IA)</i> Tata kelola administrasi (SOP) kerjasama dan monitoring evaluasi internal untuk meningkatkan kualitas pelayanan, akuntabilitas serta reputasi. Rendahnya penggunaan media dan sarana untuk meng-akselerasi pertemuan dan kolaborasi antara peneliti dan mitra (pemerintah/industry) 	<ul style="list-style-type: none"> Semua PKS harus diikuti dengan IA (bisa beberapa IA, setiap kegiatan dibuatkan IA) Menyempurnakan template IA Pendampingan Penyusunan dan monitoring evaluasi PKS dan IA per Fakultas secara periodik
14	Luaran dosen diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Tidak semua <i>paper</i> layak untuk publikasi internasional, serta <i>review paper</i> untuk publish memerlukan waktu yang lama Alokasi Dana Penelitian sumber dana DRPTM mengalami penurunan Terdapat <i>missing link/ gap/ unreliable</i> antara peneliti dengan pengguna teknologi (dunia usaha, industri, pemerintah) karena lebih berorientasi pada "<i>technology push</i>". Minimnya riset kolaboratif yang berbasis pada kebutuhan industri/masyarakat/pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi target luaran pada penelitian <i>Mandatory</i> luaran inovasi pada fakultas

15	Hilirisasi produk inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan dan tren pasar yang dinamis • Produk yang diajukan kurang menarik pihak pasar/industri • Masih rendahnya animo Dosen untuk mengikuti Program-Program Pendanaan Hilirisasi • Rendahnya jumlah hasil riset yang dapat dihilirkan dan dikomersialkan • Rendahnya pelayanan inkubator bisnis kepada start up teknologi hasil riset 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyeksi dan Analisa kebutuhan pasat • Penguatan <i>Science Technopark</i> (STP) sebagai episentrum komersialisasi inovasi dan teknologi hasil riset. • Memperkuat jejaring sebagai partner kolaborasi • Sosialisasi, pendampingan dan pencarian Mitra yang sanggup memberikan pendanaan (<i>in cash dan in kind</i>) untuk usulan program Pendanaan hilirisasi • Tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset • Dibutuhkan <i>incubator bisnis</i> yang memberikan layanan pembimbingan dan dukungan kepada start-up teknologi hasil riset.
16	Kontribusi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya kebijakan pedoman pelaksanaan • Kerjasama dengan <i>stake holder</i> belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan tentang <i>Action-plan</i>
17	Dosen berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, menjadi praktisi atau pembimbing di luar program studi	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas dosen sudah padat dengan tugas Tri Dharma; • Belum banyak aktivitas pembelajaran yang melibatkan praktisi • Kesulitan dalam mendapatkan data Dosen membimbing mahasiswa berprestasi di luar Prodi MBKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemenuhan dan konversi (<i>reward</i>) kegiatan tri dharma dosen dalam insentif kinerja dosen; • Optimalisasi kerjasama atau jejaring alumni dengan praktisi//profesional dalam kegiatan tri dharma PT • Koordinasi dengan Bagian Kemahasiswaan selaku PIC SIMKATMAWA
18	<i>Faculty Student Ratio</i> (FSR)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan pembiayaan dari UKT masih tinggi • Rendahnya pendataan di luar dosen tetap • Rasio jumlah dosen dengan mahasiswa belum mencapai target yang ideal berdasarkan kriteria QS/THE WUR 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi jumlah kerjasama Undip dengan lembaga pendidikan dan industri sehingga pengajar dan pembimbing dapat diakui sebagai staf dosen

19	<i>International Faculty Ratio (IFR)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dosen sebagai <i>adjunct</i> maupun <i>visiting professor</i> di Fakultas tidak mencapai target 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dosen mitra internasional yang terlibat dalam pengajaran dan pembimbingan dalam program jumlah <i>joint degree, double degree</i> Meningkatkan jumlah dosen internasional dalam aktivitas Pendidikan dan penelitian dalam kegiatan <i>adjunct, visiting professor</i> dan <i>postdoctoral</i>
20	Dosen bersertifikasi kompetensi/profesi dan pengajar praktisi	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya dosen yang bersertifikat kompetensi Sedikitnya praktisi yang di Fakultas 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong/<i>mandatory</i> dosen untuk memiliki sertifikat kompetensi dan melibatkan praktisi dalam kegiatan akademik Memantau progress capaian dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi Melakukan kegiatan pendampingan kepada dosen tentang pengisian data sertifikasi kompetensi
21	Tendik Bersertifikasi Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> Kurang minatnya Tendik mengikuti pelatihan kompetensi bersertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan mandatori setiap Tendik mempunyai sertifikat kompetensi
22	Predikat SAKIP Satker	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar 	<ul style="list-style-type: none"> Secara periodik Fakultas melakukan koordinasi untuk memonitor implementasi dan validasi data pendukung SAKIP
23	Nilai Kinerja Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Serapan belanja terkonsentrasi pada triwulan IV Rekonsiliasi terkait dengan keuangan akuntansi aset belum terjadi dengan baik Tuntutan transparansi dan akuntabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi kinerja anggaran tiap bulan Melakukan koordinasi dengan unit terkait
24	Kepatuhan, Pengendalian Internal dan Penyelesaian Temuan	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen penyelesaian temuan Temuan tidak dapat ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> Meminimalisasi temuan Penguatan peraturan yang implementatif
25	Manajemen dan Pelayanan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> Kurang optimalnya pelaksanaan SOP pelayananan pada user 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pengawasan dan monev pelayanan secara berkala dan terlembaga
26	Pendapatan nonakademik terhadap total pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan aset belum maksimal Investasi belum memadai Kebijakan Pembatasan jumlah UKT 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan optimalisasi pemanfaatan aset dan BMU Mengoptimalkan komersialisasi produk inovasi Optimalisasi pengelolaan investasi

27	<i>Endowment Fund</i> dan Hasil Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan <i>Endowment Fund</i> belum optimal • Kebijakan investasi belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan pengembangan <i>Endowment Fund</i> yang lebih optimal
28	Nilai Aset	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pengembangan asset belum optimal • Pengurangan atau penghapusan anggaran dari pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan optimalisasi penatausahaan asset dan BMU
29	<i>Sustainability</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya kebijakan implementasi SDGs • Tuntutan implementasi SDGs dalam skala nasional, regional, dan internasional • Indikator QS <i>Sustainability</i> tidak mencapai maksimum 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan Fakultas terkait SDGs • Peningkatan jumlah kerjasama DUDI yang memberikan dampak paten/kebijakan • Peningkatan jumlah pengabdian Masyarakat tingkat internasional
30	Branding dan Diseminasi di media	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya diseminasi informasi dan publikasi Fakultas di media 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan trafik <i>website</i> dan media media sosial
31	Repositori dan literasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya tingkat pemanfaatan repository dan resources • Kurang penguasaan literasi dalam mendukung publikasi ilmiah 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pelatihan, <i>workshop</i> dan publikasi
32	Sistem Informasi penunjang tata kelola	<ul style="list-style-type: none"> • DSS belum ada dan Keamanan sistem informasi belum maksimal • Basis data aplikasi-aplikasi yang masih terpisah-pisah • Kemampuan produksi aplikasi yang terbatas di Fakultas • Jumlah akses poin belum maksimal untuk memenuhi kebutuhan seluruh area kampus • Perangkat <i>router gateway</i> dan <i>firewall</i> jaringan komputer sudah tidak mampu menangani trafik yg semakin meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan sistem dan teknologi informasi komprehensif dan terintegrasi yang menunjang tata kelola dan pelayanan • Optimalisasi kelembagaan sistem dan informasi

KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan Fakultas dan seluruh sasaran strategis yang ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, antara lain dukungan dan prasarana yang memadai, regulasi, dan sumber pendanaan yang cukup.

Dalam periode lima tahun (2025-2029), strategi pendanaan untuk pengembangan fakultas mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Disamping itu juga mengacu pada kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan tinggi, program-program pengembangan Undip, dan sasaran yang ingin dicapai pada periode Renstra 2025-2029. Guna mendukung hal tersebut di atas, maka pembiayaan lebih fokus pada penyelenggaraan program yang memiliki dampak langsung pada pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Fakultas. Hal ini dilakukan melalui penetapan skala prioritas, dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas/kinerja yang dihasilkan.

SUMBER PENERIMAAN

Pada periode 2025-2029 dana pengembangan Fakultas Hukum bersumber dari dana pemerintah (APBN) dan dana masyarakat (selain APBN). Secara garis besar, perencanaan sumber penerimaan Fakultas Hukum tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dari APBN dan Selain APBN (diperhitungkan dari kebutuhan belanja program dan target penerimaan) adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Sumber Penerimaan Fakultas Hukum Tahun 2025-2029

NO	URAIAN	TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
APBN						
	Gaji dan Tunjangan PNS	16.634.404.980	16.967.093.080	17.306.434.941	17.652.563.640	18.005.614.913
	BPPTNBH dan APBN lainnya	3.589.739.046	3.661.533.827	3.734.764.503	3.809.459.794	3.885.648.989
SELAIN APBN						
	Pendapatan Layanan Pendidikan	83.247.722.856	84.080.200.085	84.921.002.085	85.770.212.106	86.627.914.227
	Pendapatan Layanan Pendukung Pendidikan					
	Pendapatan Usaha PTNBH	177.500.000	185.000.000	190.000.000	195.000.000	200.000.000
	Pendapatan Kerjasama	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Pendapatan Pengelolaan Dana Abadi					
	Pendapatan Pengelolaan Kekayaan PTNBH	40.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000
	Penggunaan SELAIN APBN - Sisa Lebih atau Surplus Fiskal					
TOTAL			84.465.222.856	85.323.200.085	85.979.002.085	87.023.212.106

KEBUTUHAN BELANJA

Pada periode 2025-2029 kebutuhan dana Undip untuk belanja berasal dari sumber APBN dan sumber Selain APBN. Seluruh angka baik rencana pendapatan maupun rencana belanja merupakan estimasi dan akan tetap disesuaikan pada saat menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada setiap tahun berjalan.

Tabel 23. Rekapitulasi Rencana Sumber Pendapatan dan Kebutuhan Belanja Fakultas Hukum Tahun 2025-2029

NO	URAIAN	TAHUN (Rp)				
		2025	2026	2027	2028	2029
SALDO AWAL SILPA (A)						
RENCANA PENDAPATAN (B)						
1	APBN					
2	SELAIN APBN	83.247.722.856	84.080.200.085	84.921.002.085	85.770.212.106	86.627.914.227
RENCANA BELANJA ©						
1	Belanja Modal					
	• APBN Lainnya	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	• Selain APBN – Pendapatan Tahun Berjalan					
	• Selain APBN – Sisa Lebih atau Surplus Fiskal	40.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000
2	Belanja Operasional dan Non Modal Lainnya					
	• APBN	84.465.222.856	85.323.200.085	85.979.002.085	87.023.212.106	87.885.914.227
	• APBN BPPTNBH	83.247.722.856	84.080.200.085	84.921.002.085	85.770.212.106	86.627.914.227
	• APBN Lainnya					
	• Selain APBN	177.500.000	185.000.000	190.000.000	195.000.000	200.000.000
ESTIMASI SILPA TAHUN BERJALAN (E)		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

Rincian indikasi kebutuhan anggaran masing-masing program dari tahun 2025-2029 tertuang dalam Tabel Kerangka Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 24. Kerangka Pendanaan Program Fakultas Hukum Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM	TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Peningkatan Kualitas Lulusan yang Link and Match dengan DUDI	4.797.701.625	4.782.207.500	4.830.000.000	4.878.000.000	4.925.000.000
2	Peningkatan Kompetensi dan Prestasi Mahasiswa	2.935.841.500	3.324.900.500	3.358.000.000	3.391.000.000	3.425.000.000
3	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Akademik	506.127.000	729.360.000	736.600.000	744.000.000	751.000.000
4	Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi Bereputasi	2.469.262.000	2.663.400.000	2.690.000.000	2.715.000.000	2.740.000.000
5	Peningkatan Penelitian Berbasis Karakteristik Undip	64.275.000	123.825.000	125.000.000	130.000.000	135.000.000
6	Peningkatan Kerjasama dan Relevansi Hasil Riset	2.023.890.620	2.504.259.900	2.510.000.000	2.535.000.000	2.550.000.000
7	Peningkatan Inovasi dan Hilirisasi Hasil Riset	502.900.000	472.750.000	477.500.000	482.000.000	485.000.000
8	Peningkatan Kontribusi Pemecahan Permasalahan Masyarakat	100.000.000	150.000.000	165.000.000	190.000.000	200.000.000
9	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Dosen dan Tendik	6.491.526.936	7.934.247.768	8.013.590.246	8.093.726.148	8.174.663.410
10	Peningkatan Akuntabilitas, Tata Kelola, Manajemen dan Perampingan Organisasi	7.039.905.291	4.309.144.750	4.500.000.000	4.545.000.000	4.590.450.000
11	Peningkatan Proporsi Sumber Dana Non Pendidikan	229.500.000	187.500.000	189.375.000	191.268.750	193.181.438
12	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana	9.474.458.572	9.954.518.127	11.296.633.355	11.697.120.688	11.827.241.895
13	Peningkatan Branding, Diseminasi Informasi dan Budaya Literasi	313.222.000	593.392.000	600.000.000	606.000.000	612.060.000
14	Peningkatan Keterpaduan Sistem Informasi Terintegrasi	81.000.000	2.509.800.000	750.000.000	850.000.000	850.000.000

SALDO AKHIR SILPA (E=A+B+C+D)		37.029.610.544	40.239.305.545	40.241.698.601	41.048.115.586
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Tabel 25. Kerangka Pendanaan Program World Class University Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2025	RKAT TA 2025	Target Kinerja 2026	RKAT TA 2026	Target Kinerja 2027	RKAT TA 2027	Target Kinerja 2028	RKAT TA 2028	Target Kinerja 2029	RKAT TA 2029
1	Academic Reputation		48	90.000.000	54	91.800.000	61	93.636.000	69	95.508.720	70	97.418.894
2	Employer Reputation		39	130.000.000	42	132.600.000	45	135.252.000	48	137.957.040	48	140.716.181
3	Citation/Faculty		70	90.000.000	85	91.800.000	100	93.636.000	115	95.508.720	132	97.418.894
4	International Students		125	250.000.000	164	255.000.000	202	260.100.000	260	265.302.000	262	270.608.040
5	International Faculty		27	150.000.000	35	153.000.000	44	156.060.000	52	159.181.200	62	162.364.824
6	International Research Network		38	250.000.000	46	255.000.000	53	260.100.000	61	265.302.000	67	270.608.040
7	Outbond Students		37	125.000.000	42	127.500.000	48	130.050.000	54	132.651.000	59	135.304.020
8	Faculty Students		50	75.000.000	53	76.500.000	56	78.030.000	65	79.590.600	71	81.182.412
9	Paper per Faculty		168	850.000.000	185	867.000.000	201	884.340.000	218	902.026.800	235	920.067.336
10	Employment Outcomes		16	175.000.000	20	178.500.000	24	182.070.000	28	185.711.400	32	189.425.628
11	Sustainability		5	200.000.000	8	204.000.000	10	208.080.000	13	212.241.600	15	216.486.432

STRATEGI PENERIMAAN

Untuk memenuhi berbagai sumber penerimaan diperlukan strategi pendanaan untuk memenuhi kebutuhan dana (rencana belanja) yang kecenderungannya terus meningkat. Strategi tersebut adalah mengembangkan potensi pendanaan secara komprehensif dengan cara memanfaatkan berbagai peluang skema pendanaan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kondisi eksternal dan internal. Rencana pendanaan akan berasal dari 2 (dua) sumber yaitu dari APBN dan Selain APBN antara lain:

Sumber APBN

1. Meningkatkan capaian besaran penerimaan yang bersumber dari BP PTNBH.
2. Menangkap dana hibah (*blockgrant*) dari pemerintah seperti Hibah Bersaing, Hibah Pasca Sarjana, Penelitian Fundamental, Hibah Kompetisi, dan lain-lain.
3. Mengupayakan pengusulan proposal hibah/pinjaman luar negeri (lembaga hibah : IDB, JICA, dan lain-lain).

Sumber Selain APBN

1. Mengoptimalkan perolehan penerimaan dana pendidikan dari berbagai sumber dan sumbangan biaya operasional pendidikan bentuk lainnya. dengan tetap memperhatikan bantuan/subsidi bagi mahasiswa sesuai dengan kebijakan afirmasi.
2. Mendirikan dan mengembangkan unit bisnis.
3. Mendirikan badan-badan jasa konsultasi dan pelatihan berdasarkan keahlian dan mengembangkan kerjasama dengan industri.
4. Pengembangan jejaring dengan para alumni.
5. *Corporate Social Responsibility* dari perusahaan di Indonesia.
6. Menjajaki peluang komersialisasi hasil riset.
7. Meningkatkan kerjasama baik di dalam negeri seperti kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, dan Perusahaan Swasta maupun kerjasama dengan luar negeri.
8. Memberdayakan aset-aset fakultas.

Pengumpulan *endowment fund* digunakan sebagai dasar oleh LPDP dan Dikti untuk distribusi alokasi Dana Abadi Peguruan tinggi yang penggunaannya sudah ditentukan oleh Dikti dan LPDP. Fakultas Hukum terus berkomitmen setiap tahun melakukan penambahan dana abadi dan melakukan pengelolaan dana untuk kepentingan pengembangan terutama bea siswa studi lanjut Dosen dan Tendik serta mahasiswa.

KEBIJAKAN PENDANAAN

Pendanaan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai indikator kinerja yang telah ditentukan. Untuk mencapainya diperlukan pendanaan yang tidak sedikit. Di sisi lain subsidi pemerintah melalui APBN cenderung terus menurun. Oleh karena itu Fakultas dituntut untuk mencari sumber-sumber pembiayaan sendiri. Dengan kondisi tersebut di atas, harus dilakukan kebijakan alokasi agar dana yang digunakan benar-benar efektif dan efisien. Dengan kebijakan ini. seluruh satuan kerja

dalam merencanakan atau memprogramkan suatu kegiatan harus mengacu pada skala prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra dan disetujui melalui suatu hierarki manajemen untuk mewujudkan penyelenggaraan yang *Good Governance*.

Kebijakan pengeluaran dana Fakultas Hukum periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran untuk kebutuhan dasar Fakultas meliputi gaji dan tunjangan pegawai, pembiayaan penyelenggaraan perkantoran (pembiayaan rutin) akan dibiayai dari APBN dan selain APBN sebagai dana suplemen.
2. Pengeluaran untuk program-program pengembangan Fakultas yang menjadi prioritas terutama investasi infrastruktur, dan penyelenggaraan riset unggulan dibiayai dari APBN atau loan yang diperoleh secara kompetitif maupun penugasan dari Kementerian/Lembaga.
3. Pengeluaran untuk pencapaian IKU PTNBH, IKU Renstra, WCU dan penunjang lainnya dibiayai dari dana selain APBN dan BP PTNBH.
4. Memaksimalkan penyerapan anggaran dari sumber APBN dan bantuan/hibah lembaga donor nasional atau internasional dengan tetap mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi.
5. Mengoptimalkan pengeluaran yang bersumber dari dana selain APBN untuk kegiatan operasional penyelenggaraan program, manajemen institusi, dan kesejahteraan khususnya bagi dosen dan tenaga kependidikan.

7 PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024-2029 merupakan dokumen yang menjadi acuan dan rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi bagi semua Program Studi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Arah Kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kelembagaan demikian halnya dengan target kinerja dan kerangka pendanaan dalam dokumen Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024-2029 diharapkan perwujudannya bisa bersama-sama dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro demi mewujudkan Visi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menjadi Fakultas Hukum yang Progresif berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Menuju Pengembangan Keilmuan yang Berbasis Riset Berkelas Dunia Tahun 2025, serta untuk menghadapi ancaman dinamika perubahan kelembagaan, kebijakan dan revolusi industri 4.0.